



**INTERVENSI KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT DI  
TIMUR TENGAH  
(Analisis Wacana Kritis Pidato Obama Di Sidang Umum PBB  
24 September 2013)**

Humanitarian Intervention of America in Middle East  
*(Critical Discourse Analysis of Obama's Speech in General Assembly  
24 September 2013)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**FARAH DINA HERAWATI  
NIM 100910101057**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

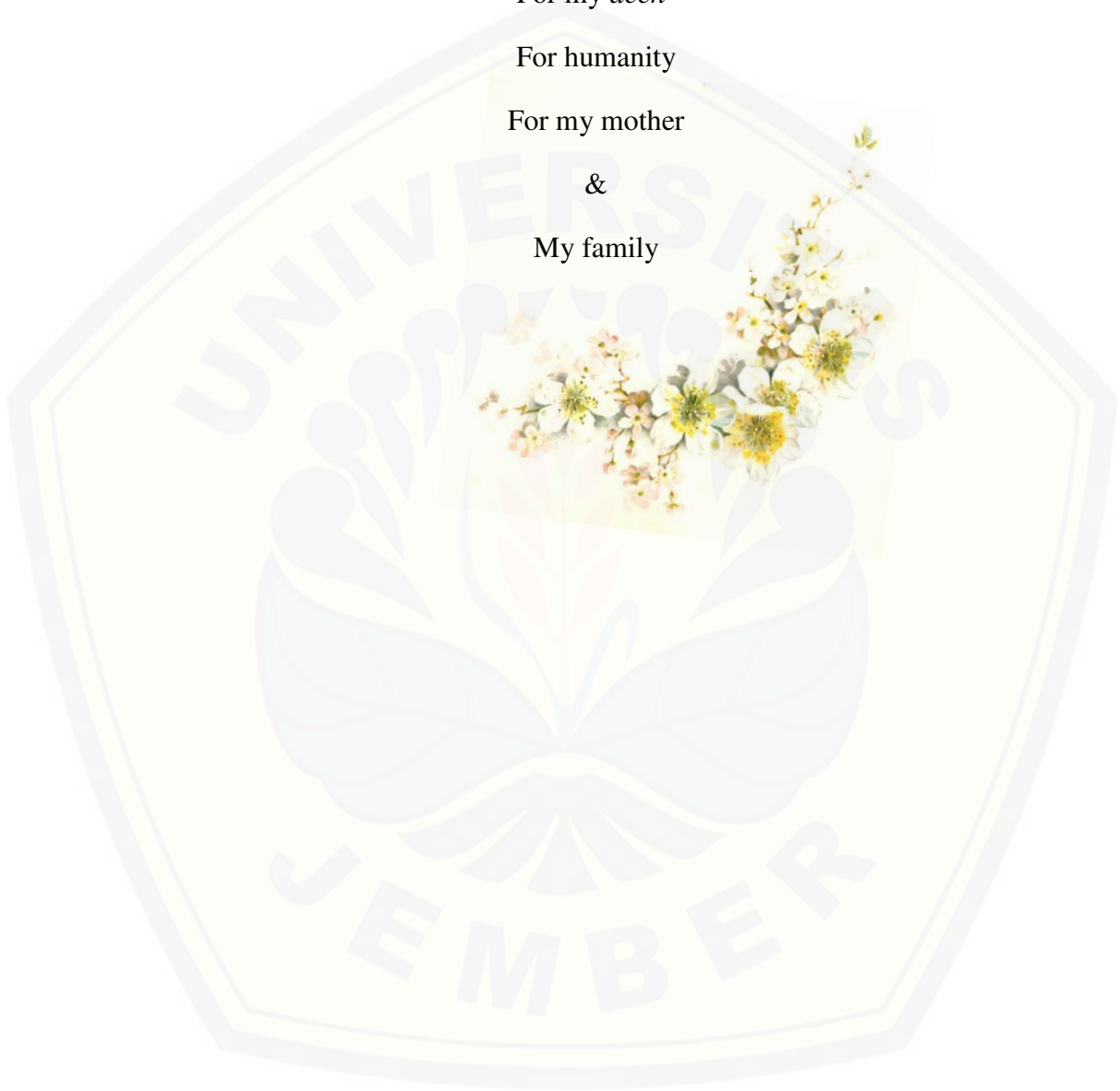
For my *deen*<sup>1</sup>

For humanity

For my mother

&

My family



---

<sup>1</sup> Arabic word for religion or faith. “*Deen with Allah is al-Islam*”

**MOTTO**

*“If any one slew a person, it would be as if he slew the whole humanity: and  
If any one saved a person, it would be as if he saved the whole humanity”<sup>2</sup>*

**---Al Ma'idah: 32**

*“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”*

**---Edmund Burke<sup>3</sup>**



---

<sup>2</sup> Disarikan dari Al Qur'an surat Al Ma'idah ayat 32.

<sup>3</sup> Edmund Burke. 1958. *Philosophical Enquiry*. Ed. J.T Boulton. London: Routledge.

**HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Dina Herawati

NIM : 100910101057

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah yang berjudul Intervensi Kemanusiaan Amerika Serikat Di Timur Tengah (Analisis Wacana Kritis Pidato Obama di Sidang Umum PBB 24 September 2013) adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan dalam institusi mana pun dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Peneliti siap menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Desember 2015

Yang Menyatakan

**Farah Dina Herawati**  
**NIM. 100910101057**

**SKRIPSI**

**INTERVENSI KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT DI TIMUR  
TENGAH**

**(Analisis Wacana Kritis Pidato Obama Di Sidang Umum PBB  
24 September 2013)**

*Humanitarian Intervention of America in Middle East  
(Critical Discourse Analysis of Obama's Speech in General Assembly  
24 September 2013)*

Oleh

**FARAH DINA HERAWATI  
NIM 100910101057**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Himawan Bayu Patriadi. MA., Ph.D.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Muhammad Iqbal, M.Si.

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi berjudul Intervensi Kemanusiaan Amerika Serikat Di Timur Tengah (Analisis Wacana Kritis Pidato Obama Di Sidang Umum PBB 24 September 2013) telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Desember 2015  
Waktu : 11:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang FISIP Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

**Drs. M. Nur Hasan, M. Hum**

NIP 190423198702 1 001

Menyetujui

Sekretaris I

Sekretaris II

**Drs. Himawan Bayu P, MA, Ph.D.**

NIP.196108281992011001

**Dr. Muhammad Iqbal, M.Si.**

NIP. 197212041999031004

Mengetahui

Anggota I

Anggota II

**Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D**

NIP 19802291998031001

**Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A**

NIP 197611122003121002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

**Prof. Dr. Harry Yuswandi, M.Sc.**

NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**Intervensi Kemanusiaan Amerika Serikat Di Timur Tengah (Analisis Wacana Kritis Pidato Obama Di Sidang Umum PBB 24 September 2013);** Farah Dina Herawati, 1001910101057: 208 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Timur Tengah merupakan kawasan potensial yang memiliki kekayaan sumberdaya alam minyak dan gas terbesar di dunia. Selain itu, kawasan ini juga memiliki jalur laut yaitu selat-selat strategis yang menghubungkan negara-negara di tiga benua sekaligus. Selat-selat di Timur Tengah menghubungkan Asia, Afrika dan Eropa sebagai jalur perdagangan minyak. Keberadaan Terusan Suez juga sangat penting untuk perdagangan karena menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania. Tanpa Terusan Suez seluruh pelayaran dari Eropa yang menuju Asia harus mengelilingi Afrika dengan jarak tempuh dua kali lebih jauh. Adanya hal-hal tersebut, menarik negara-negara adikuasa seperti AS untuk berusaha menguasai kawasan ini. Salah satunya adalah dengan intervensi kemanusiaan.

Untuk mengetahui adanya konsep hegemoni dibalik wacana intervensi kemanusiaan tersebut peneliti menggunakan pendekatan multidisipliner linguistik dan hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis teks pidato Presiden Obama di Sidang Umum PBB 24 September 2013 tentang visi misi baru AS terhadap Timur Tengah yang berisi wacana intervensi kemanusiaan. Analisis wacana kritis Norman Fairclough ini memiliki tiga level atau tiga dimensi analisis. Pertama analisis teks, kedua *discourse practice* dan ketiga *sociocultural practice*. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua dimensi saja yaitu analisis teks dan sosiokultural. Analisis teks Norman Fairclough dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis teks pidato Obama di Sidang Umum PBB tahun 2013 tersebut. Sementara itu, analisis sosiokultural di level berikutnya adalah untuk mengetahui dimensi sosial yang melatarbelakangi teks tersebut sekaligus

memeriksa temuan pada analisis teks sehingga keabsahan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Obama sebagai representasi AS mencoba memperbesar pengaruhnya untuk menghegemoni Timur Tengah dengan cara terlibat dalam resolusi konflik di hampir semua negara di kawasan ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa AS tidak hanya berusaha melibatkan diri terus menerus dalam konflik Suriah dengan menggagas pengiriman pasukan bersenjata tetapi juga dalam konflik Israel-Palestina dengan membentuk perundingan-perundingan dan kesepakatan pro Israel. Pembacaan pidato ini oleh Presiden Obama di Sidang Umum PBB 24 September 2013 juga ditujukan untuk mendapatkan dukungan internasional sebesar-besarnya untuk intervensi atas nama kemanusiaan tersebut.



## PRAKATA

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat-Nya sehingga peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini berjudul *Intervensi Kemanusiaan Amerika Serikat Di Timur Tengah (Analisis Wacana Kritis Pidato Obama Di Sidang Umum PBB 24 September 2013)* dimulai pada bulan Juni 2014 dan alhamdulillah dapat selesai pada bulan November 2015.

Skripsi ini tidak akan dapat dikerjakan dengan baik dan selesai dengan begitu komperhensif tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibunda Lastri, M.Pd dan Bapak Ali Rohman, S.Pd, atas do'a, cinta dan dukungan yang tak ternilai.
2. Drs. Himawan Bayu , MA. , Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Iqbal, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Harry Yuswandi, M.A selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
4. Drs. Agung Purwanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Drs. Supriyadi, M.Si selaku Pembantu Dekan III yang senantiasa memberi bimbingan dan dorongan selama peneliti menjadi mahasiswa.
5. Drs. Abu Bakar Eby Hara, M.A., Ph.D, Dr. Sugianto Kusuma, M.A., Ph.D, Bapak dan Ibu dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember secara umum yang telah mengajarkan ilmunya selama di perkuliahan.
6. Eirene Patty, S.Sos. & Ranu Rahman Akhtar serta semua sahabat-sahabatku di Sekolah Hak Asasi Manusia (SeHAMA VI) KontraS.
7. Teman-teman diskusi di *Bulek* dan Rumah Baca Tikungan; Irsyad Zaki & Hari Wibowo. Terimakasih, meski sangat sebentar tapi bermakna dan menentukan. Tanpa kalian saya tak mungkin tersesat dengan benar sejauh ini.

8. Zensa Hidayatul Rahman, S.I.P., Moh. Ichsan, S.Sos., Prayanti Calvin, S.Sos; teman-teman Presidium Nasional di Forum Komunikasi Mahasiswa HI se-Indonesia (FKMHII) 2012/2013. Adikku Nurlaili Laksmi Wulansari, Serta tak lupa kawan-kawan koordinator wilayah 6 (Jawa Timur - Bali) atas dukungannya selalu.
9. Teman-temanku di komunitas *Young Leaders Indonesia (YLI)* Jember-Bekasi.
10. Isabell Khunhen & Hannah Mu, my beloved German friends. *Kampf und Sieg!*
11. Mbak Titis, Bunda, mas Deta, Sheny Sheilina terimakasih telah menopangku di masa-masa sulit.
12. Ibu Har dan mas Ferdi di kantin yang selalu menjaga ketahanan pangan saya.
13. Kawan-kawanku di jurusan Hubungan Internasional angkatan 2010 Universitas Jember.
14. Serta pihak-pihak lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kajian ilmu hubungan internasional.

Jember, 23 Desember 2015

**Penulis**

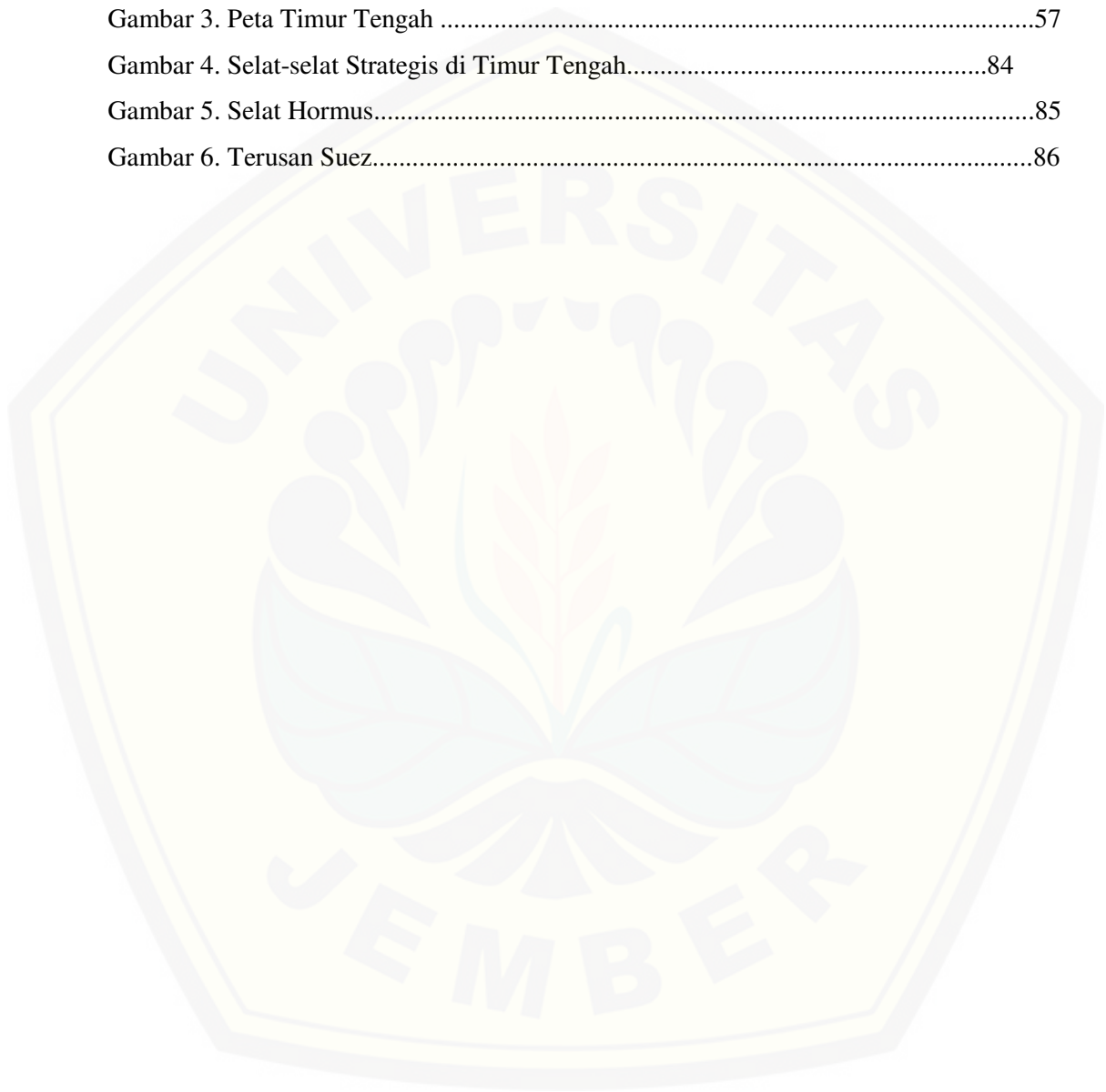
**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Kerangka Kerja Penelitian .....47



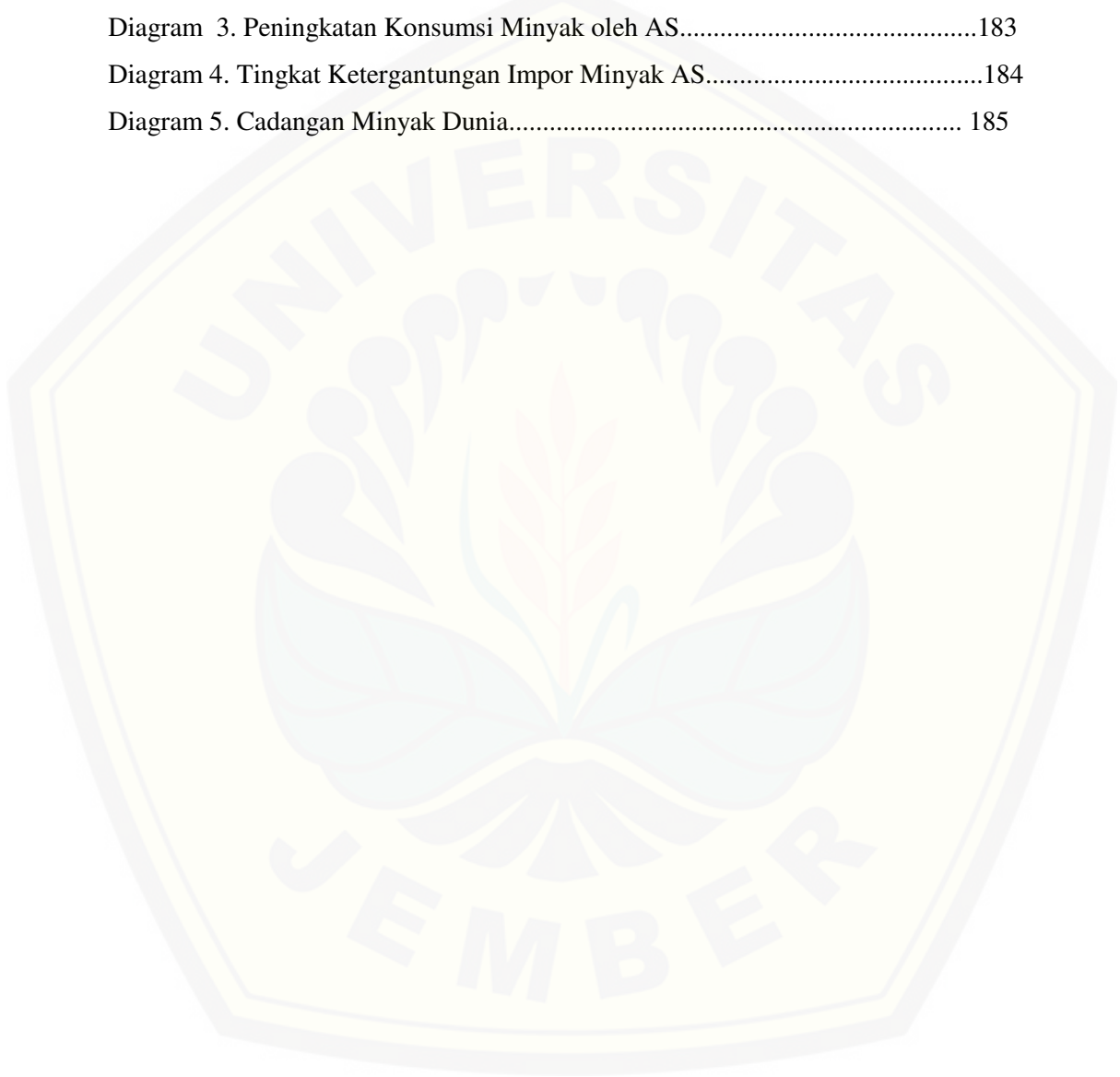
**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Dimensi Analisis Wacana Kritis <i>Norman Fairclough</i> .....	32
Gambar 2. Dimensi Analisis Wacana Kritis <i>Norman Fairclough</i> .....	87
Gambar 3. Peta Timur Tengah .....	57
Gambar 4. Selat-selat Strategis di Timur Tengah.....	84
Gambar 5. Selat Hormus.....	85
Gambar 6. Terusan Suez.....	86



**DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 1. Korban Langsung ( <i>Direct Death</i> ) Intervensi Kemanusiaan di Afghanistan, Irak dan Pakistan Tahun 2001-201.....	141
Diagram 2. Dukungan Publik Untuk Intervensi Militer AS ke Suriah.....	152
Diagram 3. Peningkatan Konsumsi Minyak oleh AS.....	183
Diagram 4. Tingkat Ketergantungan Impor Minyak AS.....	184
Diagram 5. Cadangan Minyak Dunia.....	185



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tiga Elemen Dasar Teks Dalam Model <i>Fairclough</i> .....	39
Tabel 2. Kerangka Analisis Penelitian.....	49
Tabel 3. Struktur Umum Pidato Obama di Sidang Umum PBB 2013.....	58
Tabel 4. Poling Pendapat Warga AS Mengenai Intervensi AS ke Irak.....	143
Tabel 3. Poling Dukungan Warga AS Untuk Intervensi ke Suriah.....	149
Tabel 4. Poling Berbagai Lembaga Mengenai Intervensi Kemanusiaan ke Suriah.....	150
Tabel 5. Poling <i>Pew Reserch</i> Terhadap 1000 Anggota Kongres AS Mengenai Serangan Udara ke Syiria.....	151

**DAFTAR LAMPIRAN**

Bagan 1. Pidato Obama di Sidang Umum PBB 24 September  
2013.....209



**DAFTAR SINGKATAN**

- AIPAC : American Israel Public Affairs Committee*
- CDA : Critical Discourse Analysis*
- CFR : The Council on Foreign Relations*
- DK : Dewan Keamanan*
- FIDH : International Federations for Human Rights*
- GA : General Assembly*
- HAM : Hak Asasi Manusia*
- IAEA : International Atomic Energy Agency*
- ICC : International Criminal Court*
- KTT : Konferensi Tingkat Tinggi*
- LRA : Lord's Resistance Army*
- NATO : North Atlantic Treaty Organization*
- NPT : Non-Proliferation Treaty*
- NSC : National Security Council*
- NTC : National Transitional Council*
- OPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries*
- PBB : Perserikatan Bangsa-bangsa*
- PLTN : Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir*
- R2P : Responsibility to Protect*
- UN : United Nations*
- WTO : World Trade Organization*



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Istilah *humanitarian* atau kemanusiaan dalam konsep *humanitarian intervention* merujuk pada upaya intervensi yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap warga suatu negara yang sedang mengalami bahaya atau menghadapi ancaman dari rezim negara tersebut.<sup>1</sup> Intervensi kemanusiaan menjadi kontroversial baik dalam ranah hukum internasional maupun hubungan internasional. Alasannya adalah tidak semua negara dapat menerima prinsip-prinsip dan definisi secara umum yang ada pada intervensi kemanusiaan tersebut.

Prinsip-prinsip intervensi kemanusiaan yang tidak semua negara dapat menerimanya ini, menurut pengamatan peneliti menjadi sebuah perdebatan yang relatif sengit selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir. Perdebatan tersebut, beberapa diantaranya dapat peneliti uraikan secara singkat. Seperti yang terjadi pada tahun 2001, Komis Internasional atas Intervensi dan Kedaulatan Negara (*International Commission on Intervention and State Sovereignty*) merilis sebuah laporan bertajuk "*The Responsibility To Protect*". Dalam laporan tersebut diajukan 34 rekomendasi mengenai rasionalitas tanggungjawab untuk melindungi suatu negara atas nama intervensi kemanusiaan.<sup>2</sup> C. A. J Coady (2002) kemudian mempersoalkan etika intervensi kemanusiaan yang mengerahkan kekuatan militer yang menyisakan paradoks terkait dengan legitimasi moral yang dijadikan standar oleh PBB dan kolaborasi internasional.<sup>3</sup>

Sedangkan J. L. Holzgrefe, Robert O. Keohane (2003) sejumlah dilema yang muncul terkait aspek etika, hukum dan politik intervensi kemanusiaan. Dilema-dilema yang timbul dalam intervensi kemanusiaan menurut Holzgrefe dan

---

<sup>1</sup> C. A. J. Coady. 2002. *The Ethics of Armed Humanitarian Intervention*. Peacework. No 45. Washington: United States Institute of Peace.

<sup>2</sup> ICISS (*International Commission on Intervention and State Sovereignty*) Report. 2001. *The Responsibility to Protect*. International Development Research Center. Ottawa: Cannada. <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>. Diakses 10 September 2014.

<sup>3</sup> C. A. J. Coady. *Loc. cit.*

Keohane kerap kali disebabkan oleh adanya perbedaan legitimasi sumber *moral concern* antara pertimbangan keadilan bagi warga negara yang “dilindungi” dengan pemahaman warga dunia atas “kebengisan tirani” negara yang diintervensi. Selain hal-hal tersebut juga karena disebabkan oleh adanya politik-politik intervensi kemanusiaan yang tidak *genuine* sepenuhnya untuk misi menyelamatkan umat manusia tetapi kemudian terindikasi adanya kepentingan terselubung (*hidden agenda*) seperti kepentingan terhadap penguasaan terhadap sumber minyak dibalik kolaborasi atau kerjasama internasional maupun pasukan PBB dalam menjalankan misi intervensi kemanusiaan tersebut.<sup>4</sup> Alan J Kuperman (2008) cenderung lebih kritis lagi, ia menyebutkan dan mempersoalkan adanya “kejahatan moral” dalam misi intervensi kemanusiaan yang ada dan yang pernah terjadi di Kosovo. Sehingga aktor-aktor internasional perlu belajar dari peristiwa tersebut.<sup>5</sup>

Intervensi kemanusiaan merupakan konsep yang relatif baru. Ian Hurd (2011) mempertanyakan apakah intervensi kemanusiaan legal di tengah peran hukum atas dunia yang makin membingungkan.<sup>6</sup> Kemudian dapat disimak juga bagaimana Jayne Discenza (2013) mengajukan tesis “Paradigma Baru Intervensi Kemanusiaan” sebagai bentuk evaluasi mendasar atas legalitas, legitimasi dan *moral concern*, tanggung jawab untuk melindungi umat manusia dari ancaman dan bahaya kekerasan oleh kekuasaan suatu Negara.<sup>7</sup> Referensi terbaru dapat pula ditemukan dalam pemikiran Chelsea O’Donnell<sup>8</sup> yang menguraikan perdebatan

---

<sup>4</sup> J. L. Holzgrefe, Robert O Keohane. 2003. *Humanitarian Intervention – Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. New York: Cambridge University Press. Hal 19-20.

<sup>5</sup> Alan. J. Kuperman. 2008. The Moral Hazard of Humanitarian Intervention: Lesson from the Balkans. *International Studies Quarterly: Volume 52*. Hal 92.

<sup>6</sup> Ian Hurd. 2011. *Is Humanitarian Intervention – Legal? The Rule of Law in an Incoherent World*.

<sup>7</sup> Jayne Discenza. 2013. *The Development of a New Paradigm of Humanitarian Intervention Assessing the Responsibility to Protect*. Dalam [http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=poli\\_honors](http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=poli_honors). Diakses 10 September 2014

<sup>8</sup> Chelsea O’ Donnell. 2014. The Development of the Responsibility to Protect: An Examination of the Debate Over the Legality of Humanitarian Intervention. *Duke Journal of Comparative & International Law. Vol 24. Hal 583-587*. Duke University School of Law. Dalam <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1409&context=djcil>. Diakses 10 September 2014.

atas “Perkembangan Tanggungjawab Melindungi” dengan melakukan sejumlah pengujian terhadap legalitas intervensi kemanusiaan.

Berkaitan dengan legalitas intervensi kemanusiaan, perkembangan tanggung jawab melindungi atau *Responsibility to Protect* (atau yang sering disingkat sebagai *RtoP* atau *R2P*). Prinsip moral inilah yang mendasari intervensi PBB ke suatu negara atau wilayah, yang kemudian dianggap secara sah melegitimasi intervensi tersebut.

Prinsip *Responsibility to Protect* menegaskan intervensi kemanusiaan ini. Prinsip *responsibility to protect* menegaskan bahwa suatu negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari kekerasan kemanusiaan. Apabila suatu negara gagal dalam menjalankan tanggung jawab melindungi kemanusiaan tersebut, maka komunitas internasional yang kemudian akan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Sementara itu, pada masa pengambil alihan tanggung jawab tersebut oleh komunitas internasional, masalah kedaulatan negara bersangkutan dapat ditangguhkan sementara.<sup>9</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya, *responsibility to protect* memiliki pengertian sebagai sebuah ‘tanggung jawab untuk melindungi’, sebuah prinsip di dalam hubungan internasional yang memiliki tujuan mencegah tindakan pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari empat kejahatan yang sudah disebutkan di atas. Selain itu, komunitas internasional juga memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam upaya menjalankan tugasnya melindungi rakyat tersebut. Prinsip ini didukung oleh komunitas internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB tahun 2005. Pada KTT tersebut, negara-negara di dunia berjanji untuk menjunjung prinsip *Responsibility to Protect* agar negara-negara di dunia tidak mengalami lagi

---

<sup>9</sup> Office of The Special Adviser On The Prevention Of Genocide. 2014. *Responsibility to Protect*. Dalam <http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml>. Diakses 10 April 2015.

tragedi kemanusiaan.<sup>10</sup> Mengenai dukungan terhadap *R2P*, tokoh-tokoh dunia ternyata juga mendorong prinsip ini. Koffi Annan adalah salah satu pendukung kuat prinsip *Responsibility to Protect* (atau yang sering disingkat sebagai *RtoP*). Ban-ki Moon yang kemudian menggantikannya sebagai Sekretaris Jenderal pada tahun 2007 juga merupakan pendukung kuat prinsip ini. Ban-ki Moon bahkan telah menyatakan bahwa tugas saat ini adalah mengubah *Responsibility to Protect* dari slogan menjadi tindakan (*from words to deeds*).

Dukungan terhadap *R2P* dari PBB bahkan tokoh-tokoh internasional yang begitu besar tersebut menunjukkan bahwa prinsip ini mempengaruhi pembentukan kebijakan intervensi kemanusiaan. Meskipun sebenarnya prinsip ini masih di ragukan oleh berbagai akademisi hubungan internasional, besarnya dukungan pada *R2P* tersebut pada akhirnya dapat melegitmasi *R2P* di dalam sistem internasional.

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat mengenai *responsibility to protect*. Perdebatannya adalah pada statusnya apakah merupakan ketentuan hukum atau bukan. Hakikatnya sampai sekarang *responsibility to protect* bukanlah suatu rumusan hukum, tapi merupakan suatu *concept, principle, evolving, trend, strong political commitment, emerging norm* atau *obligation with legal significance*.<sup>11</sup> Apa pun sebutannya, faktanya *responsibility to protect* saat ini telah disepakati dan diimplementasikan oleh PBB.

Prinsip ini pada awalnya muncul sebagai reaksi atas realitas internasional yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran berat HAM (*grass violation of human right*) yang semakin sering terjadi. Konsep ini berkembang sebagai respon atas kegagalan intervensi dalam menyelesaikan berbagai konflik kemanusiaan dan ketidakmampuannya menggalang dukungan internasional.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Responsibility to Protect*. Dalam [www.r2pasiapacific.org/docs/.../R2P basic info Bahasa](http://www.r2pasiapacific.org/docs/.../R2P_basic_info_Bahasa). Diakses 10 April 2015.

<sup>11</sup> Rahayu. Tanpa Tahun. *Eksistensi Prinsip 'Responsibility to Protect' Dalam Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4212/3838>. Diakses 10 April 2014.

<sup>12</sup> *Ibid*

Pelaksanaan dari *responsibility to protect* dalam praktik intervensi kemanusiaan dianggap menimbulkan bahaya tersendiri sebab terdapat keterlibatan masyarakat dunia di dalamnya. Beberapa ahli mengatakan bahwa beberapa negara masih menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan tidak menginginkan negaranya diintervensi. Beberapa negara pula masih meyakini bahwa mereka tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi ke negara lain karena prinsip kedaulatan itu.

Mengenai perdebatan tentang *R2P* dan potensinya dalam pelanggaran kedaulatan, John Stuart Mill juga menyatakan bahwa kewajiban moral tertinggi dari masyarakat dunia adalah untuk menghormati hak menentukan nasib sendiri. Mill menekankan pada pentingnya menjaga kedaulatan negara dan mencegah intervensi sebisa mungkin. Komunitas politik harus menghargai prinsip *self-government* dari suatu negara. *Self-government* adalah cara bagi negara-negara menyadari nilai-nilai kebebasan dan kebajikan. Pihak luar tidak boleh mengintervensi proses ini, sebab menurut Mill, adalah perjuangan yang sulit bagi suatu negara untuk dapat merdeka berdasarkan usaha mereka sendiri. Hanya dengan *self-government* kebajikan suatu negara akan muncul.<sup>13</sup>

PBB pada dasarnya juga mengatur mengenai kedaulatan negara tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Piagam PBB, Pasal 1 ayat (2) tentang Tujuan PBB.

*To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal right and self determination of people, and to take other appropriate measure to strengthen universal peace.*<sup>14</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) juga disebutkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Hal ini berarti bahwa tidak dibenarkan adanya tekanan dari suatu negara terhadap negara lain sebab semua negara adalah berdaulat dan intervensi adalah pelanggaran terhadap kedaulatan teritorial.

Pandangan mengenai syarat sah intervensi ini juga dianggap sesuai dengan Pasal ke 2 ayat (4) bahwa negara harus menahan diri untuk mengintervensi negara lain.

---

<sup>13</sup> Jennifer M. Welsh. 2004. *Humanitarian Intervention and International Relations*. Oxford: Oxford University Press. Hal 60.

<sup>14</sup> The United Nations. 1945. *The Charter of United Nations & Statute Of The International Court Of Justice*. San Fracisco. Hal 3.

*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purpose of The United Nations.*<sup>15</sup>

Sementara itu terdapat pandangan lain bahwa sebuah intervensi bisa dilakukan jika memenuhi syarat kualifikasi dari intervensi kemanusiaan. Pertama, intervensi dilakukan karena adanya darurat kemanusiaan. Kedua, penggunaan senjata menjadi pilihan paling terakhir dalam suatu intervensi. Ketiga, memenuhi syarat proporsionalitas dan harus ada probabilitas yang tinggi akan keberhasilan dalam penggunaan kekuatan senjata terhadap kemanusiaan, yaitu berupa implikasi positif terhadap kemanusiaan itu sendiri.<sup>16</sup>

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam artikel 39 dari Piagam PBB yang kemudian membuat pentingnya menjaga kedaulatan negara lain menjadi samar karena adanya prioritas keamanan internasional.

*The security council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace, and security.*<sup>17</sup>

Berkaitan dengan implementasi *R to P* sampai saat ini masih berkembang persepsi di kalangan negara-negara berkembang bahwa adanya konsep ini memberikan peluang pada pihak asing mengambil alih tanggung jawab suatu negara dalam melindungi warga negara. Kekhawatiran yang muncul adalah manipulasi dan politisasi yang dilakukan oleh negara-negara besar untuk melegalkan tindakan intervensi yang dilakukannya tersebut. Inilah salah satu tantangan yang cukup berat untuk menyamakan persepsi di antara anggota masyarakat internasional bahwa untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia harus dipahami bahwa *national authority is manifestly failing to protect*. Hal ini harus berdasar standar nilai dan ukuran yang universal tanpa politisasi pihak manapun.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Nicholas J. Wheeler. Op. Cit. Hal 33.

<sup>17</sup> The United Nations. *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> Rahayu. *Loc. Cit*

Berkaitan dengan hal tersebut, adanya sejumlah perdebatan dalam hal mempersoalkan legitimasi, legalitas, etis sampai moralitas intervensi kemanusiaan, pada hakikatnya membuka ruang diskusi yang menarik untuk kemudian diteliti lebih mendalam. Hal tersebut juga menjadi tolak ukur yang penting yang mendorong penelitian ini untuk dilakukan. Peneliti mencermati beberapa referensi dan menemukan bahwa umumnya perdebatan mengenai intervensi kemanusiaan tersebut mempersoalkan pondasi argumentasi Amerika Serikat yang cenderung secara klasik berperilaku sebagai polisi dunia yang keras mendesak PBB dan sekutu bahkan organisasi internasional untuk mengesahkan misi intervensi kemanusiaan di negara manapun yang mereka inginkan.<sup>19</sup> Salah satu contoh intervensi yang dianggap ilegal bahkan menurut hukum internasional adalah intervensi yang dilakukan terhadap Kosovo. Meskipun begitu Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Irak Utara dan Somalia juga intervensi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) di Kosovo semuanya telah disebut sebagai intervensi kemanusiaan.<sup>20</sup>

PBB sebagai organisasi internasional seringkali dianggap memiliki kewajiban khusus mengatasi masalah internasional maupun internal negara-negara yang dampaknya menyebar luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa, nama ini dibentuk oleh Presiden AS F. D. Roosevelt dan digunakan pertama kali pada *Declaration by United Nations* pada 1 Januari 1942. Saat itu selama Perang Dunia II ketika perwakilan 26 negara berjanji bahwa negara mereka akan terus berjuang melawan kekuatan Axis.<sup>21</sup>

Intervensi kemanusiaan dan legitimasi Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri telah diperdebatkan selama periode yang sangat panjang dalam studi hubungan internasional. Legalitas doktrin intervensi kemanusiaan berbenturan dengan adanya standar kedaulatan negarayang berasal baik dari hukum adat dan Piagam

---

<sup>19</sup> IRIB (Iran Indonesia Radio). 2014. *Rusia Kritik Pernyataan Obama di PBB*. Dalam <http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/85687-rusia-kritik-pernyataan-obama-di-pbb>. Diakses 8 Januari 2015.

<sup>20</sup> Anne Ryniker. June: 2001. "The ICRC's position on Humanitarian Intervention". *IRRC journal*. Vol 83. No. 842.

<sup>21</sup> United Nation. *The United Nations Today*. 2008. New York: United Nations Department of Public Information. Hal3.

PBB. Intervensi kemanusiaan dalam prakteknya juga dianggap bertentangan dengan prinsip non-intervensi yang tidak mengizinkan segala bentuk campur tangan di ranah domestik suatu negara.<sup>22</sup> Berkaitan dengan hal itu, intervensi bersenjata maupun ancaman terhadap kedaulatan dan kemerdekaan negara lain juga terhadap sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya negara lain merupakan suatu pelanggaran dalam hukum internasional. Tidak satupun negara diperbolehkan menggunakan atau menganjurkan dengan alasan ekonomi dan politik atau dengan langkah-langkah lain dalam rangka memaksa dan mengganggu kedaulatan dan kemerdekaan negara lain.<sup>23</sup> Selain itu tidak satupun negara diperbolehkan mengorganisir, membantu menggerakkan, membiayai, menghasut, atau mentoleransi terhadap hal-hal subversif, gerakan terorisme, ataupun aktivitas militer yang dapat membuat kekacauan dan kekerasan di negara lain atau mengintervensi dengan membantu suatu gerakan perlawanan rakyat sipil di negara lain.<sup>24</sup>

*Humanitarian intervention* lahir dari globalisasi. Sebagian pihak mengatakan bahwa globalisasi secara inheren bersifat positif (atau setidaknya netral). Namun kenyataan yang dapat kita saksikan sehari-hari menunjukkan sebaliknya, globalisasi dalam bentuknya yang dominan saat ini justru telah dan terus menimbulkan ketimpangan sosial.<sup>25</sup> Contoh ketimpangan ini tampak pada kesenjangan antara kelompok kaya atau pemilik modal dengan yang miskin atau buruh. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Globalisasi yang dominan ini bernama globalisasi kapitalis, ditandai oleh kemunculan sebuah perekonomian global yang dimotori logika ekonomi kapitalis dengan satu tujuan tertinggi: profit bagi pemilik modal.<sup>26</sup>

*Humanitarian intervention* sebagai tindakan untuk menciptakan perdamaian masih berada di wilayah perdebatan. Sementara itu *humanitarian intervention*

---

<sup>22</sup> UN Publication, UN Yearbook. 1970. Hal 784.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Leslie Sklair. 2002. *Critical Globalizations Studies*. Dalam Richard P. Applebaum & William Robinson (eds). 2005. London: Routledge. Hal 130.

<sup>26</sup> *Ibid*



sendiri sebagai sebuah doktrin yurisdiksi universal<sup>27</sup> dan penjelmaan kolonialismeterus direproduksi menjadi suatu gagasan moral di dunia internasional menjadi legitimasi negara untuk melakukan perluasan pengaruh politik terhadap negara lain. *Intervensi humanitarian* ini dipopulerkan oleh Hugo Grotius, tetapi banyak yang meragukan apakah hak semacam ini benar-benar ada.<sup>28</sup> Doktrin ini sering disalahgunakan oleh negara-negara kuat untuk melakukan hegemoni.

Di era globalisasi ini, *humanitarian intervention* sebagai sebuah gagasan yang lahir dari modernitas telah diklaim sebagai sebuah kebenaran. Meskipun wacana intervensi kemanusiaan tersebut bukanlah sesuatu yang baru sebab ia telah mengalami perkembangan yaitu sejak berakhirnya Perang Dingin. Hal ini diiringi dengan meningkatnya praktik intervensi kemanusiaan dari tahun ke tahun sejak tahun 1991 hingga tahun 2000.<sup>29</sup>

Munculnya aktor-aktor yang turut menyebarkan *humanitarian intervention* baik dari aktor pemerintahan sendiri atau berbagai kalangan seperti akademisi dan seniman semakin menyebarkan doktrin *humanitarian intervention* tersebut. Salah satunya adalah Angelina Jolie, aktris yang direkrut untuk menjadi duta PBB

---

<sup>27</sup> Doktrin yurisdiksi universal menegaskan bahwa Negara-negara dapat dan berhak mengadili suatu kejahatan internasional meskipun hal itu melanggar kedaulatan negara lain. Yurisdiksi universal memberikan kekuatan kepada suatu Negara untuk mengadili pelaku kejahatan walaupun dilakukan di luar batas Negara dan pelaku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Negara bersangkutan. Rasionalitas dibalik pelaksanaan yurisdiksi universal ini adalah dikarenakan tidak ada negara yang mampu melakukan yurisdiksinya atas pelaku sehingga yang ada kemudian hanyalah kepentingan masyarakat internasional. Jadi, negara-negara pelaksanayuridiksi universal menganggap dirinya sebagai wakil dari masyarakat internasional. Lihat Jon B. Jordan. "Universal Jurisdiction in a Dangerous World: A Weapon for All nations Against International Crime". Dalam *Detroit College of Law Journal of International Law 1*, Spring, 2000, Michigan State University. Hal 5. Dalam International Judicial Monitor. 2007. *Universal Jurisdiction*. American Society of International Law & the International Judicial Academy. Vol 2. [http://www.judicialmonitor.org/archive\\_1007/generalprinciples.html](http://www.judicialmonitor.org/archive_1007/generalprinciples.html). Diakses 12 Januari 2015.

<sup>28</sup> Rhona K. M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Hal 33.

<sup>29</sup> Sir Adam Roberts. *The United Nations and Humanitarian Intervention*. Dalam Jennifer M. Welsch. 2004. *Humanitarian Intervention and International Relation*. New York: Oxford University Press. Hal 162.

sebagai 'juru bicara *humanitarian intervention*' dan anggota dari CFR<sup>30</sup> memberi pernyataan mengenai konflik di Suriah.

*"I think Syria has gotten to a point, sadly, where some form of, certainly, where some sort of intervention is absolutely necessary. It's so disheartening, it's so sad, it's so upsetting, it's so horrible, what's happening...at this time we just must stop the civilians being slaughtered...when you see that sort of mass violence and murder on the streets we must do something. And I know that the countries in the region are pushing as well, so I feel that this is a good global effort, but then there are these countries that are choosing not to intervene and I don't feel, I feel very strongly that the use of a veto when you have financial interests in a country should be questioned, and the use of a veto against a humanitarian intervention should be questioned."*<sup>31</sup>

Pernyataan tersebut disampaikan Jolie di suatu kesempatan *interview* di tahun 2012 pada saluran televisi Al Jazeera. Ia mengeluhkan ketidakaktifan komunitas internasional mengenai Suriah. Dalam wawancaranya tersebut, ia menyatakan dukungannya untuk pemberlakuan *humanitarian intervention* bahkan mendorong Rusia dan Cina untuk menggunakan hak veto mereka untuk mendukung tujuan baik dari misi kemanusiaan internasional tersebut.<sup>32</sup>

Beberapa pihak percaya bahwa legitimasi moral sudah cukup untuk menjadi justifikasi penyelamatan isu kemanusiaan melalui intervensi. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan terjadinya paradoks. *Humanitarian intervention* dianggap tidak lebih sebagai alat untuk melakukan hegemoni negara barat ke kawasan Timur Tengah. Intervensi kemanusiaan oleh beberapa pihak dianggap menjadi legitimasi upaya hegemoni oleh *superpower*, yang tidak lain adalah Amerika Serikat.

Sejak Perang Dingin berakhir, *humanitarian intervention* sebagai retorika kemanusiaan terus berlangsung. Akan tetapi mayoritas anggota PBB memiliki kecurigaan tinggi terhadap doktrin intervensi tersebut. Sejak 1960, negara bekas

<sup>30</sup> *The Council on Foreign Relations (CFR)* atau Dewan Hubungan Luar Negeri adalah sebuah organisasi keanggotaan non-partisan independen, *think tank*, dan penerbit. Anggota CFR, termasuk Brian Williams, Fareed Zakaria, Chuck Hagel, dan Erin Burnett, menjelaskan mengapa Dewan Hubungan Luar Negeri adalah sumber daya yang sangat diperlukan dalam dunia yang kompleks. Dalam <http://www.cfr.org/about/>. Diakses 12 September 2014.

<sup>31</sup> Recite Al Jazeera. 2012. <http://www.youtube.com/watch?v=i-C9Ko8LgA>. Diakses 12 September 2014.

<sup>32</sup> *Ibid.*

jajahan tidak mentolerir intervensi karena dianggap sebagai penjelmaan kolonialisme. *Humanitarian intervention* dianggap sebagai kolonialisme bentuk baru.

Wacana *humanitarian intervention* dikuasai dan didominasi oleh kekuatan besar. AS sebagai negara *superpower* merupakan aktor dari penyebaran intervensi kemanusiaan ini. AS sebagai negara adikuasa memenerasi batas-batas negara berdaulat. Kekuasaan AS bersandar pada apa yang disebut Susan Strange sebagai “kekuasaan struktural” dalam keuangan global. Hal ini didasarkan pada dollar AS sebagai mata uang dunia utama, dominasi pasar finansial Amerika, dan kendali AS terhadap IMF dan pengaruhnya dalam institusi-institusi ekonomi lainnya, terutama Bank Dunia dan WTO (*World Trade Organization*).<sup>33</sup>

Eksistensi imperium AS sebagai kekuatan terbesar erat kaitannya dengan *humanitarian intervention* yang ada saat ini. Timur Tengah sebagai sebuah kawasan kaya minyak menjadi kawasan paling bergejolak karena dipengaruhi oleh kekuatan AS tersebut. Intervensi negara adikuasa meningkat di tahun 2000 khususnya di Timur Tengah. Rezim Khadafi di Libya mendapat sanksi dari PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1973 pada tanggal 18 Maret 2011, yang menghasilkan intervensi militer oleh pasukan koalisi Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada dan Italia. Resolusi tersebut menetapkan zona larangan terbang di atas wilayah Libya dan mengizinkan negara-negara anggota untuk mengambil *semua langkah yang diperlukan* dalam melindungi penduduk sipil dari serangan pasukan pro Khadafi. Serangan di bawah nama *Operation Odyssey Dawn*<sup>34</sup> tersebut yang menggunakan kekuatan senjata Pasukan Koalisi dikomandani Amerika Serikat dan kemudian beralih ke NATO ini mengejutkan masyarakat internasional.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Operasi *Odyssey Dawn* adalah nama dan kode dari sebuah operasi militer internasional Amerika di Libya menegakkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Dilakukan selama periode awal dari tanggal 19 hingga 31 Maret 2011 yang berlanjut setelah sebelumnya dilakukan di bawah komando NATO sebagai *Operasi Unified Protector*. Operasi ini diawali dengan menerapkan zona larangan terbang yang diusulkan selama Perang Sipil Libya untuk mencegah pasukan pendukung Qadafi melakukan penyerangan terhadap pasukan anti Qadafi. Lihat Jim Garamon. 2011. *Coalition Launches 'Operation Odyssey Dawn'*. Washington: American Forces Press Service. Dalam <http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=63225>. Diakses 12 September 2014.

Keterlibatan Amerika dan sekutunya yang tergabung dalam NATO memegang peranan sangat penting dalam intervensi ini karena berlanjut dengan adanya invasi NATO terhadap Libya yang menggunakan kekuatan militer. Keterlibatan AS dan sekutu dalam intervensi kemanusiaan dan konflik di Libya dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan Presiden Amerika, Barack Obama:

*“Dalam waktu satu bulan, Amerika telah bekerja sama dengan rekan internasional untuk memobilisasi koalisi, serta menjalankan mandat untuk melindungi warga sipil. Kami berhasil mencegah pembantaian dan menghentikan militer Libya yang kekuatannya terus bertambah besar serta menerapkan zona larangan terbang terhadap Libya bersama dengan para sekutu. Saya tidak memiliki pilihan lain selain mengambil tindakan atas pasukan Qaddafi di saat mereka membombardir Benghazi. Kota tersebut bisa saja dihadapkan pada pembantaian yang meluas ke wilayah lain dan telah menodai hati nurani”<sup>35</sup>.*

Sementara itu Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen, menyatakan sebagai berikut :

*“When the United Nations took the historic decision to protect you, NATO answered the call. We launched our operation faster than ever before. More than 8000 servicemen and women took part in our mission for Libya. We were effective, flexible and precise”<sup>36</sup>.*

Praktik wacana intervensi yang disebut-sebut untuk kemanusiaan masyarakat Timur Tengah seringkali malah menjadi ajang bagi AS untuk melakukan pendudukan wilayah selama beberapa tahun. AS menguasai proyek-proyek besar rekonstruksi Irak pasca-perang dan menikmati distribusi minyak mentah murah. Ironisnya setelah intervensi, konflik internal bahkan perang saudara di negara yang telah mengalami intervensi kemanusiaan juga tidak mereda.

Lebih lanjut mengenai hegemoni AS di Timur Tengah, di tahun 2013 Presiden Obama memperkenalkan visi baru AS terhadap Timur Tengah melalui pidatonya di PBB. Obama berpidato di depan Majelis Umum PBB pada 24

<sup>35</sup> Barack Obama. 2011. *Pidato Kenegaraan Presiden Amerika Serikat Barack Obama Mengenai Libya*. Disampaikan di *National Defense University Washington DC*. Dalam <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/wh29032011.html>. Diakses 12 September 2014.

<sup>36</sup> NATO. 2011. *“We answered the call” – the end of Operation Unified Protector*. Dalam [http://www.nato.int/cps/en/natohq/news\\_80435.htm](http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_80435.htm). Diakses 12 September 2014.

September 2013. Pidato Obama dalam kesempatan itu disebut-sebut sebagai politik luar negeri Obama yang paling signifikan dari kebijakannya selama menjabat sebagai presiden.

*“Let me take this opportunity to outline what has been the US policy toward the Middle East and North Africa, and what will be my policy during the remainder of my presidency....”<sup>37</sup>*

Dalam pidato tersebut, Obama menyatakan bahwa visi baru Amerika Serikat kedepan adalah fokus pada perkembangan nuklir Iran dan konflik Israel-Palestina. Diharapkan bahwa dengan terselesaikannya konflik tersebut akan turut memberi efek positif terhadap keseluruhan negara di Timur Tengah. Akan tetapi pada kenyataannya *Arab Spring*<sup>38</sup> dan konflik Israel-Palestina adalah hal yang sama sekali berbeda. Hal ini turut mengundang banyak kritik.

*President Obama stated that “America’s diplomatic efforts will focus on two particular issues: Iran’s pursuit of nuclear weapons and the Arab- Israeli conflict...a major source of instability. Resolving them can help serve as a foundation for a broader peace.... Real breakthroughs on Iran’s nuclear program and Israeli-Palestinian peace would have a profound and positive impact on the entire Middle East and North Africa....”<sup>39</sup>*

Dalam pernyataan Obama tersebut ia menghimbau kepada negara-negara di dunia untuk bergabung mendukung intervensi kemanusiaan yang dikomandani oleh AS khususnya di Timur Tengah. Banyak pernyataan di dalam pidato Obama pada kesempatan itu juga memiliki arti yang cenderung bermakna hegemonik. Obama sedang melakukan upaya penyebaran doktrin intervensi kemanusiaan untuk menjadi doktrin internasional untuk kemudian diterima oleh negara-negara di seluruh dunia. Berangkat dari asumsi awal ini, penelitian ini memandang penting untuk mengetahui makna-makna di balik wacana intervensi kemanusiaan baik sebagai doktrin internasional maupun kecenderungan adanya makna

---

<sup>37</sup> Yoram Etinger. 2013. *President Obama’s US Speech – New or Old Middle East?*. Dalam <http://www.aim.org/guest-column/president-obamas-un-speech-new-or-old-middle-east/>. Diakses 14 September 2014.

<sup>38</sup> *Arab Spring* adalah gelombang protes oleh pro-demokrasi dan pemberontak yang terjadi di Timur Tengah dimula pada tahun 2010 dan 2011. Protes ini menantang beberapa rezim otoriter yang ada di kawasan tersebut. Lihat Ensiklopedia Britanika. 2013. *Arab Spring*. Dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1784922/Arab-Spring>. Diakses 8 Januari 2014.

<sup>39</sup> *Ibid*

hegemonik di balik misi intervensi kemanusiaan di Timur Tengah khususnya apabila mencermati pidato Presiden Obama di depan Sidang Umum PBB tersebut.

Lebih lanjut mengenai penelitian ini, berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis mengenai wacana *humanitarian intervention*. Pidato Obama di depan *General Assembly* tahun 2013 mengenai visi baru AS di Timur Tengah tersebut akan menjadi sumber data utama yang akan dianalisis lebih mendalam melalui penelitian ini. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) dengan perangkat analisis dari Norman Fairclough.

Lebih jelas dan lengkapnya akan dijabarkan oleh penulis pada bab-bab berikutnya. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka penelitian ini penulis beri judul:

Intervensi Kemanusiaan Amerika Serikat Di Timur Tengah (Analisis Wacana Kritis Pidato Obama Di Sidang Umum PBB 24 September 2013).

## **1.2. Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam melakukan penelitian, pembatasan ruang lingkup pembahasan menjadi sangat penting karena akan memberi fokus penulis. Tujuannya yang lain adalah agar pembahasan sesuai dengan perangkat analisis dan teori yang digunakan. Diharapkan nantinya skripsi ini dapat lebih mudah dipahami. Batasan yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu batasan masalah atau lebih sering disebut sebagai batasan materi dan batasan rentang waktu penelitian.

### **1.2.1. Batasan Materi**

Permasalahan adanya pelanggaran atas hak asasi manusia kerap menjadi pertimbangan utama adanya misi intervensi kemanusiaan. Atas nama kepentingan untuk tanggung jawab melindungi umat manusia, Amerika Serikat sering kali gencar mendorong dan mempromosikan intervensi kemanusiaan kepada negara-negara di dunia termasuk pula melalui PBB agar membentuk dan melegitimasi misi intervensi kemanusiaan sebagai doktrin internasional. Salah satu langkah utama dan penting bagi Amerika Serikat terkait intervensi internasional sebagai doktrin

internasional tersebut antara lain dapat dijumpai dalam Pidato Presiden Barrack Obama di hadapan Sidang Umum PBB pada 24 September 2013. Pidato tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dikritisi lebih mendalam mengingat menurut hemat peneliti terdapat banyak pernyataan Obama yang dapat bermakna sebagai wacana hegemonik atas nama intervensi kemanusiaan.

Lebih lanjut berhubungan dengan batasan materi penelitian yang juga seringkali disebut sebagai batasan masalah, maka dalam penelitian ini lebih difokuskan pada upaya menelusuri makna-makna wacana hegemoni Amerika Serikat melalui *humanitarian intervention* sebagaimana yang terdapat dalam pidato Barrack Obama tersebut. Sementara unit analisis dalam penelitian ini adalah teks pidato Obama. Teks tersebut akan ditelaah lebih mendalam dengan perangkat Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terutama pada unit teks wacana pidato (*discourse text*) dan pada konteks sosiokultur (*socioculture discourse*).

### **1.2.2. Batasan Waktu**

Batasan waktu berupa rentang tahun data utama penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah penelitian ini adalah tahun 2005 hingga 2014. Sementara itu Pidato Obama sebagai data primer dalam penelitian ini dibacakan di Sidang Umum PBB pada 24 September tahun 2013. Oleh karena itu, peneliti mengambil rentang waktu penelitian dari tahun 2005 sampai dengan 2014. Sedangkan data referensi pendukung (data sekunder) lebih fleksibel rentang waktunya selama benar-benar berupa data yang relevan dan signifikan dengan tujuan serta permasalahan penelitian ini.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi batasan materi penelitian tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah:

Bagaimana AS melegitimasi praktik-praktik hegemoninya melalui wacana *humanitarian intervention* dalam pidato Presiden Obama di Sidang Umum PBB 24 September 2013?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif selalu memiliki tujuan tertentu. Dalam penelitian kualitatif menurut Creswell istilah tujuan penelitian adalah *purpose statement*.

“A purpose statement is a statement that advance the overall direction of focus for the study”.<sup>40</sup> Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana Amerika Serikat menggunakan wacana *humanitarian intervention* dalam pidato Presiden Obama di sidang umum PBB 24 September 2013 untuk melakukan praktik hegemoni ke dalam kawasan negara di Timur Tengah.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi dunia akademis dan praktis. Penjabaran mengenai manfaat secara akademik dan praktis tersebut dijabarkan oleh peneliti di bawah ini:

##### 1.5.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sekaligus memperdalam pembahasan tentang studi intervensi kemanusiaan dan praktik hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah melalui penerapan metodologi penelitian *Critical Discourse Analysis (CDA)*.

##### 1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi *input* bagi komunitas hubungan internasional bahwa substansi pidato Presiden Obama selaku kepala negara AS terkait isu intervensi kemanusiaan khususnya yang cenderung bernuansa hegemonik.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya mengamati, menerima, dan menyerap pesan-pesan yang terkandung dalam pidato Presiden AS dalam mewacanakan misi intervensi kemanusiaan. Hal ini sangat penting sebab terkait dengan kedaulatan dan HAM negara lain.

---

<sup>40</sup> John, W. Creswell. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Second Edition. London and New Delhi: SAGE Publications. Hal 15.



## 1.6. Landasan Teori

### 1.6.1 *Humanitarian Intervention*

Intervensi telah sejak lama dijustifikasi oleh realis, sosialis dan liberal. Kaum realis, sosialis dan liberal tersebut memiliki tujuan yang berbeda mengenai intervensi. Perang bagi kaum realis adalah cara untuk memperoleh keseimbangan kekuasaan tersebut. Oleh sebab itu, intervensi baik melalui tindakan koersif atau non-koersif menurut realis keduanya dapat dibenarkan. Hal yang terpenting adalah keseimbangan kekuasaan. Sementara itu kaum sosialis seperti Marx tidak memilih intervensi untuk digunakan dalam mengkampanyekan paham sosialisme. Akan tetapi Lenin dan Stalin mengatakan bahwa peran revolusi secara internasional merupakan alat yang penting. Intervensi dalam upaya perluasan paham sosialisme dianggap penting sebab juga untuk mempertahankan negara komunis (Uni Soviet).<sup>41</sup> Lenin dan Stalin menetapkan kebijakan intervensi yang sebenarnya kontradiktif, yaitu untuk memperlemah kekuatan kapitalisme terhadap negara sosialis yang masif. Intervensi tersebut dilakukan terhadap politik domestik suatu negara. Setelah Perang Dunia II, Uni Soviet memperoleh kekuasaan yang sangat besar. Intervensi menjadi suatu kebijakan yang kemudian dimasukkan ke dalam Doktrin Brezhnev<sup>42</sup>. Sebagaimana yang dikatakan oleh Marxis bahwa para kelas pekerja tidak dapat menempatkan dirinya ke dalam suatu kekuatan politik, maka pengikut Leninisme dan Stalinisme mengambil tindakan bahwa untuk para kelas pekerja semua kemudian tergabung dalam satu partai, yaitu Partai Komunis.<sup>43</sup>

Sementara itu, kaum liberal yang setuju dengan intervensi berpendapat bahwa apabila intervensi sangat diperlukan maka ia bisa saja

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Doktrin Brezhnev adalah Doktrin ini diumumkan untuk menjustifikasi [invansi Soviet ke Cekoslowakia](#) pada Agustus 1968 yang mengakhiri pergerakan [Musim Semi Praha](#) dan intervensi-intervensi militer Soviet sebelumnya, seperti [invansi Hongaria tahun 1956](#). Intervensi-intervensi tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri upaya liberalisasi dan pemberontakan yang berpotensi mengancam hegemoni Soviet di [Blok Timur](#). Lihat Doktrin Brezhnev dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin\\_Brezhnev](http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin_Brezhnev). Diakses

<sup>43</sup> Michael W. Dayle. *Op. Cit.* Hal 394.

dilakukan dengan adanya persetujuan internasional. Persetujuan tersebut ditujukan dengan tetap memperhatikan kedaulatan suatu negara. Kaum liberal yang mendukung intervensi ini sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Pertama kaum kosmopolitan kiri yang mendukung intervensi dalam sekup internasional yang ditujukan untuk memerangi pemerintahan korup juga tidak demokratis. Kedua kosmopolitan kanan yang mendukung upaya penggulingan pemerintah pro komunis. Kedua kaum kosmopolitan ini berada pada era Perang Dingin.<sup>44</sup>

Pada abad ke-19 muncul alasan baru untuk intervensi yang didasarkan pada kemanusiaan (*humanity*). Intervensi kemanusiaan yang muncul ini kemudian menghasilkan teori yang didasarkan pada politik liberal dan konsep dasar hak-hak asasi manusia. Pada perkembangannya di abad ke-19 praktik-praktik negara menunjukkan bertambahnya alasan pada perlunya dilakukan intervensi yang didasarkan pada alasan kemanusiaan tersebut, akan tetapi pada praktiknya seringkali tersamar adanya intervensi untuk kepentingan ekonomi, politik atau alasan lain.<sup>45</sup>

Secara umum istilah *humanitarian* atau kemanusiaan dalam *humanitarian intervention* menggambarkan upaya intervensi bertujuan memberikan bantuan terhadap individu yang sedang mengalami bahaya. Secara singkat intervensi kemanusiaan dimaknai sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik kemanusiaan di suatu wilayah yang di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga harus dicampuri oleh negara lain.

Intervensi kemanusiaan kemudian menjadi pembahasan yang kontroversial dalam hukum internasional dan hubungan internasional. Hal ini disebabkan oleh tidak semua negara menerima prinsip dan definisi secara umum yang ada dari intervensi kemanusiaan tersebut. Salah satu definisi dari intervensi kemanusiaan yang ada adalah:

---

<sup>44</sup> Joseph S. Nye. 1996. *Understanding International Conflict*. Harvard University: Longman. Hal. 136

<sup>45</sup> *Ibid*

*“the theory of intervention on the ground of humanity (...) reconizes the right of one State to exercise international control over the acts of another in regard to its internal sovereignty when contrary to the laws of humanity.”<sup>46</sup>*

Dalam intervensi kemanusiaan, suatu Negara dikatakan berhak untuk melakukan kontrol internasional melalui tindakan yang diambil terhadap negara lain bahkan dalam lingkup kedaulatan internalnya ketika bertentangan dengan hukum kemanusiaan. Dalam definisi intervensi kemanusiaan yang lain, tindakan koersif oleh Negara-negara menggunakan senjata yang berlaku di Negara lain dengan atau tanpa persetujuan pemerintahan yang ada adalah dibenarkan<sup>47</sup>.

Sementara itu Fernando R Teson memberikan definisi sebagai berikut:

*“..the proportionate international use or threat of military force, undertaken in principle by a liberal government or alliance, aimed at ending tyranny or anarchy, welcomed by the victims, and consistent with the doctrine of double effect”<sup>48</sup>*

Meskipun definisi-definisi tersebut tidak identik, akan tetapi keseluruhan definisi mengungkapkan secara jelas mengenai intervensi kemanusiaan yang selama ini ada. Secara umum dari definisi tersebut, pertama adanya kecenderungan penggunaan kekuatan senjata dan kedua terdapat pembenaran untuk penggunaan kekuatan senjata tergantung pada pelanggaran hak asasi manusia di negara yang menjadi target. Operasi PBB di Irak Utara juga telah disebut sebagai intervensi kemanusiaan.<sup>49</sup>

Menurut Jennifer M. Welsh. Ia mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai intervensi<sup>50</sup> koersif dalam urusan internal negara, yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata dengan tujuan

<sup>46</sup> Francis Kofi Abiew. 1999. *The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention*. Kluwer Law International. Hal 31

<sup>47</sup> Anonim. 1999. *Humanitarian Intervention, Legal & Politic Aspect*. Copenhagen: Danish Institute of International Affairs. Hal 11.

<sup>48</sup> Fernando R. Teson. 2001. *The Liberal Case for Humanitarian Intervention*. *Public Law & Legal Theory*. No 39. Florida State University: Collage of Law. Hal 3.

<sup>49</sup> Anne Ryniker. June: 2001. The ICRC's position on "Humanitarian Intervention". *IRRC Journal*, Vol 83. No 842.

<sup>50</sup> Interferensi berarti ganggana atau campur tangan. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/interferensi>.

menangani pelanggaran hak asasi manusia dalam skala masif serta mencegah kekerasan dan penderitaan berkembang secara luas<sup>51</sup>. Dalam *Black's Law dictionary* dikemukakan mengenai arti konsep intervensi dan intervensi kemanusiaan.

*“Intervention is one nation’s interference by force, or threat of force, in another nation’s internal affairs or in question arising between other nation. Humanitarian intervention is an intervention by the international community to curb abuses of human rights within a country, even if the intervention infringes the country’s sovereignty.”*<sup>52</sup>

Sementara itu Anthony Lang mendefinisikan apa itu intervensi kemanusiaan dalam pengertian yang berbeda dan kontras. Ia menyatakan bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai term Intervensi kemanusiaan, dimana definisi yang ada selalu mengandung asumsi yang normatif.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini, konsep *humanitarian intervention* digunakan untuk mengkaji kembali wacana *humanitarian intervention* AS ke Timur Tengah. Peneliti lebih dulu akan membahas mengenai intervensi kemanusiaan ini dengan berbagai aspeknya seperti mandat intervensi dan tanggung jawab moral dalam intervensi yang digunakan AS baru kemudian masuk pada analisis teks dan upaya penemuan konsep hegemoni di balik wacana kemanusiaan ini.

## 1.6.2. Teori Hegemoni Gramsci

Hegemoni dipahami sebagai suatu kekuasaan atas suatu kelas sosial terhadap kelas sosial yang lainnya yang terwujud dalam suatu penindasan. Hegemoni didefinisikan sebagai dominasi kelompok terhadap kelompok lain dengan atau tanpa ancaman kekerasan sehingga ide-ide yang ditekankan oleh

---

<sup>51</sup> Jennifer M. Welsh. 2004. *Humanitarian Intervention and International Relations*. Oxford University Press: New York Time.

<sup>52</sup> Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary* (Eight Edition). St Paul: West, a Thomson Business. Hal 840.

<sup>53</sup> Aidar Hehin. 2010. *Humanitarian Intervention: An Introduction*. Palgrave Macmillan: China. Hal 11.

kelompok dominasi diterima sebagai suatu yang wajar dan tidak mengekang pikiran.<sup>54</sup>

Istilah hegemoni sebenarnya bukan temuan Gramsci. Istilah ini digunakan pertama kali oleh Plekhanov dan para pengikut Marxis di Rusia lainnya pada tahun 1880-an untuk membangun aliansi dengan petani dengan tujuan menumbangkan gerakan Tsarisme. Gagasan tentang hegemoni ini lebih jauh dikembangkan oleh Lenin yang menjadikannya sebagai strategi revolusi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan para anggotanya untuk memperoleh dukungan mayoritas. Ciri khas dari hegemoni ala Gramsci sendiri adalah dia menambahkan dimensi baru di dalamnya dengan memperluas pengertian sehingga mencakup peran kelas kapitalis beserta para anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan yang telah diperoleh.<sup>55</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat dua pengertian hegemoni yang berbeda, yaitu pengertian hegemoni dari Marxis ortodoks dan dari Gramsci. Hegemoni menurut Marxis adalah dominasi yang menekankan adanya represif dari negara atau masyarakat kelas. Sementara Gramsci memberi konsep berbeda dari Marxis dalam memberi pengertian hegemoni, yang sebelumnya ia anggap kasar dan ortodoks sebagai “dominasi kelas”. Gramsci memberi pengertian hegemoni sebagai konsep “kepemimpinan moral”. Hegemoni versi Gramsci mengandung isu-isu pokok dalam studi kultural, contohnya pluralisme, multikultural dan budaya marginal.<sup>56</sup>

*“Many more or less subtle forms of dominance seem to be so persistent that they seem natural until they begin to be challenged, as was/is the case for male dominance over women, White over Black, rich over poor. If the minds of the dominated can be influenced in such a way that they accept dominance, and act in the*

---

<sup>54</sup> Dominic Strinati. 1995. *An Introduction to Theories of Popular Culture*. London Routledge. Hal 154.

<sup>55</sup> Roger Simon. 2004 *Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press. Hal 20-21.

<sup>56</sup> Antonio Gramsci. 1971. *Selection from The Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart. Hal 57.

*interest of the powerful out of their own free will, we use the term hegemony.” (Gramsci, 1971; Hall et al., 1977)<sup>57</sup>*

Gramsci memberikan perluasan terhadap karakter hegemoni realis. Realis hanya menekankan hegemoni pada *coercion* atau paksaan oleh orang yang memerintah (*government*), kemudian Gramsci memperluas menjadi *consent*. Tatanan hegemonik menurut Gramsci adalah kondisi dimana hubungan antar kelas dan antara negara dengan masyarakat sipil dicirikan adanya persetujuan.<sup>58</sup> Hegemoni Gramsci menekankan kesadaran moral. Kelompok yang akan didominasi justru disadarkan lebih dulu akan tujuan hegemoni tersebut setelah itu ia tidak merasa dihegemoni lagi. Kelompok atau orang yang berusaha dikuasai tidak akan merasa dihegemoni lagi dan kemudian justru dengan sadar melakukan hal tersebut, yaitu tujuan dari hegemoni dengan suka rela.

Teori hegemoni oleh Gramsci digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana aktor-aktor internasional dari negara adikuasa menggunakan wacana *humanitarian internasional* untuk kepentingan yang sebenarnya politis daripada untuk kemanusiaan itu sendiri. Secara khusus berkaitan dengan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Obama sebagai representasi AS dan negara adikuasa menggunakan wacana intervensi kemanusiaan dalam pidatonya di Sidang Umum PBB 24 September 2013.

### **1.6.3 Critical Theory**

Pembacaan manusia dari segala belenggu penghisapan dan penindasan berangkat dari paradigma kritis. Oleh karena itu proyek utama paradigma kritis ini berupa pembebasan nilai dominasi dan kelompok tertindas. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana paradigma kritis mencoba membedah realitas melalui penelitian ilmiah, termasuk di dalamnya penelitian.

---

<sup>57</sup> Teun. A. Van Dijk. 1993. *Discourse & Societies; Princiles of Critical Discourse Analysis, Critical Power & Dominance*. London, Newbury Park & New Delhi: SAGE Publication. Vol 4(2). Hal 255.

<sup>58</sup> Stephen Gill (ed). 1993. *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*. Cambridge University Press. Hal 93.

Ada beberapa karakteristik utama dalam seluruh filsafat pengetahuan paradigma kritis yang bisa dilihat secara jelas:<sup>59</sup> *Pertama*, ciri paradigma kritis tentang realitas adalah semu. Realitas adalah sesuatu yang tidak alami tapi dibentuk oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam pandangan kritis realitas tidak berada dalam harmoni tetapi konflik dan pergulatan sosial. *Kedua*, tujuan penelitian kritis adalah sikap memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi dan penguatan sosial. Dengan demikian tujuan kritis adalah mengubah dunia yang tidak seimbang. Dengan demikian seorang peneliti yang menggunakan paradigma kritis akan mungkin sangat terlibat dalam proses negasi relasi sosial yang nyata, membongkar mitos, menunjukkan bagaimana seharusnya dunia berada. *Ketiga*, pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitian. Kritis menekankan penafsiran peneliti pada apa yang diteliti. Hal ini berarti ada proses dialogal dalam seluruh penelitian kritis. Dialog kritis digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang dan akan terjadi.

Teori kritis adalah teori yang memungkinkan kita membaca produksi budaya dan komunikasi dalam perseptif yang luas dan beragam. Teori kritis dapat ditujukan untuk mengeksplorasi secara reflektif pengalaman alami manusia, juga mempelajari bagaimana manusia mendefinisikan diri berkaitan dengan budaya. Hal ini juga berkaitan dengan usaha memahami teks, objek dan manusia. Teori kritis mempertanyakan legitimasi anggapan umum umum tentang pengalaman, pengetahuan, dan kebenaran. Teori kritis menggunakan ide dari bidang lain untuk memahami pola-pola teks dan cara berinteraksi. Hal ini memunculkan modal pembacaan baru sebagai bagian dari ciri khas teori kritis.

Bagi pendukung teori kritis, pengetahuan tidak akan pernah dapat menjadi netral, baik secara moral, politis maupun ideologis. Oleh karena itu pengetahuan mengandung kecenderungan, baik disadari maupun tidak untuk

---

<sup>59</sup> Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta. LKIS. Hal 46.

berpihak kepada kepentingan, nilai, kelompok, partai, kelas, atau bangsa tertentu.

Di dalam studi HI, *critical theory* tidak membatasi diri pada kajian mengenai negara-negara dan sistem negara, melainkan memfokuskan diri pada kekuasaan dan dominasi di dunia secara umum. Para pemikir *criticaltheory* mencari pengetahuan untuk tujuan politis: membebaskan kemanusiaan dari struktur-struktur politik dan ekonomi dunia yang menindas yang dikendalikan oleh penguasa-penguasa hegemonik. Pemikir kritis berupaya menyingkap dominasi global kaum hegemonik tersebut.

*Critical theory* juga menegaskan pentingnya upaya menghilangkan adanya penindasan sosial yang ada di masyarakat. Seperti yang diungkapkan Hebermas bahwa salah satu dari tiga kebutuhan dan tujuan manusia yang membentuk pengetahuan adalah kepentingan emansipatoris yang berupaya mengidentifikasi dan menghilangkan kekangan dan penindasan sosial.<sup>60</sup>

*Critical theory* mempertanyakan asal mula dan legitimasi dari institusi-institusi sosial dan politik. Ia mencoba menentukan elemen apa saja yang bersifat universal dalam tatanan dunia dan yang berubah-ubah secara historis. Dunia sosial adalah konstruksi ruang dan waktu. Oleh karena itu, sistem internasional yang ada saat ini juga dianggap sebagai hasil konstruksi spesifik dari negara-negara yang paling berkuasa.<sup>61</sup>

Sementara itu penggunaan teori kritis sebagai kerangka konsep dan teori adalah untuk menjelaskan bagaimana *humanitarian intervention* sebagai doktrin moral internasional muncul dan bagaimana ia digunakan dalam sistem dunia saat ini. *Critical theory* digunakan untuk mengkritisi bagaimana wacana intervensi kemanusiaan tersebut digunakan sebagai legitimasi kaum hegemonik AS dan sekutu di Timur Tengah.

---

<sup>60</sup> Steve Smith. (Tanpa Tahun). Positivism and Beyond. Dalam Ken Booth dan Marysia Zelewski (eds). 1994. *International Theory: Positivism and Beyond*. Cambridge University Press. Hal 279-280.

<sup>61</sup> *Ibid.* Hal 23.



## 1.7. Paradigma Penelitian

Paradigma memiliki pengertian sebagai suatu kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana suatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi.<sup>62</sup>

Bila mengambil simplikatif, menurut Srantakos terdapat dua paradigma besar yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu tentang manusia, yaitu paradigma positivistik serta interpretif. Sarantakos juga menyebut lagi satu paradigma, yakni kritikal, yang menyusul berkembang dan memberikan banyak masukan bagi ilmu pengetahuan<sup>63</sup>.

Sementara itu Deniz dan Lincoln menggolongkannya paradigma ke dalam empat (sub) paradigma. *Pertama*, positivis dan post-positivis. *Kedua* konstruktivis-interpretif. *Ketiga* kritis (marxist, emansipatoris); dan *Keempat* feminis-poststruktural. Keempat paradigma ini mengembangkan pemahaman yang kompleks dan tidak dapat secara tegas dan kaku dipisah-pisahkan dalam tingkat fenomena konkret di lapangan.<sup>64</sup>

Penelitian ini sendiri menggunakan paradigma kritis. Paradigma ini meyakini bahwa manusia dihadapkan pada berbagai kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam kegiatannya manusia dihadapkan pada berbagai kondisi sosial-ekonomi politik yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan menempatkan individu satu dan yang lain, kelompok satu dan yang lain dalam posisi berbeda-beda.<sup>65</sup>

Dengan paradigma ini peneliti akan mengungkap dan menginterpretasi apa yang direpresentasikan dalam Pidato Presiden Obama yang di dalamnya terkandung wacana pesan yang merepresentasikan adanya praktik wacana hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengan melalui misi intervensi kemanusiaan.

---

<sup>62</sup> Bogdan dan Biklen Dalam Lexy J. Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 49.

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Kristi Poerwandari. 2011. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Cetakan keempat. Depok: LPSP3 UI. Hal 21.

<sup>65</sup> *Ibid*. Hal 23

### 1.8. Jenis Penelitian

Metode penelitian terbagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Oleh Creswell<sup>66</sup>, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk dapat memahami masalah sosial atau masalah yang didasarkan pada penciptaan gambaran holistik dan lengkap yang dibentuk dengan kata-kata. Melalui kata-kata tersebut informan melaporkan pandangannya secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sebuah proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan berbagai pertanyaan juga prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, lalu menganalisis data secara induktif. Analisis induktif ini dimulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang lebih umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel<sup>67</sup>. Penelitian kualitatif ditujukan pula untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu organisasi atau peristiwa yang spesifik. Hal tersebut untuk menampilkan secara eksplisit struktur, tatanan, atau pola umum yang ditemukan di dalam sekelompok partisipan<sup>68</sup>.

Bodgan dan Taylor mengatakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>69</sup> Metode kualitatif ini lebih menitikberatkan pada upaya pemahaman juga deskripsi. Data dapat berupa percakapan, dokumen pribadi, catatan dari pengamatan terhadap perilaku atau proses-proses sosiokultural masyarakat tertentu, dan narasi diorama sebuah candi,

---

<sup>66</sup> John W. Creswell. *Loc., Cit.*

<sup>67</sup> John W. Creswell. 2002. *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Terjemahan III/IV). Jakarta: KIK Press. Hal 5.

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong. *Op. Cit.* 1990. Hal 3.

data ini kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.<sup>70</sup>

Penelitian ini sendiri termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Contoh data yang diolah adalah seperti transkrip wawancara, pidato resmi kenegaraan, catatan lapangan, gambar dan foto serta rekaman video.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini adalah Pidato Obama di Sidang Umum PBB 24 September 2014 sebagai data primer dan jurnal, buku, serta laporan hasil riset sebagai data sekunder. Data sekunder yang banyak tersebut digunakan sebab penelitian dengan metode kualitatif juga bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam mungkin melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman atau kualitas data bukan hanya kuantitas data.<sup>72</sup>

Dalam penelitian *humanitarian intervention* ke Timur Tengah ini, digunakan metode analisis wacana kritis yang juga merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertumpu pada kekuatan narasi.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan kompleksitas realitas dibalik *humanitarian intervention* ke Timur Tengah yang mengandung konsep hegemoni AS. Penelitian kualitatif yang juga disebut sebagai metode interpretatif karena data penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data<sup>74</sup>. Oleh karena itu jenis penelitian ini sangat cocok untuk menganalisis Pidato Obama di Sidang Umum PBB 24 September 2013 tentang intervensi kemanusiaan ke Timur Tengah.

## 1.9. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor, deskriptif adalah salah satu dari ciri penelitian kualitatif. Data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan suara yang memberikan

<sup>70</sup> Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. LKIS. Jogjakarta. Hal.49

<sup>71</sup> Kristi Poerwandari. *Op Cit.* Hal. 42-43.

<sup>72</sup> Rachmat Kriyantono. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 56-57

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Jogjakarta: Alfabeta. Hal. 8

ilustrasi secara rinci mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian.<sup>75</sup> Penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala dalam masyarakat tertentu.<sup>76</sup> Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data-data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, pidato resmi kenegaraan, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, atau memo, serta dokumen resmi lainnya. Peneliti kemudian menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Selain itu, yang juga penting adalah peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu telah memang demikian adanya.<sup>77</sup>

Penelitian ini analisis diterapkan pada naskah Pidato Presiden Barack Obama di Sidang Umum PBB 24 September 2013. Peneliti sejak awal tidak memandang bahwa teks Pidato Obama tersebut demikian adanya, melainkan memiliki interpretasi-interpretasi yang berhubungan dengan konsep dan upaya hegemoni AS. Analisis terhadap data tersebut yang juga melibatkan data sekunder berupa jurnal, buku laporan, pada akhirnya akan menghasilkan sifat penelitian deskriptif. Hal ini sesuai dengan sifat deskriptif yang menjadi ciri dari penelitian kualitatif.

## **1.10. Objek Penelitian**

Objek Penelitian ini menggunakan teks naskah Pidato Presiden Barack Obama di hadapan Sidang Umum PBB pada 24 September 2013 yang merepresentasikan adanya praktik wacana hegemoni Amerika Serikat terkait intervensi kemanusiaan di Timur Tengah.

## **1.11. Data Penelitian**

### **1.11.1. Data Primer**

Sumber data penelitian ini berasal dari dua jenis data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama

---

<sup>75</sup> Vito Prasetya. 2011. *Analisis Citra Lembaga legislatif Pada Televisi*. Jakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi Al Azhar Indonesia.

<sup>76</sup> Sukandarumidi. 2004. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal.104

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong. *Op. Cit.* 1990. Hal 11.

penelitian yang sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh teks baik yang berupa kutipan kata-kata, frasa, dan kalimat dalam naskah Pidato Presiden Barack Obama yang dibacakan di hadapan Sidang Umum PBB pada 24 September 2013. Naskah pidato tersebut dapat dibaca di bagian lampiran dalam penelitian ini.

### 1.11.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>78</sup>. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah beragam. Data tersebut diantaranya merupakan hasil observasi yang diperoleh dari informasi atau pemberitaan media serta laporan resmi, baik yang berasal dari kajian pustaka, jurnal, dan dokumen digital dari internet. Tentunya data-data tersebut masih berkaitan erat dengan konteks tujuan penelitian ini.

### 1.12. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>79</sup>

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data triangulasi dalam penelitian ini. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang ada. Ketika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai metode pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Lexy J. Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-18. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 62

<sup>79</sup> Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan ke-11. Bandung: Alfabeta. Hal 224

<sup>80</sup> *Ibid.* Hal 241

Kemudian dalam peneliti menggabungkan dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Analisis ini diberlakukan untuk teks (naskah pidato) dengan menggunakan kajian pustaka atau literatur. Kajian literatur bisa disebut juga studi dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, berita di surat kabar, artikel majalah, foto-foto atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>81</sup>. Peneliti juga mencari bahan dan data dengan mempelajari buku-buku serta sumber intrnet yang tentunya relevan dengan tema penelitian ini.

Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan sebagai *library research*, yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Literatur tersebut berupa buku, jurnal, dokumen, serta artikel. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari berbagai tempat diantaranya:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
- b. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
- c. Internet
- d. Buku-buku pribadi peneliti

Ada empat tahap yang dilakukan dalam penelitian ini. *Pertama*, tahap pengumpulan data. Data yang diambil dalam penelitian kali ini adalah transkrip pidato Obama di Sidang Umum PBB yang dikeluarkan oleh Gedung Putih. Tahap *kedua* yaitu analisis data terpilih dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough dan teori hegemoni Gramsci. *Ketiga* mendeskripsikan temuan dari hasil analisis, lalu *keempat* menyimpulkan temuan-temuan yang ada.

## 1.13. Metode Penelitian

### 1.13.1. Analisis Wacana Kritis(Critical Discourse Analysis) Norman Fairclough

*Critical Discourse Anlysis (CDA)* atau Analisis Wacana Kritis sebagai sebuah metode penelitian memang banyak diterapkan dalam disiplin

---

<sup>81</sup> Dedy Mulyana. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Hal 195.

ilmu linguistik maupun ilmu Komunikasi. Meskipun begitu, studi Hubungan Internasional (HI) merupakan bidang ilmu yang multidisipliner, sehingga sangat dimungkinkan mengadopsi atau mendapat kontribusi ranah ilmunya dari disiplin ilmu lainnya. Penerapan metode Analisis Wacana Kritis ke dalam penelitian HI, khususnya dalam penelitian ini, justru akan menambah kekayaan dan keabsahan hasil penelitian. Hal tersebut dapat tercapai tentunya selama pelaksanaan prosedur metodologinya dilakukan dengan benar dan memenuhi ketentuan yang lazim digunakan.

Permasalahan-permasalahan di masyarakat yang ada saat ini sangatlah kompleks jika dilihat hanya dari satu persepektif. Analisis wacana adalah metode yang menjembatani sejumlah ilmu sosial yang secara teoritis terus diperdebatkan. Wacana dapat berarti komunikasi atau perdebatan tertulis maupun lisan dan diskusi atau perdebatan formal.<sup>82</sup>

Sementara itu *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau analisis wacana kritis menjadi salah satu pendekatan dalam menganalisis wacana. Suatu pendekatan yang multidisipliner, mengkaji dominasi sosial dan politik diproduksi melalui teks dan pembicaraan (*text and talk*).<sup>83</sup>

Penelitian ini menggunakan CDA berdasar pendekatan Norman Fairclough. Ia berpendapat bahwa dalam analisis ini seorang peneliti melihat teks sebagai hal yang memiliki konteks. Memahami wacana teks, peneliti tidak dapat melepaskan konteksnya. Untuk menemukan realitas di balik teks diperlukan pengkajian lebih lanjut atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks. Hal tersebut karena teks tidak dapat dilepaskan dari kepentingan yang sebenarnya bersifat subjektif.

*“The first principle is that CDA addresses social problems. CDA not only focuses on language and language use, but also on the linguistic characteristics of social and cultural processes. CDA follows a*

---

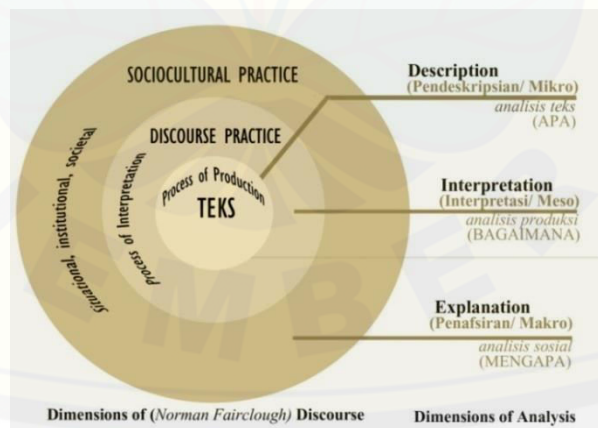
<sup>82</sup> Oxford Dictionary. *Discourse*. Dalam <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/discourse>. Diakses 10 Oktober 2014.

<sup>83</sup> Allan Luke. Tanpa tahun. *Theory and Practice in Critical Discourse Analysis*. <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/ed270/Luke/SAHA6.html>. Diakses 10 Oktober 2014.

*critical approach to social problems in its endeavours to make explicit power relationships which are frequently hidden. It aims to derive results which are of practical relevance to the social, cultural, political and even economic contexts”.*<sup>84</sup>

*“The approach I have adopted is based upon a three dimensional conception of discourse, and correspondingly a three-dimensional method of discourse analysis. Discourse and any specific instance of discursive practice, is seen simultaneously. (i) text (ii) discourse practice (text production and text interpretation) (iii) sociocultural practice.”*<sup>85</sup>

Dimensi pertama dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough ialah dimensi analisis teks. Dimensi analisis teks meliputi bentuk-bentuk tradisional analisis linguistik-kosakata, tata bahasa kalimat dan unit yang lebih kecil, sistem suara (fonologi) dan sistem tulisan. Dimensi kedua adalah dimensi kewacanaan (*discourse practice*). Dalam analisis dimensi ini penafsiran dilakukan terhadap pemrosesan teks yang meliputi aspek proses penghasilan teks, penyebaran dan penggunaan tesk tersebut. Dimensi ketiga adalah analisis praktik sosial budaya. Sering disebut sebagai analisis di tingkat makro, didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar sesungguhnya mempengaruhi teks yang ada. Sementara itu terdapat tiga dimensi dalam CDA yang diungkapkan oleh Fairclough.



Gambar 1. Dimensi Wacana Norman Fairclough

Sumber: Diolah dari data dalam skripsi ini

<sup>84</sup> Anonim.. Tanpa Tahun. *Critical Discourse Analysis, Intertextuality and The Present Study*. Dalam <http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/1701/5/05chapter4.pdf>. Diakses 10 Oktober 2014.

<sup>85</sup> Norman Fairclough. 2013. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Routledge. Hal 133.



Konsekuensi penelitian yang menggunakan paradigma kritis adalah dilakukannya multi-level analisis untuk menemukan wacana laten/tersembunyi yang dipresentasikan media (*dalam konteks penelitian ini, media yang dimaksud adalah naskah pidato Presiden Barack Obama*) dibalik teks yang dibuatnya. Dalam penelitian ini maksud tersebut dipenuhi dengan cara menggunakan CDA. Dalam CDA dikenal tiga level analisis, yaitu: pada level teks (*text analysis*) yang hasilnya adalah suatu deskripsi mengenai isi teks; pada level proses dibuatnya teks (*processing analysis*) yang hasilnya berguna untuk melakukan penafsiran atas teks; dan pada level sosial (*social analysis*) yang berisikan kajian mengenai keadaan sosial yang memengaruhi proses pembuatan teks guna menjelaskan lahirnya sebuah teks.<sup>86</sup> Sementara itu penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dimensi pertama dan kedua, yaitu analisis teks dan analisis praktik sosial budaya (*sociocultural practice*) dari Pidato Barack Obama tersebut.

Fairclough menyatakan bahwa praktik sosial memiliki berbagai orientasi, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi, dan sebagainya. Teks merupakan gambaran dari masalah tersebut. Dengan demikian, analisis dimensi praktik sosial merujuk kepada usaha menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan orientasi yang ada seperti yang telah dijelaskan, seperti berkaitan dengan nilai, ideologi, budaya, dan lain-lain yang terdapat dalam teks.

Analisis wacana kritis pendekatan Fairclough dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis *humanitarian intervention* sebagai gagasan yang berkembang dan diterima secara luas sebagai doktrin internasional. Menganalisis bagaimana wacana tentang *humanitarian intervention* terus diproduksi dan berevolusi dari waktu-ke waktu sejak berakhirnya perang dingin dalam tatanan dunia globalisasi saat ini. Penelitian ini menempatkan proses produksi relasi kekuasaan dominan dalam doktrin humanitarian

---

<sup>86</sup> Eduardus Dosi. 2012. *Media Masa Dalam Jaring Kekuasaan; Sebuah Studi tentang Relasi Kekuasaan di Balik Wacana*. Flores: Ledalero. Hal 126

intervention dalam konteks historis yang menunjukkan terjadinya hegemoni pada praktik intervensi oleh negara Adikuasa yaitu AS.

Analisis wacana kritis memperhatikan hubungan partisipan di dalam suatu penggunaan teks. Menurut Fairclough terdapat setidaknya tiga partisipan utama dalam suatu media: *pertama*, penutur (yang menulis teks), yang berfungsi sebagai orang pertama. *Kedua*, khalayak (pembaca atau pendengar), yang berfungsi sebagai orang kedua. *Ketiga*, partisipan publik (politikus, pemerintah, ahli dan tokoh masyarakat lainnya), sebagai orang ketiga.<sup>87</sup>

Pada penelitian ini, pilihan posisi relasi akan berkisar antara penutur pidato, yaitu presiden Amerika dengan bantuan tim penulis pidato dari kantor kepresidenan Gedung Putih-AS saat mengkomunikasikan kebijakan baru luar negeri Amerika terhadap Timur Tengah. Identitas dan relasi tempat teks tersebut dikomunikasikan menjadi pertimbangan dalam proses analisis terlebih bila hal tersebut dielaborasi lebih lanjut dalam teks sebagaimana terdapat dalam kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

Metode analisis wacana kritis memang diadopsi dari disiplin Linguistik karena akan digunakan untuk mengurai bagaimana teks (pidato Presiden Obama) itu mewacanakan misi intervensi kemanusiaan. Hal yang menarik dalam konteks studi hubungan internasional adalah perangkat Fairclough juga menjelaskan mengenai tataran makro yaitu konteks wacana sosiokultural yang menyertai teks itu sendiri. Dalam penelitian ini konteks wacana sosiokultural tentunya juga menyertai pidato seorang Presiden Amerika Serikat. Peneliti meyakini, dalam teks tersebut berkaitan dengan dimensi sosiokulturalnya, sarat terkandung dinamika kontekstual kepentingan-kepentingan tertentu lainnya. Kepentingan tersebut dapat berdimensi ekonomi, politik bahkan bisa juga bermakna ideologis.

Jadi, penelitian ini sesungguhnya bukanlah penelitian linguistik, melainkan tetap merupakan penelitian ranah hubungan internasional karena hendak mempersoalkan perdebatan dinamika praktik hegemoni di balik

<sup>87</sup>

Norman Fairclough. 1989. *Language & Power*. Longman: New York.

wacana intervensi kemanusiaan. Fokusnya lebih kepada wacana sosiokultur secara kontekstual meskipun tetap secara prosedur metodologi mengharuskan peneliti untuk menganalisis wacana tekstualnya (dalam hal ini pidato Presiden Obama selaku kepala negara AS).

Secara teoritis, analisis wacana kontemporer sebagai pendekatan dan alat analisis terhadap representasi media lebih canggih dibandingkan pendekatan isi. Aspek-aspek isi seperti kata-kata dan aspek lainnya dapat dikodekan dan dihitung, tetapi struktur wacana yang kompleks pun dapat dianalisa pada berbagai tataran diskripsi. Pendekatan analisis wacana dapat berfungsi sebagai pernyataan (*assertion*), pertanyaan (*question*), tuduhan (*accusation*), atau ancaman (*threat*). Wacana juga bisa digunakan untuk mendiskriminasi atau mempersuasi orang lain untuk melakukan diskriminasi.<sup>88</sup>

Menurut Eriyanto (2001), pendekatan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/ CDA*), wacana disini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis disini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Tidak menggambarkan dari aspek kebahasaan semata, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks dalam hal ini bermakna bahasa tersebut dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu.

Selanjutnya Eriyanto juga menjelaskan bahwa analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda. Yang membingungkan, label “analisis wacana kritis” digunakan dengan dua cara yang berbeda: Norman Fairclough menggunakannya untuk menguraikan pendekatan yang telah dia kembangkan dan sebagai label yang

---

<sup>88</sup> Teun A. Van Dijk. 1999. Representasi Media: Rasisme Baru Dalam Pemberitaan. Dalam Sandira Kartika & Mahendra (eds). *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman Wacana Multikultur Dalam Media*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Hal 8-9.

diberikan kepada gerakan lebih luas dalam analisis wacana yang beberapa pendekatannya, termasuk pendekatan yang dikemukakan Fairclough.

Fairclough memberikan penjelasan mengenai analisis wacana kritis bahwa pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan adalah sebagai bentuk dari praktik sosial yang ada. Lebih lanjut menggambarkan bahwa wacana adalah sebagai praktik sosial yang menyebabkan sebuah hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, dan struktur sosial yang membentuknya. Karakteristik yang sangat penting dari analisis wacana kritis adalah tindakan, konteks, kekuasaan, dan ideologi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai analisis wacana kritis akan dibahas di halaman berikut. Selain mengolah dari buku Analisis Wacana Kritis Noman Faiclough, pembahasan ini juga disajikan dari hasil pembacaan pada buku Analisis Wacana Eriyanto.

#### **1.13.1.1. Tindakan**

Prinsip pertama mengenai wacana adalah wacana dipahami sebagai tindakan (*action*). Prinsip ini akan memberikan pemahaman bahwa wacana diasosiasikan sebagai bentuk dari sebuah interaksi. Pemahaman ini akan memberikan konsekuensi bahwa wacana kritis harus dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi, dapat pula bertujuan untuk mendebat, membujuk, menyanggah, atau sekedar reaksi. Wacana kemudian harus dipandang sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang berada di luar kendali atau diekspresikan secara tidak sadar.<sup>89</sup>

#### **1.13.1.2. Konteks**

Wacana mempertimbangkan konteks keseluruhan wacana; latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada konteks tertentu. Mengikuti Guy Cook, analisis wacana juga memeriksa konteks komunikasi; siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa

dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasiapa; melalui media apa; bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk setiap masing-masing pihak.

Terdapat tiga hal yang sentral dalam pengertian analisis wacana, yaitu teks, konteks, dan wacana. Teks merupakan semua bentuk bahasa, bukan hanya kalimat di atas kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi seperti ucapan, gambar, efek suara, bahkan musik. Konteks termasuk di dalamnya situasi dan hal yang berbeda di luar teks yang juga mempengaruhi pemakain bahasanya. Seperti situasi dimana teks tersebut diproduksi, juga fungsi yang dimaksudkan dari teks tersebut. Wacana berarti memaknai teks dan konteks secara bersamaan. Sedangkan titik perhatian analisis dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks bersamaan sebagai suatu proses komunikasi. Wacana kritis mendefinisikn teks dan percakapan pada situasi sosial tertentu. Oleh sebab itu, wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasarinya.

### **1.13.1.3. Historis**

Masih terdapat hubungan dengan konteks, wacana ditempatkan dalam konteks sosial tertentu berarti wacana ditulis dalam suatu konteks tertentu. Sebab wacana tanpa konteks tidak dapat dimengerti. Salah satu aspek penting untuk dapat mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam *konteks historis* tertentu pula. Maka diperlukan suatu tinjauan dalam melakukan analisis. Hal ini agar dapat dimengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan dalam suatu cara tertentu. Begitu pula dengan pilihan bahasa yang digunakan.<sup>90</sup>

### **1.13.1.4. Kekuasaan**

Analisi wacana kritis (*critical discourse analysis*) mempertimbangkan kekuasaan sebagai bagian dari elemen. Wacana

---

<sup>90</sup>

*Ibid*

dalam bentuk teks, percakapan, pidato dan lain-lain tidak dipandang sebagai sesuatu yang alami juga wajar. Terdapat kemungkinan tidak netral.

Sementara itu pemakai bahasa di dalam analisis ini bukan hanya pembicara tetapi juga penulis, pendengar, atau pembaca. Masing-masing merupakan bagian dari anggota kategori sosial tertentu. Ia dapat merupakan bagian dari kelompok profesional, agama, dan komunitas tertentu. Oleh karena itu, mengimplikasikan bahwa analisis wacana kritis tidak membatasi dirinya pada detil teks atau struktur wacana saja, tetapi juga menghubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu.

#### **1.13.1.5. Ideologi**

Ideologi juga menjadi elemen sangat penting dalam analisis wacana kritis. Hal ini disebabkan teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu.

Teori klasik berkaitan dengan ideologi mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan. Hal ini untuk melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strateginya adalah dengan memberikan kesadaran kepada publik bahwa dominasi diterima secara *taken for granted*. Menurut Van Dijk, yang juga seorang ahli dalam analisis wacana terdapat fenomena yang disebut sebagai kesadaran palsu, yaitu bagaimana kelompok dominan memanipulasi ideologi kepada kelompok lain melalui kampanye yang menyatakan bahwa agama tertentu yang menyebabkan suatu kerusuhan, kulit hitam yang terkesan anarkis, dan lainnya misalnya. Semua dilakukan melalui media.<sup>91</sup>

Jadi, analisis wacana kritis tidak hanya memandang arti sebuah bahasa, teks, atau wacana begitu saja atau secara alami, tetapi terus menggali apa yang ada pada arti tersebut, kenapa, dan bagaimana.

#### **1.13.2. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough**

---

<sup>91</sup>*Ibid*

Fairclough mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik, pemikiran sosial dan politik lalu diintegrasikan pada perubahan sosial. Pemakaian bahasa ditunjuk sebagai praktik sosial dan aktivitas individu untuk merefleksikan sesuatu, misalnya suatu pandangan tertentu. Wacana merupakan bentuk dari representasi ketika melihat dunia dan realitas. Menandai adanya hubungan timbal balik antara wacana dengan struktur sosial.

Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi yaitu teks, *discourse practice*, dan *socioculture practice*. Teks, akan dianalisis secara linguistik dengan melihat kosa kata dan tata kalimat. Pada *discourse practice*, menganalisis dengan cara melihat dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Sedangkan analisis *socioculture practice* didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media memengaruhi bagaimana wacana yang muncul di media.<sup>92</sup>

### 1.13.2.1. Teks

Tabel 1. Tiga Elemen Dasar Teks Dalam Model Fairclough

Unsur	Aspek yang ingin dilihat
<b>Representasi</b>	Menjelaskan mengenai peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan atau digambarkan dalam teks (substansi).
<b>Relasi</b>	Menjelaskan mengenai hubungan antara pesan yang ingin disampaikan Obama dalam pidatonya, khalayak, dan partisipan berita (para aktor/negara yang disebut dalam pidato Presiden Barack Obama yang digambarkan dalam teks (Pidato Presiden Barack Obama).
<b>Identitas</b>	Menjelaskan mengenai identitas antara pesan yang ingin disampaikan Obama dalam pidatonya, khalayak, dan partisipan berita (para aktor/negara yang disebut dalam pidato Presiden

<sup>92</sup> Sri Utami. 2007. "Representasi Emansipasi Bangsa Dalam Surat-surat dan Nota Kartini". *Jurnal Ilmu Komunikasi: Thesis*. Volume VI. Nomor 2. Mei- Agustus. Hal 118-119

Barack Obama yang digambarkan dalam teks.

*Sumber: Eriyanto. 2001. Analisis Wacana. Cetakan Pertama. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.*

Fairclough melihat teks dalam berbagai tingkatan. Sebuah teks bukan hanya ditampilkan sebagaimana suatu objek digambarkan tetapi juga diperlukan identifikasi antar objek tersebut. Tiga elemen dasar dalam model Fairclough (telah digambarkan dalam tabel di atas). Menurut Fairclough, setiap teks dapat diuraikan dan dianalisis dari ketiga unsur tersebut.

#### **1.13.2.1.1. Representasi**

Representasi pada dasarnya ingin melihat seseorang atau kelompok ditampilkan dalam teks. Representasi menurut Fairclough dipandang melalui dua hal, yaitu dari bagaimana seseorang atau kelompok tersebut juga gagasan ditampilkan dalam kalimat.<sup>93</sup>

Menurut Fairclough, ketika pada dasarnya pemakai bahasa dihadapkan pada paling tidak dua pilihan, yaitu kosakata (*vocabulary*) dan tingkat tata bahasa (*grammar*). Pilihan kosakata yang dipakai terutama berhubungan dengan bagaimana peristiwa, seseorang, kelompok, atau kegiatan tertentu dikategorisasikan dalam suatu set tertentu. Kosakata kemudian sangat menentukan karena berhubungan dengan pertanyaan bagaimana realitas ditandakan dalam bahasa. Rangkaian kalimat itu tidak hanya berhubungan dengan teknis penulisan, oleh sebab itu bisa memengaruhi makna yang ditampilkan kepada khalayak.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Fabrianisa Mutiara. 2010. *Analisis Wacana Kritis Terhadap Retorika Hubungan Islam & Amerika Serikat Dalam Pidato Obama Di Kairo, Mesir*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Hal 28.

<sup>94</sup> *Ibid*



#### 1.13.2.1.1 Representasi dalam teks

Fokus pertama dalam analisis peristiwa komunikatif adalah bagaimana peristiwa, situasi dan individu-individu direpresentasikan di dalam teks. Dalam melakukan analisis, digunakan asumsi dasar bahwa suatu teks tidak semata-mata menyajikan sebuah kenyataan atau informasi objektif melainkan menceritakan versi “realitas” yang sesuai dengan posisi sosial dan tujuan pembuat teks.<sup>95</sup>

Kegiatan analisis representasi pada umumnya berfokus pada hal-hal yang terdapat dalam teks. Akan tetapi perlu diingat bahwa kepekaan terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam teks atau hal-hal yang sengaja dihilangkan oleh pembuat teks dengan tujuan tertentu, sama pentingnya dengan hal-hal yang terdapat dalam teks. Fairclough memetakan tingkat kehadiran aspek-aspek dalam suatu teks mulai dari informasi yang hilang (*absence*), pengandaian (*pressupposition*), latar belakang (*background*), hingga latar depan (*foreground*).

Informasi yang secara eksplisit terdapat dalam sebuah teks dibedakan menjadi dua bagian, yaitu informasi yang melatarbelakangi dan yang melatardepani. Pada kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks, klausa utama pada umumnya merupakan informasi yang melatardepani, sedangkan klausa bawahannya merupakan informasi yang melatarbelakangi.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*

#### 1.13.2.1.1.2 Representasi di Tingkat Kalimat

Dalam merepresentasikan suatu peristiwa, pengalaman, preposisi, objek lain ke dalam sebuah kalimat, pembuat teks dihadapkan pada berbagai pilihan untuk melakukannya. Pilihan yang pertama adalah pilihan kosa kata. Contohnya adalah apakah seorang pimpinan suatu kelompok, dikatakan sang ketua, sang koordinator, atau sang penguasa merupakan pilihan-pilihan yang kesemuanya memiliki makna tertentu dengan tujuan tertentu pula.<sup>97</sup>

Pilihan yang kedua adalah pilihan di tingkat kalimat. Misalnya saja pemilihan pola kalimat aktif dapat dipakai untuk memberi penekanan lebih pada pelaku suatu perbuatan, sedangkan pola kalimat pasif, walaupun dipakai untuk proposisi yang sama, dapat digunakan untuk menghilangkan identitas pelaku serta memberi penekanan pada tindakan serta hasil dari suatu tindakan. Pemilihan struktur tersebut berhubungan dengan peletakan informasi dalam slot tema dan rima. Istilah tema sendiri menurut Fairclough merupakan elemen yang terletak pada awal klausa yang menjadi topik dari klausa tersebut, sedangkan rima adalah elemen yang mengikutinya. Intinya, informasi yang diletakkan oleh penulis dalam slot tema menjadi lebih dipentingkan daripada yang diletakkan pada slot rima.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Fabrianisa Mutiara. *Loc. Cit.* Hal 30.

<sup>98</sup> *Ibid*

### 1.13.2.1.1.3 Representasi di Tingkat Kombinasi Klausa

Sebuah realitas bisa terbentuk akibat penggabungan dua anak kalimat yang berisi tentang informasi-informasi yang berbeda. Informasi-informasi atau fakta-fakta yang saling terpisah itu bisa digabungkan menjadi satu kalimat yang dapat memberi pengertian baru atau pengertian tambahan terhadap pembaca.<sup>99</sup>

Tentu realitas baru yang terbentuk dari penggabungan kedua fakta akan berbeda jika, kemudian menggunakan konjungsi “yang” dan “selanjutnya”. Penggabungan kedua fakta dapat pula dalam perpanjangan anak kalimat yang satu dengan dengan menggunakan anak kalimat yang lain. Koherensi itu dapat ditandai dengan konjungsi “dan” (tambahan), “tetapi” (kontras), serta “atau” (setara). Selain itu, koherensi juga dapat berupa peningkatan anak kalimat, yaitu anak kalimat satu memiliki posisi yang lebih tinggi dari anak kalimat yang lain. Koherensi seperti ini ditandai dengan adanya anak kalimat yang bebas (dapat berdiri sendiri) dan anak kalimat yang terkait.<sup>100</sup>

### 1.13.2.1.2 Relasi

*Representasi* berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang, kelompok, kegiatan, tindakan, keadaan, atau sesuatu ditampilkan dalam teks, sementara itu *relasi* berhubungan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Media disini

<sup>99</sup> Fabrianisa Mutiara. *Loc. Cit.* Hal 31.

<sup>100</sup> *Ibid*

dipandang sebagai suatu arena sosial, di mana semua kelompok, golongan, dan khalayak yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan pendapat dan gagasannya sesuai versi masing-masing.<sup>101</sup>

Menurut Fairclough, paling tidak terdapat tiga partisipan utama dalam teks: *penutur (penyampai teks)*, *khalayak/ audiens*, dan *partisipan public (kelompok organisasi)*, memasukkan diantaranya politisi, pengusaha, tokoh masyarakat, artis, ulama, ilmuwan, dan sebagainya. Titik perhatian dari analisis hubungan ini bukan pada bagaimana partisipan publik tadi ditampilkan dalam media (representasi), akan tetapi pada pola hubungan diantara ketiga aktor tadi ditampilkan dalam teks: antara penutur dengan khalayak, antara partisipan dengan publik, baik politisi, pengusaha, atau lainnya dengan khalayak, dan antara penutur dengan partisipan juga publik tersebut. Semua analisis hubungan tersebut diamati dari teks.<sup>102</sup>

Relasi antara Obama, dengan aktor-aktor yang disebutkan dalam naskah pidato. Bagaimana masing-masing relasi aktor yang disebutkan di dalam teks itu saling terhubung dan posisinya dalam keterkaitannya dengan Obama sebagai representasi negara AS.

#### **1.13.2.1.3 Identitas**

Aspek identitas ini, oleh Fairclough dijelaskan, dapat ditemukan yaitu dengan cara melihat bagaimana identitas penutur ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks. Menurut Fairclough, melihatnya adalah dengan menemukan bagaimana Amerika Serikat menempatkan dan mengidentifikasi dirinya. Di kelompok yang mana AS

---

<sup>101</sup> Fabrianisa Mutiara. *Loc. Cit.* Hal 32.

<sup>102</sup> *Ibid*

menyatakandiri sebagai bagian? Apakah AS ingin mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kepentingan umat manusia atautkah mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai bagian dari kelompok yang lain. Identifikasi ini akan menentukan bagaimana wacana yang ingin ditampilkan kepada warga dunia sebagai doktrin internasional. Seorang orator mungkin saja mengambil posisi superior dan memerintahkan atau bahkan mengancam audiens untuk bersepakat dengan ide yang ditawarkan. Akan tetapi, di lain pihak, orator pun mungkin saja malah memosisikan dirinya sebagai pihak yang inferior dan memohon-mohon kepada audiens untuk bersepakat dengan ide yang ditawarkannya tersebut.<sup>103</sup>

Identitas penutur sebagai pembawa teks, dalam analisis wacana kritis Fairclough menjadi bagian yang penting yang juga diperhatikan. Pembahasan teks dalam penelitian ini tidak akan terlepas dari menganalisis posisi Obama sebagai representasi negara AS dalam menuturkan kebijakan luar negrinya di rapat umum PBB tersebut.

#### 1.13.2.2 *Discourse Practice*

Analisis *discourse practice* memusatkan perhatian pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Telah dijelaskan di atas bahwa teks dibentuk lewat suatu praktik wacana, yang menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Dalam hal tersebut, yakni produksi teks (dipihak media) dan konsumsi teks (dipihak khalayak).<sup>104</sup>

*Discourse practice* dimaksudkan pada bagaimana pilihan-pilihan kata dan kalimat yang digunakan dalam pidatoserta berbagai pernyataan para ahli atau kalangan akademis melalui

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> Norman Fairclough. *Op. Cit.* Hal 145.

jurnal atau buku atau laporan riset maupun pemberitaan media terkait respon atas pidato Presiden Obama tersebut (konsumsi teks). Penggunaan kata-kata dan kalimat dalam produksi dan konsumsi teks tersebut akan diteliti kandungan teks yang memiliki makna-makna tertentu.<sup>105</sup> Akan tetapi dimensi kedua ini, *discourse practice* tidak dilakukan dalam penelitian ini sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan dua dimensi analisis saja yaitu teks dan *sociocultural practice*.

### 1.13.2.3 Sociocultural Practice

Analisis *sociocultural practice* didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial dan budaya yang ada di luar media (dalam hal ini berupa naskah pidato) yang diteliti memengaruhi bagaimana wacana yang muncul dalam teks pidato. *Sociocultural practice* ini memang tidak memiliki hubungan langsung dengan teks, tetapi iadapat menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Menurut Fairclough, *sociocultural practice* menentukan teks secara tidak langsung, tetapi dimediasi oleh *discourse practice*.

Mediasi meliputi dua hal. Pertama, bagaimana teks diproduksi dan kedua bagaimana warga internasional akan mengkonsumsi dan menerima teks tersebut. Fairclough membuat tiga level analisis pada *sociocultural practice*: level situasional, institusional serta sosial.

Pembahasan praktik sosiokultural meliputi tiga tingkatan; tingkat situasional, instittusional dan sosial. Tingkat situasional berkaitan dengan poduksi dan konteks situasi. Sementara itu tingkat institusional bekaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun ekstenal. Kemudian tingkat sosial berkaitan dengan situasi yang lebih makro yakni sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>105</sup> *Ibid*

#### 1.13.2.3.1. Situasional

Aspek situasional adalah hal yang diperhatikan dari konteks sosial. Aspek situasional ini berhubungan dengan bagaimana ketika teks itu diproduksi. Jika wacana dianggap sebagai sebuah tindakan, maka tindakan tersebut sebenarnya adalah upaya dalam merespons situasi atau konteks sosial tertentu.<sup>106</sup>

Setiap teks yang muncul pada umumnya lahir pada sebuah kondisi yang lebih mengacu kepada waktu atau suasana khas dan unik. Atau dengan kata lain pula dalam suatu konteks. Aspek situasional lebih menekankan pada konteks yang terjadi saat wacana dimuat.

#### 1.13.2.3.2. Institusional

Level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi atau lembaga dalam praktik produksi wacana. Institusi ini bisa berasal dari dalam diri penutur sendiri, dapat pula dari kekuatan-kekuatan eksternal di luar substansi wacana pidato yang menentukan proses produksi pesan-pesan dalam pidato. Lebih lanjut, terkait penelitian ini, faktor institusi atau lembaga yang penting adalah institusi yang berhubungan dengan *national interest* Amerika Serikat.

Faktor institusilain yang berpengaruh adalah institusi politik. Institusi atau lembaga politik sedang mempengaruhi kehidupan dan kebijakan yang sedang berlangsung ketika substansi pidato tersebut mengemuka ke publik. Institusi yang dimaksud dapat berupa kekuatan institusional aparat dan pemerintah, bisa juga institusi lain

---

<sup>106</sup> Abul Muamar. 2013. *Pemberitaan Kemenangan Pasangan Gatot Pujo Nugroho – Tengku Erry Nuradi (Ganteng) Dalam Hasil Hitung Cepat Pemilukada Sumatera Utara 2013 Pada Harian Analisa Dalam Persepektif Analisis Wacana Kritis*. Skripsi. Universitas Sumatra Utara. Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik. Hal 21.

yang pada intinya ia mampu mempengaruhi isi sebuah teks.<sup>107</sup>

Dalam konteks pidato ini institusi yang dimaksud bisa merupakan institusi seperti institusi politik dalam pemerintah AS seperti kongres yang mempengaruhi substansi pidato Obama di Sidang Umum PBB. Pidato ini kemudian digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai faktor pembentuk doktrin intervensi kemanusiaan.

#### 1.13.2.3.3. Sosial

Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap wacana atau *discourse* yang muncul. Fairclough bahkan menegaskan bahwa wacana yang muncul ditentukan oleh perubahan yang ada di masyarakat. Dalam level sosial, budaya masyarakat, misalnya, ikut menentukan perkembangan dari wacana.<sup>108</sup> Dalam konteks penelitian ini, substansi pidato Presiden Obama dapat dipahami berdasar faktor-faktor sosial yang menyertai pidato ketika dinyatakan.

Aspek sosial ini melihat pada aspek mikro seperti ekonomi, sistem politik dan budaya secara keseluruhan. Dengan demikian melalui analisis wacana model sosiokultural ini kita dapat mengetahui inti dari sebuah pidato dengan cara membongkar terlebih dahulu teks hingga mendalam. Pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa ternyata teks pun mengandung ideologi tertentu yang diselipkan oleh penulisnya sehingga masyarakat atau audiens dapat mengikuti alur keinginan penulis tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika melakukan analisis menggunakan model inipeneliti harus berhati-

---

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> *Ibid*



hatijangan sampai menimbulkan kesalahan sehingga menimbulkan fitnah sebab tidak berdasar sumber yang jelas. Oleh karena itu kroscek berdasar data-data sekunder mutlak dilakukan. Begitu pun yang diterapkan pada penelitian ini yang menggunakan data-data sekunde dari berbagai buku, jurnal dan hasil analisis pakar ilmu sosial untuk memastikan keabsahan hasil analisis dan argumen.

#### 1.14. Kerangka Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Secara metodologis, maka penelitian ini akan mengikuti tahapan pengumpulan data dan analisis data berdasarkan elemen-elemen Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yaitu: pada *level teks*, peneliti akan menguraikan segenap temuan data primer berupa analisis pada isi Pidato Presiden Obama berdasarkan kategori-kategori yang dibuat yakni: pelaku komunikasi, perilaku komunikator. Terkait pada level teks ini, peneliti akan menggunakan analisis kebahasaan, artinya, semua teks sesuai kategori yang ada akan dibahasakan oleh peneliti sebagai temuan data primer yang tentu saja terkait dengan permasalahan penelitian.

Kemudian, pada *level sosiokultural*, data penelitian akan diperoleh dari sumber data sekunder berupa literatur atau berita media atau sumber-sumber lain yang relevan dengan persoalan penelitian ini. Ringkasnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Kerangka Analisis Penelitian

Tingkatan	Metode
<i>Teks</i>	<i>Critical Discourse Analysis Norman Fairclough</i>
<i>Discourse practice</i>	Pada level <i>Konsumsi Teks</i> dan <i>Produksi Teks</i> , menggunakan penelusuran opini penulis dari sumber-sumber sekunder seperti pemberitaan media dan rilis internet. Kemudian diinterpretasikan makna-makna yang terkandung di dalamnya.

**Sociocultural practice**

Menggunakan studi pustaka dan penelusuran data sekunder lainnya.

*Sumber: Eriyanto. 2001. Analisis Wacana. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.*

Ada tiga tahap analisis yang digunakan. Pertama, *deskripsi*, yakni untuk menguraikan isi dan analisis secara deskriptif pada teks. Di sini, teks dijelaskan tanpa dihubungkan dengan aspek lain. Kedua, *interpretasi*, yaitu menafsirkan teks dengan menghubungkan pada praktik wacana yang dilakukan. Ketiga, *eksplanasi*, bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran kita pada tahap kedua. Penjelasan tersebut dapat diperoleh dengan menghubungkan produksi teks itu dengan praktik sosiokultural dimana suatu media berada. Melalui model ini, Fairclough ingin menegaskan bahwa wacana sesungguhnya adalah suatu bidang yang kompleks karena yang muncul pada teks yang kita teliti sesungguhnya adalah bagian akhir dari suatu proses yang kompleks pula. Kompleks sebab berasal dari berbagai kekuatan, aturan, regulasi, dan negosiasi yang menghasilkan fakta tertentu. Model yang diperkenalkan oleh Fairclough juga berusaha mendeteksi dan menghubungkan substansi wacana pidato Presiden Obama dengan bentuk wacana umum lainnya yang terjadi di dalam masyarakat (modern). Hal inientunya yang terkait dengan isu intervensi kemanusiaan dan praktik wacana hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah.

**1.15. Peran Peneliti**

Di dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data mensyaratkan identifikasi nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan bias personal di awal penelitian.<sup>109</sup> Di dalam *critical theory*, keberpihakan peneliti terhadap suatu pandangan atau objek penelitian diterima bahkan menjadi ciri validitas penelitian tersebut. Meskipun demikian, keberpihakan dan bias peneliti ini perlu dinyatakan secara eksplisit sebagaimana dinyatakan oleh Creswell.<sup>110</sup> Maka, dalam penelitian ini peran peneliti lebih kepada posisi untuk melakukan proses kritik dan interpretasi atas wacana praktik hegemoni yang

<sup>109</sup> John W. Creswell. *Op Cit.* 2003. Hal 200.

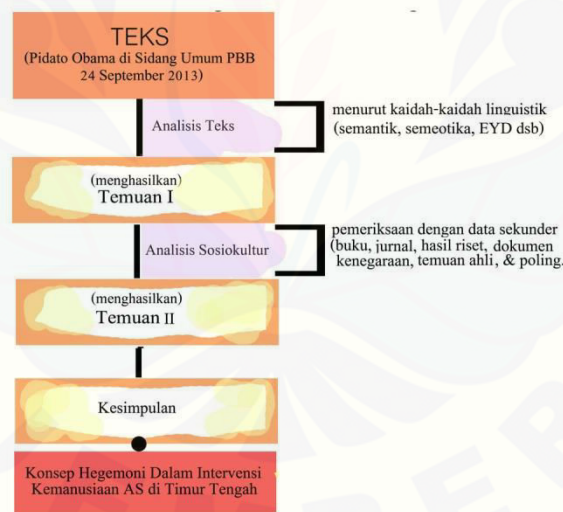
<sup>110</sup> *Ibid*

diduga terkandung dalam naskah Pidato Presiden Obama terkait dengan intervensi kemanusiaan di Timur Tengah sebagai doktrin internasional.

### 1.16. Kerangka Kerja Penelitian

Tahapan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan bahan termasuk penemuan data primer, kemudian teks-teks, berita, deklarasi, piagam, resolusi dan perjanjian internasional tentang *humanitarian intervention* sebagai data sekunder sejak perang dingin hingga 2011. Tahap selanjutnya adalah riset mengenai Timur Tengah berkaitan dengan *humanitarian intervention*. Peneliti memfokuskan pada kasus di Timur Tengah. Dalam tahap awal sebelum analisis ini, penulis dituntut memberikan penggambaran jelas mengenai definisi intervensi kemanusiaan, Timur Tengah dalam kebijakan AS dan juga penggunaan teks wacana dalam *humanitarian intervention* di ranah internasional.

Bagan Kerangka Kerja Penelitian  
(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Untuk Pidato Obama di Sidang Umum PBB 24 September 2013)



Bagan 1. Kerangka Kerja Penelitian

Dapat dilihat di bagan, tahap selanjutnya adalah masuk tahap yang penting karena pada tahap ini analisis sudah diberlakukan pada teks pidato Obama yang menjadi data primer penelitian ini. Peneliti mencari makna tanda-tanda signifikan yang menjadi komponen analisis teks secara mendalam menggunakan multilevel analisis Fairclough. Paling pertama adalah analisis teks. Akan tetapi sebelum

analisis teks Fairclough tersebut, dilakukan terlebih dahulu pengkodean pada teks sesuai kaidah linguistik pada tahap analisis teksnya.

Tahap ketiga adalah analisis teks sosiokultural. Analisis ini merupakan tahap lanjutan dari analisis teks. Hasil dari analisis teks sangat penting untuk tahap analisis sosiokultur ini sebab hasil analisis tersebut yang digunakan untuk mengetahui mengapa pembuat teks atau agen menggunakan tanda-tanda tertentu dalam teksnya. Lalu menentukan adanya agenda tersembunyi penutur yang dalam konteks penelitian ini adalah konsep hegemoni Presiden Obama. Analisis sosiokultural dilakukan dengan melakukan pemaknaan secara komprehensif. Peneliti mencoba menemukan relasi-relasi kekuasaan yang bersifat hegemonik dalam teks. Caranya adalah dengan mencocokkan penemuan yang ada di tahap analisis teks dengan data sekunder berupa buku, jurnal, hasil iset, berita, deklarasi, dan lain-lain yang relevan.

Tahap keempat adalah mengumpulkan penemuan dari keseluruhan hasil penelitian dan menuliskannya secara sistematis dalam kesimpulan. Selain itu perlu pemeriksaan kembali hasil penelitian untuk mencapai kualitas penelitian.

Hal lain yang perlu peneliti tambahkan berkaitan dengan kualitas penelitian adalah bahwa dalam tradisi teori-teori kritis menilai kualitas suatu penelitian dari segi sejauh mana penelitian tersebut merupakan suatu studi yang memiliki sifat *historical situatedness dan wholeness*.<sup>111</sup> *Historical Situatedness* berurusan dengan konteks historis, politik-ekonomi, serta sosial-budaya yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti. Penelitian dalam tradisi teori-teori kritis juga menekankan sifat holistik dari suatu penelitian. Oleh karena itu pada umumnya studi yang dilakukan merupakan suatu *multilevel analysis*, tidak terbatas hanya pada satu jenjang analisis tertentu saja.<sup>112</sup> Dengan menggunakan metodologis paradigma kritis yang mengacu pada pemikiran Fairclough yang multilevel, diharapkan keabsahan penelitian ini memenuhi: pertama, kriteria

---

<sup>111</sup> N. K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.). 2005. *Handbook of Qualitative Research*. Cetakan ketiga. London: SAGE Publication. Hal 105-117. Dalam Eduardus Dosi. 2012. *Media Masa Dalam Jaring Kekuasaan; Sebuah Studi tentang Relasi Kekuasaan di Balik Wacana*. Flores: Ledalero. Hal 125.

<sup>112</sup> *Ibid.*

berkenaan dengan *historical situatedness*, penelitian yang baik harus memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

### 1.17. Keabsahan Penelitian

Di dalam penelitian, sangat penting untuk melakukan keabsahan penelitian. Hal itu dikarenakan keabsahan di dalam penelitian akan menunjukkan bahwapenelitian tersebut dapat dipercaya atau tidak. Berkaitan dengan data, keabsahan data harus memenuhi keadaan atau syarat berikut:<sup>113</sup>

- a. Mendemostrasikan nilai yang benar.
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
- c. Memperoleh keputusan luar yang didapat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Kemudian untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.<sup>114</sup> Teknik pemeriksaan dilakukan atas dasar jumlah tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)<sup>115</sup>:

- a. Derajat kepercayaan (*credibility*): adalah sebuah teknik pemeriksaan data yang mempunyai kriteria yang berfungsi untuk melaksanakan inkuiri (penelusuran) sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, dan juga mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
- b. Keteralihan (*transferability*): menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

---

<sup>113</sup> Lexy J. Moelong. *Op. Cit.* 2004. Hal 320.

<sup>114</sup> Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 324.

<sup>115</sup> *Ibid*

- c. Ketergantungan (*dependability*): cara pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai.
- d. Kepastian (*confirmability*): memastikan bahwa kumpulan data yang telah dikumpulkan itu bersifat objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Namun sudah mengalami proses konfirmasi dan kesesuaian/kesepakatan dari banyak pandangan atau pendapat banyak subjek. Kerap dikenal dengan istilah *intersubjectivity agreement*.

Penelitian ini akan menggunakan dua kriteria, yaitu kepercayaan (*credibility*) dan keteralihan (*transferability*). Dimana kriteria kepercayaan berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri/pencarian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaannya dapat dicapai; kedua, menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan data yang sedang diteliti.

Sedangkan kriteria keteralihan mengharuskan peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian *empiris* tentang kesamaan konteks serta menjadikan data penelitian merupakan hasil penelitian<sup>116</sup>, kriteria ini menjadi selaras dengan penelitian ini karena peneliti dalam skripsi ini akan mencari berbagai data dari berbagai sumber dengan konteks yang sama yakni tentang praktik hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah yang direpresentasikan melalui wacana intervensi kemanusiaan sebagai kebiasaan internasional. Contohnya berbagai referensi dalam jurnal atau buku serta dokumen lain yang relevan membahas mengenai *humanitarian intervention* di Timur Tengah yang mana bermuatan makna hegemoni oleh AS akan peneliti gunakan sebagai bahan untuk menginterpretasikan data penelitian.

Hal terpentingnya adalah berbagai referensi tersebut perlu memiliki kredibilitas (*credibility*) dan kesesuaian kualitas penelitiannya bersumber dari otoritas resmi yang memang lazim terpercaya. Contohnya referensi seperti jurnal

---

<sup>116</sup> *Ibid*

atau buku dengan penerbit yang telah dipandang mumpuni di bidangnya. Dalam hal ini kapasitasnya mengenai intervensi kemanusiaan dan hegemoni.

Sedangkan secara kriteria *transferability* yang dimaksud dalam penelitian ialah berbagai referensi yang digunakan penelitian ini akan diseleksi khususnya pada referensi yang mana sudah banyak berlaku dan diterapkan ketika membahas intervensi kemanusiaan dan hegemoni AS. Dengan begitu ketika peneliti menginterpretasikan naskah pidato presiden Obama itu dilakukan dengan merujuk pada referensi yang sudah memiliki tingkat generalisasi yang memadai dan representatif. Representatif untuk mengevaluasi adanya praktik hegemoni dibalik misi intervensi kemanusiaan.

## 1.18. Keterbatasan Penelitian

Pidato Presiden AS Barack Obama di Sidang Umum PBB tanggal 24 September 2013 merupakan pidato paling signifikan dalam hal kebijakan luar negrinya. Selain itu sarat pula dengan seruan kepada dunia internasional untuk *pro* mengenai ide intervensi kemanusiaan di Timur Tengah. Presiden Barack Obama menyebut langkah kebijakan itu sebagai “*the new & focus foreign policy in middle east*”. Presiden Barack Obama juga menyebutkan bahwa ia ingin melindungi kepentingan (*interest*) AS yang ada di sana khususnya dan kepentingan dunia umumnya. Di dalam pidato tersebut peneliti justru meyakini terdapat adanya *hidden agenda* dan makna wacana praktik hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah akan tetapi atas nama intervensi kemanusiaan.

Ketika meneliti mengenai arah dan garis kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam hal praktik intervensi kemanusiaan yang dilakukannya, tentunya diperlukan proses pengumpulan data dan analisis yang tidak sederhana. Bagaimanapun intervensi kemanusiaan dalam konteks praktik oleh negara merupakan agenda yang sangat besar untuk sebuah penelitian. Semakin banyak dokumen-dokumen resmi, khususnya dokumen kenegaraan, yang dikumpulkan sebagai data tentunya akan semakin menambah kualitas penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini kemungkinan masih memiliki keterbatasan khususnya dalam

analisis dan interpretasi, mengingat penelitian ini hanya bersumber dari sebuah naskah pidato Presiden Obama di PBB.

### 1.19. *Outline* Penulisan Penelitian

Karya penelitian ini penulis uraikan ke dalam enam bab pembahasan yang penulis susun sebagai berikut:

- Bab I Menguraikan latar belakang permasalahan yang diangkat, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan, landasan teori, metodologi penelitian, sifat penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II Pada bab ini penulis membahas tentang objek penelitian secara umum. Menjabarkan konsep intervensi kemanusiaan, definisi dan tujuan, evolusi sejarah intervensi kemanusiaan tersebut, perkembangannya menjadi kebiasaan internasional. Di awal penelitian ini, penulis akan mengulas perkembangan gagasan *humanitarian intervention*. Lalu penulis juga membahas praktik intervensi Amerika Serikat di beberapa negara di Timur Tengah seperti Libya dan Suriah.
- Bab III Bab ini berisi profil Timur Tengah, yaitu potensi geografis & sumberdaya alam. Selain itu penulis membahas kebijakan luar negeri AS secara umum di Timur Tengah berhubungan dengan intervensi kemanusiaan di kawasan ini.
- Bab IV Bab ini berisi hasil analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap teks Pidato Obama di Sidang Umum PBB. Analisis wacana kritis yang dimaksud adalah dua level analisis Fairclough yakni analisis teks dan analisis sosiokultural.
- Bab V Bab ke-lima berisi penemuan dari hasil penelitian, kesimpulan dan saran.

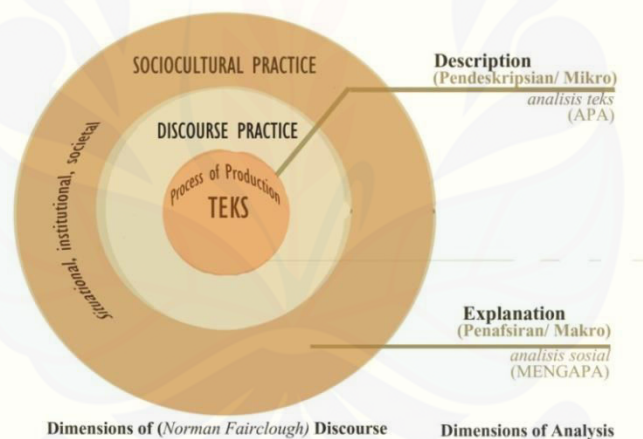


**BAB 2**

**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa hal yang menjadi gambaran umum objek penelitian. Dalam skripsi ini objek penelitian adalah Pidato Obama di Sidang Umum PBB tanggal 24 September 2013. Oleh sebab itu penulis perlu memberikan gambaran struktur umum objek penelitian ini terlebih dahulu.

Teks pidato ini secara resmi dikeluarkan oleh Kantor Gedung Putih di Washington dan dapat diunduh melalui website kantor Gedung Putih di <http://www.whitehouse.gov>. Proses analisis akan dilakukan terhadap teks pidato tersebut dengan menggunakan teori Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Di bawah ini pembagian tahap dan dimensi analisis menurut Norman Fairclough:



*Gambar6. Dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough  
Sumber: diolah dari data dalam skripsi ini.*

Di bawah ini penulis akan memberi gambaran mengenai struktur umum Pidato Obama di Sidang Umum PBB berdasarkan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

**2.1 Struktur Umum Pidato Obama di Sidang Umum PBB Tahun 2013**

Untuk menyusun struktur umum pidato Obama di sidang Umum PBB, terlebih dahulu mengklasifikasi data teks berdasar paragraf. Hal ini dinamakan pengkodean. Pengkodean ini akan memudahkan peneliti menganalisis di tingkat kalimat. Pengkodean dalam analisis teks dilakukan dengan, pertama memilah

naskah ke dalam beberapa bagian, yaitu pembuka, isi dan penutup. Masing-masing bagian tersebut dipilah lagi ke dalam bagian yang lebih kecil yang disebut segmen. Kedua, menomori keseluruhan paragraf. Setelah itu menghitung keseluruhan paragraf yang telah diberi nomor untuk mengetahui jumlah paragraf tiap segmennya. Teks pidato Obama yang menjadi data primer dalam penelitian ini terdiri dari 62 paragraf, 224 kalimat dan 3720 kata.

Teks lebih dulu dibagi ke dalam tiga bagian yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka terdiri dari 12 paragraf. Pada bagian isi, sebanyak 45 paragraf (yang akan dianalisis sebanyak 40 paragraf). Bagian isi ini dipilah lagi berdasar dua isu utama yang disampaikan secara eksplisit, yaitu isu *humanitarian intervention* dan demokrasi. Segmen *Humanitarian Intervention* ini masih dibagi lagi ke dalam sub-segmen isu intervensi kemanusiaan ke Syria, dan Palestina – Israel. Bagian terakhir, yaitu penutup, dalam pidato ini sebanyak 5 paragraf (yang akan dianalisis hanya sebanyak 2 paragraf).

Tabel 3. Struktur Umum Pidato Obama di Sidang Umum PBB 2013

Jumlah Paragraf	Bagian/ Segmen	Sub-segmen	
12	Pembuka	-	
45	Isi	<i>Humanitarian Intervention</i>	<i>Humanitarian Intervention</i> ke Syria
			Konflik Israel Palestina
		Demokratisasi	-
5	Penutup	-	-

Sumber: diolah dari data pada penelitian atau skripsi ini

Analisis teks pada data ini mencakup keseluruhan paragraf. Penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup yang diwacanakan dalam teks ini. Analisis akan dilakukan secara komprehensif agar data tidak terkesan terpisah-pisah. Tahap pertama adalah analisis tekstual. Pada tahap ini penulis akan menganalisis pilihan kata, tata kalimat, koherensi, dan kohesi. Tahap kedua yaitu analisis sosiokultural. Konteks pidato untuk menyingkap ideologi yang terkandung di dalamnya akan dilihat pada tahap analisis sosiokultural ini. Tahap analisis ini juga untuk melihat bagaimana

ideologi yang ada tersebut dipertahankan bergantung dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi teks tersebut.

Pada tahap analisis teks, penulis akan menganalisis pilihan-pilihan kata dan frase yang digunakan oleh penutur dan atau penyusun teks pidato. Analisis kata dan frase akan dilakukan secara bersamaan sebab keduanya memiliki keterikatan secara sintaksis<sup>1</sup> dan semantis<sup>2</sup>. Pilihan kata dan frase tersebut tentunya akan memengaruhi penerimaan audiens terhadap informasi yang telah disusun sedemikian rupa. Bisa jadi pilihan kata tersebut menciptakan relasi kuasa, representasi baik atau buruk, atau juga malah bersifat netral.

Dalam analisis teks, selain melakukan pemilahan dan penomoran paragraf, peneliti juga melakukan penandaan dalam kalimat dengan menggunakan *bold* dan *underlying*. Hal ini dilakukan untuk memberi dan menunjukkan adanya relasi kuasa, representasi, dan identitas yang ditonjolkan penutur yakni Presiden Obama. Kata, frase atau kalimat yang ditebalkan maupun yang digaris bawah merupakan kata atau frase atau kalimat yang memberikan indikasi atau makna tertentu berkaitan dengan tema pidato ini. Kata, frase atau kalimat yang ditebalkan dan digarisbawah berarti mengandung tanda atau petunjuk adanya hal-hal yang berkaitan dengan konsep hegemoni melalui intervensi kemanusiaan. Hal ini termasuk dalam pengkodean dalam penelitian analisis wacana kritis. Hal ini juga sangat penting dilakukan agar peneliti secara runtut dan sistematis dapat menunjukkan proses analisis yang ada.

Studi ini fokus untuk menganalisis mengenai konsep wacana intervensi kemanusiaan di Timur Tengah di dalam pidato Presiden Obama tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini setelah membahas struktur umum pidato penulis akan

---

<sup>1</sup> Sintaksis berasal dari bahasa Belanda *syntaxis*. Sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Sintaksis merupakan cabang tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat. Lihat Henry Guntur Tarigan. 1984. *Pengajaran Sintaksis*. Bandung: Angkasa.

<sup>2</sup> Semantik berasal dari bahasa Inggris *semantics*, dari bahasa Yunani *Semantikos*, yang berarti tanda. Istilah tersebut digunakan oleh para pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Semantik dalam linguistik adalah studi tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Semantik>. Diakses 30 Mei 2015.

membahas mengenai intervensi kemanusiaan di Timur Tengah. Agar pembahasan mengenai intervensi kemanusiaan di Timur Tengah ini menjadi lebih jelas maka peneliti akan membaginya dalam empat sub bab. *Pertama*, persepsi intervensi kemanusiaan ke Timur Tengah oleh Amerika Serikat. *Kedua*, intervensi kemanusiaan dan peran PBB. Hal ini dituliskan untuk dapat memahami bagaimana isu moral intervensi Timur Tengah di sub bab selanjutnya. *Ketiga*, isu moral dalam intervensi kemanusiaan di Timur Tengah, berikut beberapa contoh negara-negara yang mengalami intervensi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa peneliti melaukan *underline* dan *bold* pada beberapa kata dan frase serta kalimat pada kutipan langsung dalam pembahasan ini. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan penekanan dari kalimat yang dimaksud memiliki tanda-tanda, indikasi-indikasi, atau signifikansi tertentu terhadap makna tersembunyi dalam teks yang coba diungkapkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

## **2.2 Persepsi Intervensi Kemanusiaan ke Timur Tengah oleh Amerika Serikat**

Timur Tengah merupakan kawasan yang tidak terlepas dari fokus utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari pidato presiden dari berbagai generasi pemerintahan AS yang disampaikan di Sidang Umum PBB mengenai Timur Tengah. Dalam Sidang Umum PBB, Presiden AS selalu menyinggung mengenai kebijakan AS di kawasan tersebut. Salah satu contoh adalah apa yang disampaikan oleh Richard Nixon di Sidang Umum PBB pada tanggal 18 September tahun 1969. Pada kesempatan itu Presiden Nixon menyatakan dukungannya terhadap resolusi PBB yang dikatakan untuk intervensi kemanusiaan di kawasan tersebut.

*“The United States continues to believethat the U.N. cease-fire resolutions define the minimal conditions that must prevail on the ground if settlement is to be achieved in the Middle East. We believe the Security Council resolution of November 1967 charts the way to that settlement.*

*A peace, to be lasting, must leave no seeds of a future war. It must rest on a settlement which both sides have a vested interest in maintaining.”<sup>3</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Timur Tengah telah menjadi fokus AS bahkan sejak masa pemerintahan Presiden Nixon. Pada kesempatan itu mantan Presiden Nixon menyatakan komitmen AS dalam mendorong DK PBB untuk mengeluarkan resolusi berkaitan konflik yang ada di Timur Tengah. Tidak hanya menyatakan mendukung PBB dalam pembuatan setiap resolusi, Presiden Nixon juga memberikan pernyataannya mengenai posisi AS yang tarik menarik dengan Uni Soviet kala itu. Hal ini disampaikan di Sidang Umum PBB di tahun berikutnya, yaitu pada 23 Oktober 1970. Dalam kesempatan itu pula Presiden Nixon secara implisit menyatakan kepentingan AS di Timur Tengah dan alternatif strategi yang mungkin diambil olehnya, yaitu konfrontasi untuk mendapat kemenangan.

*“The Middle East is a place today where local rivalries are intense, where the vital interests of the United States and the Soviet Union are both involved. Obviously, the primary responsibility achieving a peaceful settlement in Middle East rests on the nations themselves. But in this region in fact, it is imperative that the two major powers conduct themselves so as to strengthen the forces of peace rather than to strengthen the forces of war.*

*It is essential that we and the Soviet Union join in efforts toward avoiding war in the Middle East, and also toward developing a climate in which the nations of the Middle East will learn to live and let live.*

*It is essential not only in the interest of the people of the Middle East themselves, but also because the alternative could be a confrontation with disastrous consequences for the Middle East, for our nations, and for the whole world.”<sup>4</sup>*

Pada Sidang Umum PBB ke-25 tersebut Presiden Nixon memberikan penjelasan bahwa terdapat kepentingan ideologis AS di Timur Tengah yang berbenturan dengan Uni Soviet saat itu. Disebutkan bahwa kepentingan vital AS dan Uni Soviet pada saat itu sama-sama terlibat di kawasan tersebut sehingga

---

<sup>3</sup> US Department of State: Diplomacy In Action. 1969. *Address by President Richard Nixon to The UN General Assembly*. Dalam <http://www.state.gov/p/io/potusunga/207305.htm>. Diakses 2 Mei 2015.

<sup>4</sup> US Department of State: Diplomacy In Action. 1970. *Address by President Richard Nixon to The UN General Assembly*. Dalam <http://www.state.gov/p/io/potusunga/207302.htm>. Diakses 2 Mei 2015.

menimbulkan ketegangan. Sidang Umum PBB adalah forum dimana AS sering menyatakan kepentingannya secara terbuka mengenai isu-isu internasional, termasuk Timur Tengah.

Kepentingan AS terhadap Timur Tengah di Sidang Umum PBB juga disampaikan oleh Gerald Ford pada tahun 1974 di Sidang Umum PBB ke-29. Presiden Ford pada kesempatan tersebut menyatakan mengenai posisi AS dalam mendorong intervensi di Timur Tengah. AS terus mendorong PBB sebagai badan internasional untuk terus melakukan intervensi di kawasan tersebut. Presiden Ford juga menyatakan bahwa AS akan terus mengkonstruksi, menginovasi, dan bersikap responsif terhadap keputusan-keputusan PBB di kawasan itu.

*“That is the course the United States has chosen for itself. On behalf of the American people, I renew these basic pledges to you today:*

*.....We will strive to heal old wounds, reopened in recent conflicts in Cyprus, the Middle East, and in Indochina. Peace cannot be imposed from without, but we will do whatever is within our capacity to help achieve it.”<sup>5</sup>*

*....And at this point I wish to pay tribute on behalf of the American people to the 37 members of the United Nations peacekeeping forces who have given their lives in the Middle East and in Cyprus in the past 10 months, and I convey our deepest sympathies to their loved ones.*

*Let the quality of our response measure up to the magnitude of the challenge that we face. I pledge to you that America will continue to be constructive, innovative, and responsive to the work of this great body.”<sup>6</sup>*

Presiden Ford pada sidang tersebut menyatakan bahwa AS akan melibatkan diri di kawasan Timur Tengah dan Indochina dalam upaya kemanusiaan. Ia juga menyatakan bahwa AS akan terus secara konstruktif, inovatif dan responsif mendorong PBB sebagai badan internasional untuk mewujudkan kepentingan resolusi konflik di kawasan itu.

Pernyataan mengenai *interest* AS di Timur Tengah di Sidang Umum PBB tidak hanya disampaikan oleh mantan Presiden Richard Nixon dan Gerald Ford

---

<sup>5</sup> US Department of State: Diplomacy In Action. 1974. *Address by President Gerald Ford to The UN General Assembly*. Dalam <http://www.state.gov/p/io/potusunga/207301.htm>. Diakses 2 Mei 2015.

<sup>6</sup> *Ibid.*

akan tetapi juga dinyatakan oleh presiden AS yang lainnya termasuk Ronald Reagan pada masa pemerintahannya. Pada Sidang Umum PBB ke-39 di tanggal 24 September 1984 Presiden Ronald Reagan menyampaikan kebijakan AS di Timur Tengah.

*“The Middle East has known more than its share of tragedy and conflict for decades, and the United States has been actively involved in peace diplomacy for just as long. We consider ourselves a full partner in the quest for peace. The record of the 11 years since the October war shows that much can be achieved through negotiations; it also shows that the road is long and hard.*

*Two years ago, I proposed a fresh start toward a negotiated solution to the Arab-Israeli conflict. My initiative of September 1st, 1982, contains a set of positions that can serve as a basis for a just and lasting peace. That initiative remains a realistic and workable approach, and I am committed to it as firmly as on the day I announced it. And the foundation stone of this effort remains Security Council Resolution 242, which in turn was incorporated in all its parts in the Camp David accords.”<sup>7</sup>*

Pada Sidang Umum PBB ke-39 tersebut Presiden Ronald Reagan mengatakan bahwa AS telah lama terlibat dalam kawasan ini. Upaya penciptaan perdamaian disebut-sebut sebagai misi AS sejak lama di Timur Tengah. Salah satu upaya konkret di masa pemerintahannya adalah pengajuan negosiasi konflik Arab-Israel yang tentunya bertujuan untuk memperjuangkan Israel di kawasan tersebut.

Sementara itu pada Sidang Umum PBB yang ke-53 tahun 1998, apa yang disampaikan oleh Bill Clinton dalam pidatonya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan presiden terdahulu yaitu mengenai upaya AS dalam intervensi kawasan Timur Tengah. Upaya intervensi AS tersebut diungkapkan di Sidang Umum sebagai kepentingan akan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa Sidang Umum telah menjadi forum untuk AS secara terbuka kepada dunia internasional, sebelum akhirnya dieksekusi melalui kebijakan di lapangan.

*“Often, in my own experience, I have seen where peace is making progress, terror is a desperate act to turn back the tide of history. The*

---

<sup>7</sup> US Department of State: Diplomacy In Action. 1984. *Address by President Ronald Reagan to The UN General Assembly*. Dalam <http://www.state.gov/p/io/potusunga/207336.htm>. Diakses 2 Mei 2015.

*Omagh bombing came as peace was succeeding in Northern Ireland. In the Middle East, whenever we get close to another step toward peace, its enemies respond with terror. We must not let this stall our momentum. The bridging of ancient hatreds is, after all, a leap of faith, a break with the past, and thus a frightening threat to those who cannot let go of their own hatred. Because they fear the future, in these cases, terrorists seek to blow the peacemakers back into the past.*

.....

*As I talk to Muslim leaders in my country and around the world, I see again that we share the same hopes and aspirations: to live in peace and security, to provide for our children, to follow the faith of our choosing, to build a better life than our parents knew, and pass on brighter possibilities to our own children. Of course, we are not identical. There are important differences that cross race and culture and religion which demand understanding and deserve respect.”<sup>8</sup>*

Timur Tengah tak pernah tidak pernah dilewatkan dalam misi intervensi kemanusiaan AS, seperti yang disampaikan mantan Presiden Bill Clinton dalam Sidang Umum ke-53 tersebut. Pada saat itu intervensi kemanusiaan lebih familiar disebut sebagai upaya pencegahan teror dari musuh. Selain itu dukungan pada aksi pencegahan teror itu juga tidak hanya diharapkan datang dari negara-negara sekutu AS tetapi juga negara muslim.

Beberapa bagian dari narasi pidato presiden AS dari era pemerintahan Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan dan Bill Clinton mengenai kebijakan AS di Timur Tengah di Sidang Umum PBB tersebut menunjukkan pentingnya forum Sidang Umum PBB tersebut bagi AS dalam tujuan mencari dukungan internasional atas intervensinya ke kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan forum Sidang Umum PBB dihadiri oleh kepala pemerintahan seluruh negara anggota PBB. Sidang Umum tersebut merupakan forum tertinggi dalam pertemuan internasional dan menghasilkan keputusan-keputusan penting dari isu vital internasional. Hal ini akan memudahkan AS dalam menyebarkan pengaruh dan dalam upaya mendapatkan dukungan negara-negara di dunia. Persetujuan secara konsensus mengenai ide intervensi kemanusiaan ke Timur Tengah tentu akan lebih mudah didapatkan melalui Sidang Umum PBB. Selanjutnya AS akan

---

<sup>8</sup> US Department of State: Diplomacy In Action. 1974. *Address by President Bill Clinton to The UN General Assembly*. Dalam <http://www.state.gov/p/io/potusunga/207552.htm>. Diakses 2 Mei 2015.



lebih mudah pula dalam mencapai kepentingannya di kawasan itu. Sementara itu pidato Presiden Obama di Sidang Umum PBB akan dianalisis secara komperhensif dalam penelitian ini pada Bab III dan IV.

### 2.3 Barack Obama & Visi Baru AS di Timur Tengah

Sebelum menjabarkan mengenai visi baru AS dalam pidato Obama di Sidang Umum PBB, penulis terlebih dahulu akan menjabarkan mengenai fungsi majelis umum PBB sebagai tempat dibacakannya pidato tersebut. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*General Assembly*) didirikan pada tahun 1945 di bawah Piagam PBB. Majelis Umum merupakan satu dari enam badan utama PBB selain dari Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat (Sekretaris Jenderal). Majelis Umum menempati posisi sentral sebagai musyawarah kepala dan badan perwakilan PBB yang terdiri dari semua 193 anggota. Majelis Umum PBB ini menyediakan forum yang unik dalam diskusi multilateral yang membahas isu-isu internasional yang tercakup dalam Piagam. Majelis Umum PBB ini juga memainkan peran penting dalam proses penetapan standar dan kodifikasi hukum internasional. Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan secara intensif dan reguler dari bulan September sampai Desember setiap tahunnya dan juga mengadakan pertemuan di waktu yang lain sesuai yang diperlukan.<sup>9</sup>

Salah satu forum PBB yang sangat besar dan digunakan oleh Presiden Obama untuk memperluas pengaruh AS melalui institusi ini adalah Sidang Umum. Sidang ini menjadi forum penting bagi Obama karena pada saat Sidang Umum AS mendapat kesempatan untuk menyampaikan agendanya berkaitan isu internasional. Obama juga menggunakan forum ini untuk menyampaikan visinya mengenai Timur Tengah. Obama menggunakan kesempatan itu untuk mempengaruhi para pemegang kebijakan luar negeri setiap negara. Pertemuan ini penting sebab menyatukan para pemimpin dan menteri senior dari seluruh 193 negara anggota PBB. Sidang ini dihadiri seluruh negara anggota dan bertemu

---

<sup>9</sup> United Nations. Tanpa tahun. *General Assembly of the United Nations*. Dalam <http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml>. Diakses 1 Maret 2015.

setiap tahun di bawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang terpilih. Presiden Sidang Majelis Umum dipilih untuk bertugas sebagai pimpinan selama sidang. Masa jabatan Presiden Sidang Majelis Umum PBB adalah selama satu kali masa persidangan.<sup>10</sup> Indonesia pernah mendapatkan kehormatan untuk menjabat sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di tahun 1971. Kehormatan tersebut diberikan kepada Adam Malik, saat itu menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia.<sup>11</sup> Selain Sidang Umum terdapat sidang-sidang lain yang diselenggarakan Majelis Umum, misalnya Sidang Pleno dan Sidang Istimewa.

Sidang Majelis Umum PBB berlangsung dari tanggal 24 September sampai dengan 4 Oktober 2013 bertema *The Post-2015 Development Agenda: Setting the Stage!* Selama sesi Sidang Umum ke-68 tersebut Majelis Umum PBB memutuskan untuk meluncurkan sebuah proses negoisasi antar pemerintah negara-negara yang bertujuan untuk membangun konsensus terhadap adopsi agenda pembangunan pasca 2015. Tema atau agenda sidang ini akan diteruskan di sidang ke-69 di tahun 2015. Pada pertemuan ke-68 tanggal 24 September 2013, John Ashe dari Antigua Barbuda menjadi Presiden terpilih untuk Sidang Umum PBB.<sup>12</sup> Pada kesempatan itu Presiden Obama sebagai perwakilan AS.

Presiden Obama menggunakan kesempatan di Sidang Majelis Umum untuk membahas visi AS mengenai isu intervensi ke Timur Tengah. Presiden Obama menggunakan kesempatan itu karena sebagai presiden dirinya mengerti bahwa Majelis Umum PBB selain memiliki fungsi yang signifikan. Majelis Umum PBB memiliki kekuasaan untuk menyetujui anggaran PBB, mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, juga mengatur masalah pelucutan senjata. Sidang Umum PBB juga memiliki fungsi sebagai forum untuk mendiskusikan pertanyaan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional, kecuali sengketa atau situasi tersebut sedang dibahas oleh Dewan Keamanan, dan membuat rekomendasi mengenai hal tersebut. Selain itu memprakarsai diadakannya pengkajian dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Wikipedia. 2015. *Adam Malik*. Dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Adam\\_Malik](http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Malik). Diakses 1 Maret 2015

<sup>12</sup> *Ibid*

membuat rekomendasi untuk penyelesaian damai setiap situasi yang mungkin merusak hubungan persahabatan antar bangsa, mempertimbangkan laporan dari Dewan Keamanan dan organ PBB lainnya.<sup>13</sup> Forum ini adalah kesempatan besar untuk AS meluncurkan agendanya.

Salah satu fungsi dari Sidang Umum seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai pertemuan kepala negara seluruh anggota PBB oleh karena itu Obama merasa perlu untuk menyampaikan visi barunya di Timur Tengah. Melalui Sidang Umum PBB, Obama berusaha mendapatkan dukungan dari mayoritas negara di dunia untuk dapat melakukan intervensi di Timur Tengah. Pidato Obama di Sidang Umum PBB merupakan salah satu upaya AS mencapai kepentingannya menghegemoni Timur Tengah. Sidang Umum menjadi *event* strategis sebab dihadiri oleh seluruh anggota PBB.

Pada kesempatan tersebut Presiden Barack Obama memberikan pandangannya mengenai fokus utama dan peran AS dalam penyelesaian konflik internasional. Di Sidang Umum PBB tersebut Obama menegaskan bahwa Timur Tengah akan menjadititik fokusdarikebijakan luar negeri AS untuk jangka panjang. Fokus utamanya adalah upaya-upaya baru terhadap resolusi-resolusi mengenai program nuklir Iran, konflik Palestina-Israel dan perang sipil di Suriah.

Pidato Obama di Majelis Umum PBB hampir sepenuhnya fokus terhadap persoalan Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana pergolakan tengah terjadi saat itu. Obama mengatakan bahwa rencana pemerintah AS adalah upaya untuk memudahkan pelibatan pemerintah AS di kawasan tersebut dan selain itu pembangunan porosekonomi kawasan Asia Pasifik yang lebih stabil.

Pada kesempatan tersebut melalui pidatonya Presiden Obama memperkenalkan visi baru AS terhadap Timur Tengah. Pidato Obama dalam kesempatan itu disebut-sebut sebagai politik luar negeri Obama yang paling signifikan dari kebijakannya selama menjabat sebagai presiden.

*President Obama re-introduced his New Middle East vision during his September 24, 2013 speech at the UN General Assembly: "Let me take this opportunity to outline what has been the US policy toward the*

---

<sup>13</sup> *Ibid*

*Middle East and North Africa, and what will be my policy during the remainder of my presidency....*”<sup>14</sup>

Dalam pidato tersebut, Obama menyatakan bahwa visi baru Amerika Serikat kedepan adalah fokus pada perkembangan nuklir Iran dan konflik Israel-Palestina. Dalam naskah pidato Presiden Obama, visi baru AS di Timur Tengah tersebut adalah upaya intervensi kemanusiaan mengenai isu-isu tersebut. Selain itu pembahasan mengenai Syiria juga dimasukkan dalam pidato tersebut. Visi baru Obama mencakup banyak isu, hampir semua masalah yang ada di kawasan.

Visi baru Obama adalah ide keterlibatan AS di kawasan ini yang rencananya akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Pembahasan mengenai visi baru AS dalam sidang Umum PBB merupakan upaya AS mendapatkan dukungan internasional. Presiden Obama mengharapkan dukungan negara-negara melalui kerjasama dalam intervensi kemanusiaan. Upaya pelibatan diri AS di Timur Tengah yang dikatakan sebagai visi baru AS tentunya tidak terlepas dari upaya hegemoni atas minyak di kawasan tersebut. Hal ini akan dianalisis secara komperhensif pada bab berikutnya.

#### **2.4 Mandat Intervensi Kemanusiaan & Peranan PBB**

Secara umum, istilah mandat dimaksudkan sebagai suatu *an order or command*.<sup>15</sup> Mandat merupakan dasar hukum dilakukannya intervensi kemanusiaan. Mandat sebagai suatu *description of the missions tasks* yaitu deskripsi mengenai tugas-tugas suatu misi, tertulis atau tertuang dalam suatu resolusi dan atau perjanjian internasional maupun regional.<sup>16</sup>

Penggunaan istilah mandat dalam kajian intervensi kemanusiaan berkaitan dengan suatu perintah untuk melakukan tindakan intervensi kemanusiaan. Perintah tersebut dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-bangsa. PBB mengeluarkan mandat dilakukannya intervensi

---

<sup>14</sup> Yoram Etinger. 2013. *President Obama's US Speech – New or Old Middle East?*. Dalam <http://www.aim.org/guest-column/president-obamas-un-speech-new-or-old-middle-east/>. Diakses 15 Maret 2015..

<sup>15</sup> Russel, Geddes & Grosset. 1990. *Webster's New Dictionary and Thesaurus*. Dalam Rina Dewi Ratih. 2003. *Benturan Intervensi Terhadap Bantuan Kemanusiaan di Darfur*. Universitas Indonesia: Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional.

<sup>16</sup> *Ibid*

kemanusiaan didasarkan pada fungsinya sebagai organisasi internasional yang memiliki kewajiban memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Mandat intervensi kemanusiaan ini diatur dalam Piagam PBB.

PBB sebagai organisasi internasional yang diberi legitimasi mengorganisasikan keamanan bersama negara-negara di dunia, pada tahun 1950 melalui Majelis Umum, PBB telah mengesahkan suatu resolusi tentang *Uniting for Peace*. Di dalam resolusi tersebut terdapat lima ketentuan penting, yaitu:

- a. Suatu ketentuan bahwa Majelis Umum PBB dapat bersidang dalam waktu 24 jam. Dewan Keamanan dihalangi melalui veto untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya bagi keamanan dan perdamaian internasional.
- b. Suatu ketentuan, bahwa dalam kasus-kasus tersebut, Majelis Umum dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi pada negara-negara anggota untuk melakukan tindakan bersama, termasuk penggunaan angkatan bersenjata.
- c. Sebuah rekomendasi, bahwa tiap negara anggota memelihara dalam angkatan bersenjata nasionalnya kesatuan-kesatuan yang secara cepat dapat dipakau untuk melakukan tugas sebagai pasukan PBB.
- d. Pembentukan komisi pengawas perdamaian untuk mengamankan dan melaporkan di wilayah manapun ada ketegangan internasional.
- e. Penciptaan komite tindak bersama untuk mempelajari dan melaporkan tentang cara dan sarana memperoleh perdamaian dan keamanan internasional menurut Piagam PBB.

Persoalan yang muncul berkaitan mandat PBB yang dibebankan kepada negara-negara di Dewan Keamanan pada kenyataannya tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu pula dengan pelaksanaan mandat dalam intervensi kemanusiaan. Pelaksanaan intervensi kemanusiaan pada kenyataannya menimbulkan benturan antara norma-norma dan pelakunya. Permasalahan serius tersebut berkenaan dengan benturan antara ketentuan dengan pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang secara signifikan memiliki kesenjangan antara evolusi yang cepat dari tanggungjawab untuk melindungi (*responsibility to*

*protect*)<sup>17</sup>, yaitu dari sisi normatif dengan sisi operasionalnya. Kemampuan masyarakat internasional dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas perlindungan penduduk sipil secara efektif. Hal inilah yang menjadi suatu pertanyaan. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana aktualisasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang sarat dengan permasalahan.

Mandat intervensi kemanusiaan yang telah dikeluarkan oleh PBB secara teoritis yang pada awalnya telah menimbulkan perdebatan dari kalangan ilmuwan dan praktisi hukum serta hubungan internasional, dalam pelaksanaannya pun menimbulkan benturan-benturan. Contoh benturan yang terjadi adalah tidak adanya persetujuan dari negara yang diintervensi sehingga kedatangan pasukan perdamaian justru menimbulkan konflik baru di lapangan. Hal ini disebabkan intervensi kemanusiaan oleh sikap masyarakat negara yang menjadi sasaran dari suatu pemberlakuan mandat intervensi kemanusiaan yang menolak serta kurangnya koordinasi pelaksanaan misi intervensi kemanusiaan itu oleh kelompok yang seringkali disebut sebagai pasukan penjaga perdamaian.

Legalitas intervensi didapatkan ketika telah memenuhi tiga hal. Pertama, intervensi tersebut merupakan mandat dari insitusi internasional, yaitu PBB. Kedua, atas permintaan representasi sah negara yang akan diintervensi. Ketiga, alasan kemanusiaan. Intervensi dilaksanakan dengan tujuan penyelamatan kehidupan masyarakat suatu negara yang mengalami kekerasan yang dilakukan pemerintah atau pun pemberontak atau bisa juga akibat dari anarki di internal negara tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Responsibility to Protect* adalah sebuah prinsip di dalam hubungan internasional yang memiliki tujuan mencegah tindakan pemusnahan masal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari empat kejahatan yang sudah disebutkan. Selain itu, komunitas internasional juga memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam upaya menjalankan tugasnya melindungi rakyat tersebut. Prinsip ini didukung oleh komunitas internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB tahun 2005. Pada KTT tersebut, negara-negara di dunia berjanji untuk menjunjung prinsip *Responsibility to Protect* agar negara-negara di dunia tidak mengalami lagi tragedi kemanusiaan. Lihat *Responsibility to Protect* dalam [www.r2pasiapacific.org/docs/.../R2P\\_basic\\_info\\_Bahasa](http://www.r2pasiapacific.org/docs/.../R2P_basic_info_Bahasa). Diakses 10 April 2015.

<sup>18</sup> Michael Walzer. 1977. *Intervention: Just and Unjust War*. New York: Basic Books. Hal 86.

Implementasi intervensi kemanusiaan di Timur Tengah yang tidak mendapatkan mandat PBB salah satu contohnya adalah intervensi NATO ke Libya. Libya tidak pernah menunjuk representasi negaranya untuk memberikan informasi atau menyatakan kepada PBB akan kesediaan negaranya untuk diintervensi. Dengan demikian intervensi kemanusiaan ke Libya tidak mendapatkan justifikasinya. Oleh karena tidak terpenuhinya mandat dan permohonan negara untuk intervensi tersebut membuat intervensi kemanusiaan di Libya tidak sah. Hal berbeda terjadi di Mali, bahwa representasi dari pemerintah Mali meminta bantuan kepada pemerintah Prancis untuk mengatasi pemberontakan di Mali Utara.<sup>19</sup> Jadi, dalam intervensi kemanusiaan, jika suatu negara tetap tidak menginginkan adanya campur tangan dari pihak lain maka intervensi tersebut ilegal atau tidak sah untuk dilakukan, meskipun telah mendapatkan mandat dari PBB.

## 2.5 Isu Moral dalam Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*)

Intervensi kemanusiaan pada dasarnya diatur oleh PBB bertujuan untuk menghormati hak asasi manusia. Komitmen ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB. Sejak 1945 bersamaan dengan lahirnya konvensi mengenai pelarangan genosida, deklarasi HAM universal, maka tindakan kesewenang-wenangan negara terhadap warganya dibatasi. Batas teritorial menjadi tidak berarti ketika sudah menyangkut dengan upaya pelaksanaan dan perlindungan HAM.<sup>20</sup>

Intervensi kemanusiaan dianggap telah mendapat legalisasi PBB dengan adanya *Universal Declaration of Human Right*. Pasal 28 *Universal Declaration of Human Right* menyatakan bahwa setiap manusia berhak melakukan setiap hak-hak yang dimilikinya, dan tidak ada satu pun otoritas yang dapat melanggar semua hak-hak tersebut. Di dalam pasal 30 juga dinyatakan bahwa negara tidak berhak

---

<sup>19</sup> Aljazeera. 2013. *Mali Seeks France Help Against Rebel Advances*. Dalam <http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/01/2013111454291579.html>. Diakses 10 April 2015.

<sup>20</sup> Vandi Syahputra, dkk. Tanpa tahun. *International Law Perceptive Of Humanitarian Intervention Implementation By The United Nation Security Council In an Internal Conflict Of State*. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. Hal 11.

melakukan penafsiran terhadap deklarasi ini untuk memberikan negara, kelompok atau seseorang hak untuk melakukan perusakan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah dijamin dalam deklarasi ini.<sup>21</sup>

Masalah dalam intervensi kemanusiaan muncul ketika pemerintah sebuah negara memutuskan menggunakan kekuatan senjata dalam menghadapi rakyatnya sendiri, sementara itu situasi di negara itu kolaps dan terjadi pelanggaran terhadap hukum.<sup>22</sup> Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia saat ini telah berkembang sehingga menjadi masalah internasional.

Legitimasi dalam menggunakan kekuatan senjata untuk mencegah pelanggaran HAM di wilayah yang diintervensi tersebut yang menjadi perdebatan. R.J. Vincent mengatakan, jika sebuah negara secara sistematis dan masif melanggar hak asasi manusia, masyarakat internasional memiliki tugas untuk melakukan intervensi kemanusiaan.<sup>23</sup> Koffi Annan selaku Sekretaris Jendral PBB periode 1997 sampai dengan 2006 juga memberikan pernyataan yang mendukung intervensi kemanusiaan:

*“... If humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human right that offend every percept of our common humanity?”<sup>24</sup>*

Pernyataan Koffi Annan tersebut dapat dipahami bahwa kemanusiaan adalah prioritas dan tujuan dari suatu intervensi. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di suatu negara kemudian dianggap sebagai tanggung jawab dunia internasional. Negara-negara yang tergabung dalam PBB memiliki tanggung jawab menghentikan tragedi tersebut.

Selain penggunaan kekuatan senjata dalam intervensi kemanusiaan. Perdebatan paling krusial dalam *humanitarian intervention* adalah intervensi kemanusiaan tersebut seringkali diwarnai konflik kepentingan dari negara-negara

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Nicholas J. Wheeler. 2000. *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society*. New York: Oxford University Press. Hlm. 27.

<sup>23</sup> R. J. Vincent. 1986. *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 127.

<sup>24</sup> Rudi Guraizu. 2008. *Is humanitarian military intervention in the affairs of another state ever justified?*. Middlesex University School of Health and Social Sciences. Hal 2.



tertentu sehingga seringkali intervensi kemanusiaan itu dilakukan tanpa mandat dan legalitas yang jelas. Akibatnya, intervensi dipandang sebagai hal ilegal dan menjadi bukti arogansi kekuatan negara-negara besar yang menyalahi kedaulatan negara-negara lemah. Berkaitan dengan legalitas intervensi tersebut, Libya sebagai negara yang juga terkena dampak dari adanya *Arab Spring* juga mengalami intervensi tanpa adanya mandat yang jelas. Hal ini akan dijelaskan pada sub bab berikut.

## **2.6 Intervensi Kemanusiaan di Timur Tengah: Kasus Libya dan Suriah.**

Intervensi di Libya dan Suriah juga merupakan dampak dari Arab Spring (*Arab Spring Effect*). Dinamakan Arab Spring karena fenomena ini terjadi di jazirah Arab dan dimulai pada musim semi.<sup>25</sup> *Arab Spring* merujuk pada suatu keadaan dimana pemerintah tidak lagi mendapatkan kedaulatan dari rakyat. Hal ini ditandai dengan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Rakyat kemudian berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah dan menuntut adanya pemerintahan baru yang dianggap lebih demokratis.<sup>26</sup> *Arab Spring* ini dimulai dari Tunisia pada bulan Desember 2010. Lalu gerakan revolusi ini menyebar ke negara-negara di sekitarnya termasuk Mesir, Libya dan Suriah karena adanya perpindahan informasi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam sub bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai intervensi kemanusiaan yang dilakukan di Timur Tengah yaitu Libya dan Suriah sebagai salah satu negara yang juga terkena dampak *Arab Spring*. Hal ini untuk memberikan gambaran lebih jelas bagaimana intervensi oleh AS tersebut dalam praktiknya dilakukan.

### **2.6.1 Intervensi Kemanusiaan di Libya**

Libya adalah salah satu negara yang pernah mengalami intervensi kemanusiaan. Intervensi di Libya dilakukan oleh NATO (. Perdebatan yang muncul mengenai intervensi oleh NATO di Libya adalah tidak adanya mandat internasional sehingga legalitasnya dipertanyakan.

---

<sup>25</sup> Bagus Novandi. A. 2013. *Dampa Fenomena Arab Spring Terhadap Pemerintahan Lebanon*. Universitas Riau.

<sup>26</sup> *Ibid*

Peristiwa tragedi kemanusiaan tahun 2011 di Libya merupakan rangkaian dari fenomena *Arab Spring* yang awalnya terjadi lebih dahulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir. Aksi demonstrasi yang terjadi secara masif terhadap rezim Kolonel Muammar Gaddafi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menginginkan perubahan menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Demi mempertahankan kendalinya kepemimpinan Libya, Gaddafi tidak segan mengerahkan kekuatan militer dalam menghadapi para demonstran. Akibat dari tindakan tersebut, penduduk sipil Libya yang akhirnya menjadi korban. Hal itu kemudian dijadikan dasar oleh PBB untuk melakukan tindakan intervensi. Dewan Keamanan PBB menanggapi peristiwa itu dengan mengeluarkan Resolusi No. 1970 yang dilanjutkan dengan mengeluarkan Resolusi No. 1973. Resolusi 1973 inilah yang kemudian dijadikan legitimasi NATO untuk melakukan intervensi ke Libya, lebih tepatnya mereka sendiri mengatasnamakan tindakan intervensi itu sebagai intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*).<sup>27</sup>

Perubahan di Libya karena masuknya demokrasi diawali dari kejadian demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga Libya di Benghazi pada tanggal 15 Februari 2011. Demonstrasi ini dipicu oleh penahanan seorang pengacara yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah Libya.<sup>28</sup> Penahanan ini mengundang unjuk rasa dari masyarakat dan terus berlanjut. Unjuk rasa ini berkembang menjadi bentuk protes terhadap pemerintah mereka secara umum dan terhadap pemimpin mereka yang telah berkuasa selama lebih dari 41 tahun, Kolonel Moammar Gaddafi.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> The International Institute For Strategic Studies (IISS). 2012. *Libya Assets and the Question of Sovereignty*. Dalam <https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2012-23ab/survival--global-politics-and-strategy-april-may-2012-1b13/54-2-05-bellodi-c678>. Diakses 7 Mei 2015.

<sup>28</sup> BBC Indonesia. 2011. *Unjuk Rasa Mulai Muncul di Libya*. Dalam [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110216\\_libyaunrest.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110216_libyaunrest.shtml). Diakses 7 Mei 2015.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Peningkatan jumlah masa dalam protes tersebut mengakibatkan kekhawatiran Gaddafi sehingga ia memerintahkan pasukan untuk menghalau masa yang protes tersebut. Protes pada awalnya berlangsung damai, akan tetapi karena turunnya pasukan Gaddafi protes berubah menjadi kerusuhan. Tidak hanya menggunakan kekuatan militer, Gaddafi juga berusaha membatasi masa yang protes dengan melakukan sensor dan melakukan pemutusan jalur komunikasi. Ketegangan kemudian meningkat menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata. *The Economist* tanggal 22 Februari memberitakan protes di Libya sebagai pemberontakan untuk merebut kembali Libya dari tangan otokrat yang paling lama memimpin di dunia.<sup>30</sup>

Pemberontak pada akhirnya mendirikan pemerintahannya sendiri yang dinamakan *Libyan National Council* atau *National Transitional Council* (NTC) pada tanggal 27 Februari 2011. NTC tersebut dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil, dan berpusat di Benghazi kota yang terletak di bagian timur Libya.<sup>31</sup> Oleh karena Gaddafi merasa semakin terancam oleh pemberontakan tersebut, ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menembak mati siapa saja yang melawannya. Hingga akhir Februari dilaporkan angka kematian melawan pemberontakan tersebut hampir mencapai 1000 jiwa.<sup>32</sup> *International Criminal Court* (ICC) kemudian memberi peringatan terhadap Gaddafi atas tragedi kemanusiaan tersebut. *International Federations for Human Rights* (FIDH) menyimpulkan bahwa Gaddafi telah melakukan strategi bumi hangus. Bagaimanapun Gaddafi telah menghilangkan nyawa sebagian besar warga Libya yang melawan rezim yang kemudian secara sistematis juga menindas warga sipil. Tindakan Gaddafi tersebut

---

<sup>30</sup> The Economist. 2011. *Protests in Libya: Blood In The Street*. Dalam [http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/02/protests\\_libya](http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/02/protests_libya). Diakses 7 Mei 2015.

<sup>31</sup> The International Institute For Strategic Studies (IISS). *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> BBC News. 2011. *Libya Protests: Pressure mounts on isolated Gaddafi*. Dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12550719>. Diakses 7 Mei 2015.

dikategorikan dalam kejahatan kemanusiaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Statuta Roma ICC.<sup>33</sup>

Dewan Keamanan PBB kemudian menyikapi tindakan pelanggaran terhadap kemanusiaan oleh Gaddafi tersebut. DK PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan 1970 untuk pemberlakuan embargo senjata. Resolusi ini juga berisi pembekuan atas aset Gaddafi dan orang dekatnya, melarang melakukan perjalanan, serta berisi himbauan terhadap dunia internasional untuk memberi bantuan kemanusiaan bagi Libya.<sup>34</sup> Resolusi DK PBB tersebut juga menyerukan kepada Gaddafi untuk diperiksa di ICC, akan tetapi Gaddafi tidak memenuhinya. DK PBB berdasar Piagam PBB Bab VII Pasal 42, kembali mengeluarkan resolusi setelah mendapat desakan Liga Arab. Resolusi 1973 kemudian dikeluarkan, berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, *no-fly zone*<sup>35</sup> (zona larangan terbang) di wilayah Libya, dan pelaksanaan hal-hal yang telah disebutkan di atas dalam Resolusi 1970.<sup>36</sup>

Masalah utama dan yang paling krusial muncul ketika pasukan koalisi yang dipimpin oleh AS, Inggris, dan Prancis pada 19 Maret dini hari melancarkan operasi *Odyssey Dawn*. Pasukan koalisi menyerbu target di pemerintahan Libya dengan alasan menegakkan Resolusi 1970. Lima hari kemudian, kendali misi *humanitarian intervention* di Libya diambil oleh pasukan koalisi NATO yaitu melalui *Operation Unified Protection*. NATO mengambil alih komando pada tanggal 24 Maret untuk operasi laut dan kemudian mengambil alih komando operasi udara di hari berikutnya.

Persoalan terkait legalitas dan intervensi kemanusiaan yang dilakukan pasukan koalisi NATO menjadi perdebatan hingga saat ini baik di ranah hukum internasional dan hubungan internasional. Dalam *The Ethic*

---

<sup>33</sup> International Federations for Human Rights (FIDH). 2011. *Libya: Strategy of Scorched Earth, Desire for widespread and Systematic Elimination*. Dalam <https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/libya/Libya-Strategy-of-scorched-earth>. Diakses 7 Mei 2015.

<sup>34</sup> United Nations Security Council Council Resolution 1970 (2011).

<sup>35</sup> *No-fly zone* adalah zona larangan terbang di wilayah Libya. Hal ini ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Gaddafi melakukan misi pembunuhan dari udara.

<sup>36</sup> United Nations Security Council Council Resolution 1973 (2011).

of *Humanitarian Intervention in Libya* yang diterbitkan jurnal *Ethic dan International Affair*, Pattison menyatakan bahwa situasi di Libya tidak cukup serius untuk dilakukan intervensi.<sup>37</sup> Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tujuan NATO lebih bertujuan untuk menurunkan rezim yang berkuasa, daripada melindungi warga sipil dan melakukan misi kemanusiaan. Hal ini ditunjukkan dari parameter keberhasilan intervensi kemanusiaan yang ditentukan oleh para pemimpin negara koalisi. Mereka berpendapat bahwa keberhasilan intervensi kemanusiaan ditentukan dari turunnya Moamar Gaddafi dari tampuk pemerintahan Libya seperti yang dikatakan oleh beberapa pemimpin negara koalisi seperti AS.<sup>38</sup>

Moammar Gaddafi memang memiliki pengaruh yang sangat besar di Timur Tengah. Gaddafi selain pernah menjadikan Libya sebagai negara pemrakarsa agenda bersatunya negara-negara Arab, tetapi juga mengantarkan Libya sebagai negara berpengaruh dalam konstelasi politik melawan dominasi AS, khususnya di wilayah Timur Tengah. Moammar Gaddafi berhasil menanamkan politik dan pemerintahan anti Barat di dalam negaranya dengan menempuh kebijakan sebagai negara tertutup diawali dengan kebijakan menutup pangkalan militer AS di Libya.<sup>39</sup>

AS kemudian memasukkan Libya dalam daftar negara yang mendukung terorisme internasional. Libya dikaitkan dengan beberapa aksi terorisme internasional seperti pemboman diskotik di Berlin pada tahun 1986, lalu pemboman pesawat Prancis (French Airliner) pada tahun 1989, dan pemboman pesawat Pan Am Flight 103 di Lockerbie, Skotlandia. Libya kemudian berkali-kali menjadi sasaran embargo AS.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> James Pattison. 2011. *The Ethics of Humanitarian Intervention in Libya*. Dalam [https://www.academia.edu/1175180/The\\_Ethics\\_of\\_Humanitarian\\_Intervention\\_in\\_Libya](https://www.academia.edu/1175180/The_Ethics_of_Humanitarian_Intervention_in_Libya). Diakses 7 Mei 2015.

<sup>38</sup> Adul Hadi Adnan. 2008. Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika. CV. Dalam Andi Husnul Hatimah. 2012. *Masa Depan Libya Pasca Pemerintahan Moammar Khadafy*. Skripsi. Universitas Hasanuddin: Makassar. Hal 4.

<sup>39</sup> Khadafy Dalam Panggung Politik Libya. (2011). Dalam Andi Husnul Hatimah. *Loc. Cit.*  
<sup>40</sup> Al Jazeera. 2011. *Country profile: Libya*. Al Jazeera. Dalam <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201141912643168741.html>. Dalam Andi Husnul Khatimah. 2012. *Masa Depan Libya Pasca Pemerintahan Moammar Khadafy*. Skripsi. Universitas Hasanuddin: Makassar. Hal 5.

### 2.6.2 Intervensi Kemanusiaan di Suriah

Selain Libya, negara yang juga terkena dampak dari Arab Spring adalah Suriah. Konflik di Suriah pada awalnya disebabkan oleh sekelompok pemberontak yang melakukan demonstrasi terhadap pemerintah Suriah. Kelompok ini menuntut pengunduran diri Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Kelompok pemberontak ini bersatu dalam organisasi Tentara Pembebasan Suriah.

Demonstrasi oleh kelompok ini dilakukan pada tanggal 26 Januari 2011. Semakin lama demonstrasi berkembang menjadi pemberontakan nasional. Konflik Suriah juga dikatakan lahir dari semangat *Arab Spring* yang juga melanda negara-negara lain sebelumnya, seperti Tunisia, Mesir, Libya di tahun 2009 hingga 2011.<sup>41</sup> Pemberontakan yang terjadi ini intinya adalah penggulingan rezim berkuasa yang dianggap oleh kelompok tersebut tidak demokratis. Ide yang kemudian diaspirasikan kemudian adalah rezim yang ada digantikan dengan pemerintahan yang baru yang dianggap lebih demokratis dan mampu menjamin kesejahteraan.

Negara Suriah merupakan negara yang memberlakukan UU Darurat Militer.<sup>42</sup> Darurat militer ini memberikan kekuasaan yang luas pada militer di Suriah. Oleh karena itu pemerintahan Suriah sering dianggap oleh barat dan masyarakat yang pro demokrasi barat sebagai negara yang tidak demokratis. Pemberlakuan UU Darurat Militer ini sebenarnya masih berkaitan dengan sejarah Suriah di masa lalu. Pemberlakuan darurat militer merupakan kebijakan paling tepat untuk kondisi negara Suriah.

Pemberlakuan darurat militer pada awalnya melihat pertimbangan sejarah negara modern Suriah yang lahir usai Perang Dunia I, yaitu setelah mendapat kemerdekaan dari Prancis tahun 1946. Selama periode 1949

---

<sup>41</sup> Trias Kuncayono. 2012. *Musim Semi di Suriah*. Jakarta: PT Kompas Nusantara. Hlm 247.

<sup>42</sup> BBC. 2011. *Suriah Janjikan Reformasi Politik*. Dalam [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/03/110324\\_syrianpledge.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/03/110324_syrianpledge.shtml). Diakses 15 September 2015.

hingga 1971 Suriah mengalami berbagai goncangan konflik dan kudeta militer. Hal ini terus berlanjut antara periode 1958 hingga 1961. Dalam sejarahnya Suriah juga membentuk perserikataan dengan Mesir yang dinamai RPA (Republik Perserikatan Arab) dan berakhir juga karena adanya kudeta militer. Melihat kudeta yang terus menerus tersebut rezim Suriah kemudian memberlakukan UU Darurat Militer pada tahun 1963 dan masih diberlakukan hingga 2011. Pemberlakuan ini bertujuan pula untuk mencegah konflik dan kudeta di masa mendatang. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa pemberlakuan UU Darurat Militer ini yang kemudian dijadikan alasan oleh barat seperti AS untuk menyebut Suriah sebagai negara yang tidak demokratis.

Pemberontakan yang kemudian muncul di Suriah tahun 2011, mengakibatkan jatuhnya korban sipil. Pertempuran di Suriah telah menewaskan lebih dari 60 ribu pada rentang tahun 2011 hingga 2012.<sup>43</sup> Kondisi korban tewas juga tidak selalu dapat diselidiki secara nyata.<sup>44</sup> Ini dikarenakan situasi rumit di wilayah perang dan juga karena pemerintahan Suriah tidak mengizinkan tim dari PBB memasuki beberapa wilayah di Suriah. Kondisi ini yang kemudian dikatakan menjadi alasan bagi berbagai negara untuk berusaha memberikan bantuan kemanusiaan ke Suriah.

Konflik di Suriah pada hakikatnya merupakan konflik kepentingan yang melibatkan berbagai macam aktor baik *state* atau *non state*. Aktor-aktor internal yang terlibat dalam konflik ini adalah dewan koalisis nsional Suriah, kelompok militan Suriah dan rezim Presiden Assad yang menjadi objek dari protes. Sementara itu kelompok atau aktor eksternal adalah

---

<sup>43</sup> DW. 2013. *Sekitar 60.000 Korban Tewas dalam Perang Suriah*. Dalam <http://www.dw.com/id/sekitar-60000-korban-tewas-dalam-perang-suriah/a-16494039>. Diakses 15 September 2015

<sup>44</sup> *Ibid*

Rusia, Cina, Iran dan AS beserta sekutu yang saling tarik menarik dalam konflik ini.<sup>45</sup>

Jadi, konflik di Suriah yang terjadi sejak Maret 2011 bukan lagi menjadi konflik internal karena banyaknya aktor yang tarik menarik kepentingan di negara itu. Konflik yang terjadi bukan lagi konflik antara rezim Assad dengan oposisi yang kemudian dikaitkan dengan Dewan Nasional Suriah (SNC) akan tetapi terinternasionalisasi dengan adanya keterlibatan aktor-aktor yang telah disebut di atas. Oleh karena itu pula, konflik Suriah berbeda dengan revolusi Arab lainnya, seperti yang terjadi di Mesir dan Libya.

Konflik Suriah melibatkan banyak kepentingan asing yang saling bersinggungan. Gesekan kuat berupa tarik menarik kepentingan ini terjadi antara aktor blok barat yang diwakili AS, Inggris dan Perancis dengan blok timur yang diwakili Rusia dan Cina. Salah satu contoh konkretnya bagaimana blok timur mendukung eksistensi rezim Assad Suriah adalah ketika di rapat Majelis Umum dan Dewan Keamanan, Cina dan Rusia memutuskan memveto<sup>46</sup> pemberlakuan sanksi oleh PBB terhadap Suriah. Di tengah konflik yang terjadi, Rusia juga semakin memperkuat kerjasama militer dengan menyuplai senjata ke negara Suriah.<sup>47</sup>

Demikian tadi adalah contoh-contoh konflik yang ada di Timur Tengah yang disebutkan dalam teks pidato Presiden Obama di Sidang Umum PBB tahun 2013 yang juga menjadi data primer dalam penelitian ini. Peneliti mencoba memberi gambaran terhadap pembaca untuk dapat mengetahui asal mula konflik yang ada di Suriah dan sejarah intervensi AS dan sekutu di Libya sebagai bagian dari peristiwa gelombang besar *Arab Spring*. Selain itu untuk memberi gambaran tentang keterlibatan AS serta sekutu dalam wacana intervensi kemanusiaan di kawasan itu.

---

<sup>45</sup> Adeodatus Primus R. 2014. Intervensi Militer Amerika Serikat Dalam Konflik Politik Di Suriah Tahun 2011. *E-journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2 (3) 775-778. Dalam <http://ejournal.hi.fisip-unmul.org/>. Diakses 15 September 2015

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*



### BAB 3

#### AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH

Setelah mendapatkan gambaran umum objek penelitian pada bab dua maka pada bab tiga ini perlu secara singkat terlebih dahulu penulis membahas mengenai profil Timur Tengah berkaitan dengan intervensi kemanusiaan. Selain itu akan dibahas pula keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah dan kebijakan politik luar negeri AS di Timur Tengah.

##### 3.1 Timur Tengah

Timur Tengah (*Middle East*) dengan segala kompleksitas yang ada menjadi kawasan yang tidak mudah dipahami secara komprehensif oleh para analis maupun pengamat luar negeri. Dalam mendefinisikan istilah “Timur Tengah” belum ditemukan kesepakatan tentang negara-negara mana saja yang masuk dalam kawasan ini. Bahkan dikalangan ahli politik internasional masih terdapat perbedaan mengenai definisi “Timur-Tengah”, juga mengenai bangsa, negara dan kawasan mana yang dapat dimasukkan dalam kategori kawasan “Timur-Tengah”.<sup>1</sup>

Pada abad ke-15 ketika Portugis mencari benua Asia, kawasan ini disebut sebagai *Near East*. Sejak saat itu daerah Mediterania (Laut Tengah) disebut sebagai Timur Dekat (Near East). Istilah *Middle East* muncul pada saat Perang Dunia II. Inggris menggunakan istilah *Middle East* untuk menamakan daerah operasional yang membentang dari Afrika Utara sampai Iran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Terdapat tiga kelompok pendapat atas definisi kawasan Timur-Tengah oleh para ahli politik internasional. Tiga kelompok pendapat tersebut adalah sebagai berikut: 1). Kawasan yang mencakup negara-negara Arab non-Afrika di tambah Iran dan Israel. Pada kelompok pertama Aljazair dan Maroko tidak termasuk. 2) Suatu kawasan yang terdiri dari seluruh negara anggota Liga Arab ditambah Iran, Israel dan Turki. Jadi seluruh negara-negara yang berbahasa dan berbudaya Arab di kawasan Afrika Utara (Aljazair, Maroko, Libya, Mauritania) termasuk dalam wilayah ini. dan definisi berikutnya. 3). Suatu kawasan yang terdiri atas negara-negara seperti pandangan kedua di atas, ditambah Afghanistan, Pakistan dan negara Republik Muslim di Asia Tengah bekas Uni Soviet. Baca M. Riza Sihbudi. 2007. *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-negara Muslim*. Bandung: Mizan. Hal xxi-xxii.

<sup>2</sup> *Ibid*

Disebutkan di beberapa sumber lain bahwa Alfred Thayer Mahan adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah *Middle East*.<sup>3</sup> Ia adalah seorang ahli strategi angkatan laut AS. Pada Tahun 1902, Mahan menciptakan istilah “Timur Tengah” (*Middle East*) yang digunakan dalam artikel *Teluk Persia dan Hubungan Internasional*, diterbitkan September di *National Review*, London. Ia menggunakan istilah ini untuk menyebutkan kawasan di sebelah timur di daerah sekitar gurun bekas Kekaisaran Ottoman. Sebuah kawasan yang juga tak jauh dari daratan Eropa.<sup>4</sup> Penyebutan Timur-Tengah (*Middle East*) pada dasarnya bukan sekadar merujuk pada suatu wilayah geografi, melainkan lebih sebagai suatu konsep geopolitik yang dikonstruksi Barat.

Istilah *Middle East* inilah yang kemudian lebih banyak digunakan di Barat setelah Perang Dunia II. Istilah Timur Tengah (*Middle East*) kemudian banyak digunakan oleh kalangan akademisi dan diplomat di seluruh dunia, menggantikan *Near East*. Secara umum kawasan Timur Tengah dikenal merujuk pada kawasan yang mencakup semenanjung Arabia, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, Iran, dan Mesir.<sup>5</sup>

Timur Tengah mencakup beberapa kelompok suku dan budaya. Di dalamnya terdapat suku Iran, Arab, Yunani, Yahudi, Berber, Assyria, suku Kurdi dan Turki. Bahasa utama yang ada adalah bahasa Persia, Arab, Ibrani, Assyria, Kurdi dan juga bahasa Turki.<sup>6</sup> Berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan agama membuat wilayah ini kaya sekaligus menjadi wilayah yang sensitif. Hal ini disebabkan karena wilayah ini sangat strategis dilihat dari berbagai aspek tersebut. Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah dari segi budaya telah menjadi pusat terjadinya peristiwa dunia. Wilayah ini menjadi tempat kelahiran dan pusat spiritual agama-

---

<sup>3</sup> Adelson, Roger. London and the Invention of the Middle East: Money, Power, and War, 1902-1922. Dalam <http://www.foreignaffairs.com/articles/52385/william-b-quandt/london-and-the-invention-of-the-middle-east-money-power-and-war->. Diakses 15 Februari 2015.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> M. Riza Sihbudi. *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Anonim. 2014. *Middle East*. The Library University of Chicago. Last Updet. Dalam <http://guides.lib.uchicago.edu/mideast> . Diakses 15 Februari 2015.

agama, baik Yahudi, Kristen juga Islam.<sup>7</sup> Dari segi ekonomi, Timur Tengah memiliki cadangan minyak mentah dalam jumlah sangat besar.

Pasca Perang Dunia II, kawasan Timur Tengah mulai dikenal sebagai wilayah yang penuh konflik. George Lenczowski dalam *The Middle East in World Affairs* menggambarkan kehidupan politik di kawasan Timur-Tengah yang bersifat komplotan. Komplotan ini terdiri dari sejumlah negara Barat dan kekuatan politik lokal. Dengan penjelasan lain bahwa Timur Tengah dapat dikatakan sebagai suatu istilah yang lahir dari hasil perkomplotan tersebut.<sup>8</sup>

Timur Tengah adalah salah satu topik bahasan paling menarik dan paling sering dibicarakan di dunia internasional karena keunikan geopolitik dan geostrateginya. Timur Tengah dianggap sebagai kawasan yang paling penting. Negara yang menguasainya akan mendapatkan posisi strategis di dunia internasional.<sup>9</sup>

### 3.1.1 Geografis

Dalam penelitian ini Negara-negara yang masuk dalam kawasan Timur Tengah adalah Afghanistan, Bahrain, Mesir, Iran, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Palestina, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Uni Emirat Arab, dan Yaman juga Turki. Lalu beberapa negara Afrika Utara juga diikutkan dalam kawasan ini, seperti Libya, Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Mauritania. Negara-negara yang disebut di atas merupakan Timur Tengah dalam definisi kelompok kedua yang secara umum dikenal secara internasional.<sup>10</sup>

Letak geografis Timur Tengah berada di tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Timur Tengah secara otomatis menjadi kawasan yang

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Ismah Tita Ruslin. Memetaan Konflik Di Timur Tengah: Tinjauan Dari Geografi Politik. *Jurnal Politik Profetik*. Volume 1 No. 1 Tahun 2013. Filsafat & Politik UIN Alauddin: Makasar.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> M. RizaSihbudi. *Loc. Cit.*

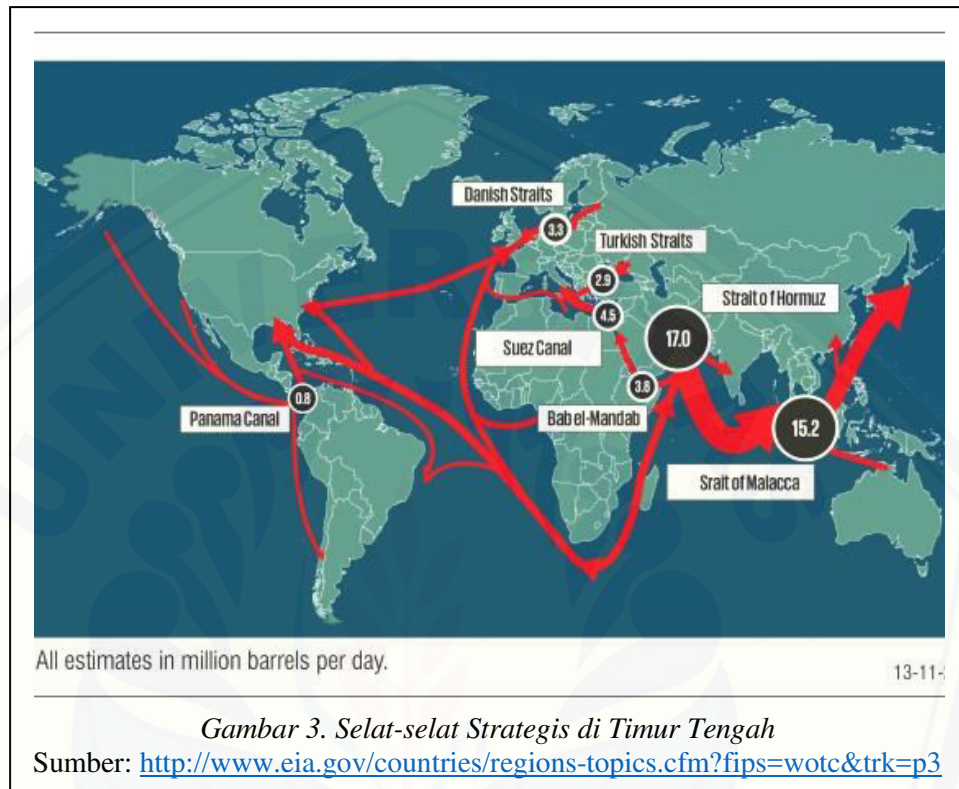
menghubungkan tiga benua tersebut. Selain itu negara-negara Timur Tengah memiliki laut dan selat yang letaknya strategis.<sup>11</sup>



- Laut Tengah (Mediterrania) yang memisahkan daratan Afrika dan Eropa terletak di sepanjang perbatasan Mesir, Libya dan Tunisia.
- Laut Merah di antara Afrika dan Arabia, yaitu perbatasan Arab Saudi dan Sudan.
- Laut Arab, terletak di bagian barat laut Samudra Hindia, yaitu antara Arabia dan India.
- Laut Mati yang terletak di perbatasan Yordania dan Israel
- Laut Kaspia, yang berbatasan dengan Iran.
- Laut Hitam, terdapat di Turki
- Laut Aegean, terletak di perbatasan Turki dan Yunani

<sup>11</sup> Ismah Tita Ruslin. *Op. Cit.* Hal 49.

Selain memiliki laut-laut yang strategis, kawasan ini juga memiliki selat-selat yang penting untuk jalur perdagangan khususnya perdagangan minyak.



a. Selat Gibraltartar

Selat ini menjadi pemisah antara Afrika Utara dengan Eropa, tepatnya terletak antara Maroko dan Spanyol. Selat Gibraltar termasuk selat tersibuk di dunia karena menjadi jalan pendek untuk kapal-kapal dari Samudera Atlantik (Eropa Amerika) ke Asia.

b. Selat Bab-Al Mandap

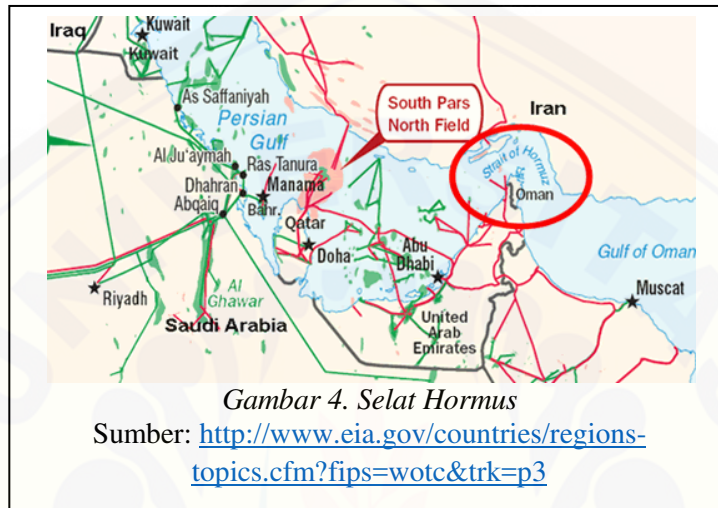
Selat ini berada di ujung Laut Merah, yaitu di pesisir Yaman. Selat ini dilewati kapal-kapal yang menempuh jalur Terusan Suez – Laut Merah – Samudra Hindia.

c. Selat Turki

Selat ini merupakan tempat transit (perdagangan) dari Samudra Atlantik ke Asia serta menjadi satu-satunya jalur perdagangan Rusia dari Laut Hitam ke Laut Tengah. Pentingnya perdagangan di selat ini menjadi

salah satu pertimbangan utama NATO memasukkan Turki sebagai anggota. Di masa Perang Dingin, selat Turki memiliki sejarah penting bagi Uni Soviet sebab menjadi basis kontrol terhadap kekuatan AS, yang saat itu disebut sebagai politik air hangat<sup>12</sup>.

d. Selat Hormuz



Selat Hormuz terletak di Iran bagian utara dan Oman di sebelah selatan. Lalu lintas di selat ini sangat padat, meskipun selat ini hanya memiliki lebar 6,4 kilometer. Selat ini menjadi jalur kapal pengangkut minyak dari dan ke Teluk Persia, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab.<sup>13</sup> Selat Hormuz adalah cek poin yang paling penting di dunia dengan aliran minyak 17 juta barel per hari pada tahun 2013, yaitu sekitar 30% dari semua minyak yang diperdagangkan melalui jalur laut. Diperkirakan bahwa lebih dari 85% dari minyak mentah yang bergerak melalui titik ini pergi ke pasar Asia. Selain itu selat ini juga merupakan wilayah strategis bagi keamanan jalur minyak AS.<sup>14</sup>

e. Terusan Suez

<sup>12</sup>

*Ibid*

<sup>13</sup>

*Ibid*

<sup>14</sup>

U.S. Energy Information Administration (EIA). *World Oil Transit Chokepoints*. Dalam <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3>. Diakses 1 April 2015.

Terusan Suez yang terletak di Mesir dan menghubungkan Laut Merah dan Teluk Suez dengan Laut Mediterania.<sup>15</sup> Terusan ini merupakan wilayah perairan vital bagi pelayaran dari Laut Tengah ke Afrika dan Asia. Seluruh pelayaran dari Eropa ke Asia melewati terusan ini. Tanpa Terusan Suez kapal dari Eropa yang menuju Asia harus mengelilingi Afrika yang jaraknya dua kali lebih jauh.<sup>16</sup>

Kondisi geografis dan jalur laut ini juga sangat penting bagi perdagangan sumber daya minyak Timur Tengah. Ekspor minyak dari negara-negara Teluk Persia (Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Iran, Oman, Qatar, dan Bahrain) menyumbang 79% dari arus minyak ke utara Terusan Suez. Importir terbesar minyak ke utara mengalir melalui Terusan Suez pada tahun 2013 adalah negara-negara Eropa (68%) dan Amerika Serikat (16%).<sup>17</sup>



Gambar 5. Terusan Suez.

Sumber:

<http://geography.howstuffworks.com/africa/the-suez-canal1.htm>

Gambar di atas merupakan penggambaran perbandingan jarak tempuh sebelum dan sesudah pembukaan Terusan Suez ditahun 1986. Sepanjang sejarah, Terusan Suez menjadi pusat perhatian negara-negara besar. Seperti yang terjadi pada tahun 1956, telah terjadi konflik antara

<sup>15</sup>

*Ibid*

<sup>16</sup>

Ismah Tita Ruslin. *Op. Cit.* Hal 49

<sup>17</sup>

U.S. Energy Information Administration (EIA). *Loc. Cit.*

Mesir dan Inggris. Hal ini disebabkan ancaman Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser, untuk menasionalisasikan Terusan Suez yang pada saat itu dikelola oleh perusahaan Inggris dan Prancis, *Anglo-French Suez Canal Company*. Kemudian, di tahun 1967 terjadi perang Arab-Israel yang juga dipicu ancaman Mesir menutup Terusan Suez bagi pelayaran Israel dan sekutunya. Ancaman tersebut dipicu oleh pendudukan Israel atas Sinai.<sup>18</sup>

### 3.1.2 Sumber Daya Alam

Faktor Sumber Daya Alam di Timur Tengah juga menjadikan kawasan ini sangat penting untuk dunia internasional, disamping letak geografisnya yang strategis. Timur-Tengah memiliki kandungan mineral yang melimpah, seperti tembaga, batu bara, dan besi serta tentu saja minyak. Minyak merupakan aset terbesar kawasan ini. Keberadaan Timur Tengah semakin penting sejak ditemukannya minyak di kawasan ini pada tahun 1930-an. Minyak tersebut tersedia dalam jumlah yang sangat besar dan ditemukannya khususnya di daerah-daerah sekitar teluk (Arab Saudi, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Oman).<sup>19</sup>

Minyak adalah bahan bakar utama dan merupakan bahan mentah paling dibutuhkan untuk keperluan industri apalagi di era modern saat ini. Dua pertiga cadangan minyak dunia diperkirakan tersimpan di kawasan yang sebagian besar wilayahnya berpadang pasir tandus. Penelitian Susan M. Pojer dari *Horace Greeley HS Chappaqua, New York* yang dilakukan tahun 2002, menunjukkan cadangan minyak di kawasan Timur Tengah sangat melimpah. Cadangan minyak di wilayah ini masih lebih besar dari seluruh cadangan minyak kawasan lainnya. Bahkan jika seluruh cadangan minyak di seluruh kawasan di dunia (Asia Pasifik, Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah & Selatan serta Eropa) digabungkan, yang diperkirakan berjumlah

---

<sup>18</sup> Ismah Tita Ruslin. *Op. Cit.* Hal 50.

<sup>19</sup> Ismah Titah Ruslin. *Op. Cit.* Hal 51.



362 ribu juta barel, cadangan minyak kawasan Timur Tengah masih jauh lebih besar, yaitu diperkirakan 685 ribujuta barel.<sup>20</sup>

### 3.2 Amerika Serikat Di Timur Tengah

Pembahasan mengenai Timur Tengah juga tidak terlepas dari konflik yang terjadi di kawasan ini. Konflik secara terus menerus baik yang dilatarbelakangi permasalahan agama, teritorial, ideologi, dan sumber daya alam berupa minyak terjadi di Timur Tengah. Konflik yang dilatarbelakangi oleh permasalahan agama yang terjadi di kawasan ini adalah konflik antara Sunni dengan Syiah.<sup>21</sup> Salah satunya yang terjadi di Yaman yang memiliki kelompok milisi Syiah yang dianggap mengancam kedaulatan negara-negara Arab yang lain yang berpaham Sunni sebab ia ingin menguasai kawasan ini.<sup>22</sup>

Selain di kawasan ini terjadi konflik yang dilatarbelakangi oleh permasalahan agama, Timur Tengah juga menghadapi konflik yang dilatarbelakangi oleh konflik teritorial. Konflik Israel – Palestina adalah salah satu contoh konflik yang dilatarbelakangi oleh permasalahan teritorial. Berawal dari pembagian wilayah Palestina pada ketentuan resolusi PBB yang membagi Palestina menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu Arab-Palestina, wilayah Israel, dan Yerusalem.<sup>23</sup> Akan tetapi pembagian tersebut dinilai tidak adil sehingga munculah konflik di daerah ini hingga saat ini.

Sementara itu konflik yang dilatarbelakangi oleh ideologi tampak pada konflik antara AS dengan Afghanistan pasca perang Irak dengan koalisi. AS melindungi Arab Saudi dan Kuwait dalam invasi tahun 1990 tersebut dan sebagai balasannya meminta Arab Saudi untuk membiayai operasi CIA untuk

---

<sup>20</sup>

*Ibid*

<sup>21</sup>

Republika Online. 2015. *Pakar: Konflik Yaman Porakporandakan Dunia Islam*. Dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/04/05/nmb8s1-pakar-konflik-yaman-agenda-porakporandakan-dunia-islam>. Diakses 30 April.

<sup>22</sup>

*Ibid*

<sup>23</sup>

Anup Shah. 2006. *The Middle East conflict – a brief background*. Dalam <http://www.globalissues.org/article/119/the-middle-east-conflict-a-brief-background>. Diakses 2 Mei 2015.

menggulingkan rezim-rezim kiri yang ada di Afghanistan yang didukung oleh Uni Soviet.<sup>24</sup>

Bagaimanapun konflik yang terjadi dikawasan Timur Tengah memang tidak selalu disebabkan oleh faktor internal negara-negara Timur Tengah itu sendiri, tetapi juga sering disebabkan oleh negara di luar Timur Tengah yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Amerika Serikat adalah negara yang seringkali melakukan campur tangan di wilayah ini. AS mulai menengok lebih jauh ke Timur Tengah setelah Perang Dunia II. Sebelumnya peran AS di Timur Tengah hanya sebatas pada misi keagamaan, pendidikan, dan penelitian situs-situs masa lampau. Setelah penemuan minyak ditemukan secara besar-besaran di tahun 1940-an, AS mulai menanamkan investasi yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kepentingan strategis dan ekonomi yaitu minyak membuat AS berusaha agar kawasan ini tidak jatuh dalam blok Komunis (Uni Soviet). AS bahkan terus berusaha untuk menanamkan hegemoninya melalui berbagai intervensi yang dilakukan, seperti terlihat dari kasus intervensi ke Irak di tahun 2003 dan upaya ke Iran di tahun 2006.<sup>25</sup>

### 3.3 Kebijakan Politik Luar Negeri AS Di Timur Tengah Melalui Demokratisasi

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dianutnya. Ideologi dan kebijakan luar negeri AS tersebut juga turut mempengaruhi pengambilan kebijakan AS di Timur Tengah. Faktor ideologi yang berkembang di AS adalah neokonservatif<sup>26</sup>. Runtuhnya Uni Soviet pada Perang Dingin menjadikan AS berada dalam posisi sebagai pemimpin global. Peristiwa tersebut menjadi suatu titik balik AS dalam mencapai tujuan untuk

<sup>24</sup> Wikipedia. *Gulf War*. Dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf\\_War](http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War). Diakses 2 Mei 2015.

<sup>25</sup> M. Riza Sihbudi. *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> Neokonservatifme merupakan varian dari ideologi politik konservatif yang menggabungkan bentuk konservatisme tradisional dengan individualisme politik serta dukungan yang memenuhi syarat pasar bebas. Ia merupakan kebijakan yang mendorong penyebaran demokrasi dan kepentingan nasional Amerika dalam urusan internasional, dalam hal ini termasuk dengan cara penggunaan kekuatan militer. Neokonservatisme muncul di Amerika Serikat pada 1970-an di kalangan intelektual yang tidak menyukai komunisme. Lihat Ensiklopedia Britannica. *Neoconservatism*. Dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1075556/neoconservatism>.

menjadi kekuatan hegemoni dunia. Selama lebih dari empat dekade bersaing dengan negara komunis Uni Soviet dan mengakibatkan dunia terbelah secara bipolar, setelah Perang Dingin AS menjadi satu-satunya kekuatan superpower. Bagi kaum neokonservatif, kejayaan era unipolar ini harus tetap dipertahankan. AS harus tetap menjadi satu-satunya kekuatan hegemoni dunia yang tak tersaingin oleh negara lain.<sup>27</sup>

Kehadiran Timur Tengah sangat signifikan. Sejak Perang Teluk AS telah melakukan intervensi ke kawasan ini. Perang Teluk atau *Gulf War* adalah konflik bersenjata yang timbul antara pasukan Irak dengan 34 negara yang bertempur mengatasnamakan mandat PBB dipimpin oleh AS. Konflik berawal dari penyerangan dan pendudukan Irak atas Kuwait di bulan Agustus 1990. Pada 1991 perang membesar karena pasukan koalisi terlibat untuk melawan pasukan Irak di Kuwait. Ke-34 negara tersebut diantaranya terdiri dari Australia, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, Suriah, Turki, Belanda, Mesir, Prancis, Inggris, & Korea Selatan. AS sebagai negara penyumbang tentara paling banyak yaitu 700.000 personel.<sup>28</sup>

Pada Perang Teluk AS pada saat itu juga ikut mengirimkan armada lautnya. Hal ini karena AS memiliki hubungan yang dekat dengan Kuwait & Arab Saudi. AS mengirimkan armada lautnya untuk mengawal kapal-kapal tanker Kuwait di Teluk Persia.<sup>29</sup> Perang Teluk pada dasarnya tidak hanya tentang perang dengan Irak semata tapi menyangkut pula dengan kepentingan akan minyak di kawasan ini.

Sejak berakhirnya Perang Teluk pun terjadi peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat ke Timur Tengah. Meskipun sebenarnya AS masuk ke kawasan regional Timur Tengah sejak perang dingin. Akan tetapi peningkatan kekuatan militer AS semakin gencar di Timur Tengah sejak Perang Teluk. AS menjalin kerjasama dengan Bahrain dan Kuwait di tahun 1991, kemudian dengan Qatar di

---

<sup>27</sup> Anonim. Tanpa Tahun. *Neoconservatif VS Islamic Post 9/11*. Dalam <https://www.scribd.com/doc/7873219/34/JARINGAN-DAN-POSISI-KELOMPOK-NEOCONSERVATIF>. Diakses 15 Februari 2015.

<sup>28</sup> Wikipedia. *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> Wikipedia. *Loc. Cit.*

tahun 1992 dan Uni Emirat Ara di tahun 1994. Sebenarnya sebelum itu, sejak akhir 1970 hingga 1980-an AS telah menempatkan pasukannya di Arab Saudi. Pemerintah AS memanfaatkan ketidakstabilan domestik negara untuk menempatkan pasukannya. Oman adalah salah satu negara yang mengharapkan AS agar membantu pemerintahan dalam menumpas sparatisme.

Upaya hegemoni AS di Timur Tengah dimotivasi oleh kepentingan akan minyak semakin terlihat sejak tahun 1994 setelah perang Teluk. AS melakukan upaya ‘perdamaian’ antara Yordania dan Israel. Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Ekonomi Timr Tengah dan Afrika Utara pertama kali diselenggarakan di tahun 1994. KTT dihadiri oleh seluruh sekutu Israel dan AS. Konfrensi ini memuat pesan *hidden agenda* berupa upaya hegemoni yang dimotivasi kepentingan AS akan minyak dan penguatan Israel di Timur Tengah.<sup>30</sup>

Hegemoni AS di Timur Tengah dalam pencapaian misi penguasaan akan minyak serta penguatan Israel tersebut tidak hanya terlihat dari upaya perwujudan ‘perdamaian’ antara Yordania dan Israel. Akan tetapi tampak pula dalam kebijakan Clinton, presiden AS saat itu yang mengucilkan Iran, Irak, Sudan, Libya. Di depan Kongres Yahudi sedunia ia saat itu mengatakan bahwa ia akan memutuskan segala bentuk kerjasama perdagangan dan investasi dengan Iran.<sup>31</sup> Iran saat itu dituduh sebagai negara teroris dengan ibu kota Iran, Teheran, sebagai tempat pengembangan senjata nuklir.

Secara umum terdapat dua hal yang menjadi prioritas dari kebijakan AS di Timur Tengah. Dua hal tersebut adalah demokratisasi dan menyokong eksistensi negara Israel. Dua kebijakan AS tersebut menjadi semacam ketentuan yang diharapkan mendapat dukungan di tingkat internasional dan dilanggengkan di Timur Tengah. Tahun 1990, sekretaris negara saat pemeritahan Bush (senior) menyatakan bahwa demokrasi senantiasa berada dibalik setiap kebijakan dan ia pun mengatakan bahwa Presiden Bush telah merumuskan misi baru kita untuk melakukan konsolidasi dan mempropagandakan demokrasi. Misi inilah yang kemudian dilanjutkan oleh pemegang pemerintahan AS selanjutnya yaitu Bill

---

<sup>30</sup> Riza Sihbudi. 2007. *Menyadera Timur Tengah*. Jakarta: Penerbit Mizan. Hal 134.

<sup>31</sup> *Ibid*

Clinton. Ia mengatakan di masa kampanye bahwa propaganda demokrasi akan menjadi prioritas utama sekaligus kebijakan luar negeri pemerintahannya. Hal tersebut kemudian direalisasi dengan menaikkan anggaran Sumbangan Nasional untuk Demokrasi yaitu 2/3 dari anggaran sebelumnya.<sup>32</sup>

Selain menaikkan anggaran Sumbangan Nasional untuk Demokrasi, kebijakan lain untuk mendorong demokrasi juga diterapkan oleh Bill Clinton. Salah satunya adalah mempercayakan agenda demokratisasi ini kepada kelompok yang dinamakan sebagai Demokrat Liberal dan *Neocons*. Ketika memasuki Gedung Putih, Clinton membawa serta pasukan pendukung hak asasi. Sayap pertamanya adalah kelompok yang dinamakan Demokrat Liberal. Mereka sangat *concern* dengan perlindungan hak-hak individu. Sayap kedua adalah lingkaran *Neocons* -- *neo-conservatism*, yang sangat peduli dengan demokratisasi. Kelompok ini meyakini bahwanya dengan membangun institusi demokrasi, hak asasi dapat dilindungi dalam jangka panjang.<sup>33</sup> Kedua kelompok inilah yang mendorong promosi demokrasi yang dilakukan AS di masa pemerintahan Bill Clinton.

Bagaimanapun, keberadaan kelompok-kelompok ini sebagai kelompok dalam lingkaran pemerintahan presiden sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan AS. Dalam Konstitusi AS, keputusan kebijakan luar negeri berada di tangan Presiden dan Kongres. Kebijakan luar negeri yang dihasilkan oleh eksekutif harus mendapat persetujuan legislatif agar kemudian dapat diimplementasikan.<sup>34</sup> Bagaimanapun, Presiden AS dalam perumusan kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan luar negeri, tidak dapat melepaskan diri dari berbagai masukan dari para penasihatnya, baik staf pribadi yang berkantor di Gedung Putih maupun para anggota kabinet yang tergabung dalam *National Security Council (NSC)*.

---

<sup>32</sup> Samuel P. Huntington. 1996. *Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster: New York. Hal 97.

<sup>33</sup> Denny J., A. *Hak Asasi & Moralitas Intervensi*. Kompas 9 Desember 1993. Dalam <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1993/12/11/0000.html>. Diakses 20 Desember 2014.

<sup>34</sup> Kenneth Janda, dkk. 2011. *The Challenge of Democracy: American Government in in Global Politic*. 11<sup>th</sup> Edition. Boston: Wadsworth. Hal 742.

Sementara itu agenda demokratisasi di masa pemerintahan Presiden Woodrow Wilson dikembangkan melalui gagasan *The Fourteen Points*<sup>35</sup>. Pernyataan *The Fourteen Points* ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari pembentukan lembaga *global governance*<sup>36</sup> terbesar saat ini yaitu PBB. Awalnya, banyak pihak yang meragukan efektifitas lembaga *global governance* ini, bahkan Dean Acheson, mantan menteri luar negeri AS mengatakan bahwa akan sangat idiot bila seseorang percaya pada efektifitas PBB.<sup>37</sup> Gagasan *global governance* ini dianggap mengikis konsep kedaulatan negara-bangsa yang kemudian juga membawa permasalahan dilematis dalam hubungan antar negara dalam sekup internasional. Intervensi terhadap negara lain dikhawatirkan hanya sebagai topeng atas penerapan konsep *global governance* dengan AS sebagai penentu arah kebijakannya.

Kebijakan luar negeri AS mengalami titik balik setelah terjadi peristiwa 11 September 2001, yaitu tepat saat Bush menjabat menjadi presiden. Hal ini telah mengubah pola hubungan antara AS dengan dunia muslim. AS lebih menggunakan kekuatan militer dan menolak segala bentuk negoisasi dengan negara-negara Islam yang dianggap sebagai teroris. Hal ini juga mengubah cara AS mempromosikan demokrasi. Hal itu diungkapkan oleh Philip Stephens dalam artikel harian *Financial Times* edisi tanggal 5 September 2002 yaitu akan adanya sebuah benturan *mindsets*.<sup>38</sup>

Kebijakan yang diterapkan Bush di masa pemerintahannya diantaranya adalah bersikap tegas dan menolak tawar menawar termasuk negosiasi yang

<sup>35</sup> *The Fourteen Points* adalah pernyataan yang diberikan pada tanggal 8 Januari 1918 oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Ia mengemukakan gagasan untuk mewujudkan perdamaian dalam *Fourteen Points* yang fokus pada demokrasi liberal dan organisasi internasional. Kemudian muncul LBB tahun 1919. Lihat Irwin Unger. 2007. *These United States*. New York University: Emeritus. Hal 561.

<sup>36</sup> *Global governance* adalah integrasi politik aktor-aktor internasional yang bertujuan untuk negoisasi masalah yang mempengaruhi lebih dari satu negara atau wilayah. Hal ini diatur oleh lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai pemerintah global. Contohnya adalah PBB, Mahkamah Pidana Internasional dan Bank Dunia. Lihat *Global Governance*. Dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Global\\_governance](http://en.wikipedia.org/wiki/Global_governance).

<sup>37</sup> Robert L. Carneiro. 2004. *Political Unification of The World: Whether, When, and How--Some Speculations*. Cross-Cultural Research. Sage Publications

<sup>38</sup> Trias Kuncayono. 2005. *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish*. Jakarta: Buku Kompas. Hal 85.

diminta oleh kelompok yang dianggap AS sebagai teroris. Bush juga berusaha agar teroris diberantas secara kolektif, ia mendorong PBB sebagai badan internasional ikut bertindak tegas dalam upaya pemberantasan teroris. Usaha AS mempengaruhi PBB menghasilkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1368 Tahun 2001 yang berisi; mengambil semua langkah yang diperlukan untuk merespon serangan teroris 11 September 2001, dan untuk memerangi segala bentuk teroris, sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam PBB.<sup>39</sup> Selain itu ia juga memberlakukan kebijakan *unilateralisme*<sup>40</sup>, *pre-emption strike* dengan doktrin *strike first*.

Meskipun di setiap generasi pemerintahan presiden di AS memiliki corak yang berbeda-beda, demokratisasi AS sebagai prioritas kebijakan terus dilanggengkan hingga pergantian presiden ke-44. Barack Obama yang kemudian terpilih sebagai Presiden AS ke 44 menggantikan George W. Bush juga memilih caranya sendiri dalam mempromosikan demokrasi tersebut. Obama menyatakan bahwa ia akan meninggalkan pendekatan *hard power*<sup>41</sup> dalam kebijakannya yang sebelumnya digunakan oleh Bush dalam kebijakan luar negerinya, dan akan

<sup>39</sup> A. Safril Mubah. 2007. *Menguak Ulah Neokons Menyingkap Agenda Terselubung Amerika dalam Memerangi Teroris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 162.

<sup>40</sup> *Unilateralisme* adalah tindakan sepihak yang diambil oleh AS tanpa harus mendapat persetujuan dari badan internasional atau pun dari negara-negara sekutu. Ketidakmampuan PBB dalam menangani masalah internasional dengan cepat telah menyebabkan intervensi sepihak oleh AS tanpa melalui persetujuan PBB. Tindakan sepihak ini tidak memiliki dasar hukum yang mengikat sebab ia berasal dari keputusan negara itu sendiri yaitu AS. Akan tetapi seringkali tindakan ini mempengaruhi sumber hukum dan mempengaruhi kebiasaan internasional. Salah satu contoh tindakan sepihak ini adalah serangan AS ke Afghanistan. *Strike first* berkaitan dengan *pre-emption strike* yaitu tindakan untuk menyerang terlebih dahulu dari pihak yang merasa terancam sebelum diserang oleh pihak yang dianggap mengancam. Salah satu contohnya adalah pengeboman AS terhadap Libya di tahun 1986. Baca F.X. Joko Priyono. Aksi Unilateral (Tindakan Sepihak) Negara Maju & Implikasinya Bagi Kepentingan Negara Indonesia. *Jurnal MMH. No1 Jilid 37 Maret 2008*.

<sup>41</sup> *Hard Power* adalah pendekatan dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan dengan pendekatan secara koersif. Pada masa Pemerintahan George W Bush, kebijakan luar negeri AS cenderung menggunakan pendekatan militer. Bahkan kebijakannya tanpa memperdulikan kecaman-kecaman baik dari negara lain maupun dari PBB. Salah satu kecaman yang pernah muncul adalah ketika AS menyerang Afghanistan. AS menilai sepihak bahwa Afghanistan merupakan basis teroris. Pada saat itu Bush memanfaatkan kebijakan *self-defense* (upaya mempertahankan diri) untuk melakukan *pre-emptive strike*, yaitu sebuah serangan terlebih dahulu kepada pihak musuh. AS dianggap melanggar pasal 51 resolusi 1368 tahun 2001 sebab AS tidak melaporkan tindakannya ke Dewan Keamanan PBB. Baca Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P. T. Alumni. Hal 663.

menggunakan *smart power*<sup>42</sup> yang berarti lebih bersifat persuasif. Bila dibandingkan dengan George W Bush yang pernah menjabat sebagai presiden Amerika Serikat selama duaperiode yaitu pada 20 Januari 2001 sampai 20 Januari 2009, Bush dikenal lebih keras karena menggunakan *hard power*.

Demokratisasi AS di era Obama sempat diprediksi memiliki perbedaan dengan kebijakan demokratisasi di masa Presiden George Bush. Salah satu indikatornya adalah perbedaan latar belakang partai. Obama merupakan presiden dari Partai Demokrat, berbeda dengan Presiden George Bush yang berasal dari partai Republik. Selain itu, Obama adalah presiden AS dari *African-American* pertama yang pernah menjabat. Selain itu Obama juga pernah memberlakukan kebijakan penarikan pasukan Militer AS dari Irak pada tahun 2011. Perang Iraq sejak Maret 2003 yang dilancarkan Presiden George W. Bush itu telah menghabiskan dana USD 1 triliun, yaitu sekitar Rp 8.900 triliun rupiah dan membunuh 4.400 tentara AS.<sup>43</sup> Hal-hal tersebut menumbuhkan harapan yang besar dari masyarakat terhadap Presiden Obama dan berharap pula kebijakan Obama lebih diplomatik.<sup>44</sup> Akan tetapi penggunaan senjata dan pengerahan militer di Timur Tengah dengan isu pelucutan senjata kimia di Suriah pada tahun 2013 dan pengerahan 1500 pasukan dalam pemberantasan ISIS di Irak tahun 2014 pada akhirnya membantah pendapat tersebut.<sup>45</sup> Obama dianggap sama saja dengan presiden sebelumnya dalam mengatasi konflik di Timur Tengah.

<sup>42</sup> *Smart Power* mengacu pada kombinasi strategi *hard power* dan *soft power*. Hal ini didefinisikan oleh Center for Strategic and International Studies sebagai "pendekatan yang menggarisbawahi perlunya militer yang kuat, tetapi juga investasi besar dalam aliansi, kemitraan, dan lembaga-lembaga dari semua tingkatan untuk memperluas pengaruh Amerika dan membangun legitimasi tindakan Amerika. Baca Richard L. Armitage & Joseph S. Nye JR. 2007. *CSIS Commisison On Smart Power; A Smarter, More Secure America*. CSIS (Center For Strategic & International Studies) Press, Washington.

<sup>43</sup> Dwi. 2011. *Obama Tarik Semua Tentara AS dari Irak Akhir Tahun Ini*. JPNN. Dalam <http://www.jpnn.com/read/2011/10/23/106333/Obama-Tarik-Semua-Tentara-AS-dari-Iraq-Akhir-Tahun-Ini->. Diakses 15 Februari 2015.

<sup>44</sup> Riefqi Muna. 2009. Paradigma Pertahanan dari *Hard Power* ke *Smart Power*. *Jurnal Pertahanan dan Perdamaian*. V. No. 1 April. Jakarta: Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian FISIP, Universitas Al Azhar Indonesia. Hal. 86.

<sup>45</sup> Stephen Collinson. 2014. *Obama sends 1.500 troops to Iraq*. CNN. Dalam <http://edition.cnn.com/2014/11/07/politics/obama-sends-troops-to-iraq/>. Diakses 15 Februari 2015.



Demokratisasi yang dilanggengkan oleh Presiden AS dari generasi ke generasi merupakan bagian dari upaya oleh Amerika Serikat dalam memastikan sistem dunia internasional yang aman bagi kepentingannya. Demokratisasi AS terus dilanggengkan juga dengan cara terus menerus mempengaruhi dunia internasional melalui PBB. Dalam hal ini tak terkecuali untuk upaya mendapat dukungan atas setiap kebijakan yang diambilnya atas Timur Tengah. AS melalui sidang PBB misalnya, berupaya untuk mendapat dukungan dari dunia internasional atas intervensinya di Timur Tengah. Seperti yang juga disampaikan dalam pidato Obama di Sidang Umum PBB ke-68 yang disebut sebagai visi baru AS atas Timur Tengah.

Salah satu contoh dari faktor yang ingin dilindungi oleh AS melalui intervensinya di Suriah adalah suplai minyak bumi dari negara-negara sekutu AS yang ada di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Kuwait. Sementara itu aspek politik yang ingin dilindungi adalah kepentingan Amerika Serikat bersama negara sekutunya, yaitu Turki dan Israel. Pertimbangan dua faktor ekonomi dan politik yang menjadikan AS berupaya sangat keras untuk tetap mempertahankan hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Hegemoni yang sesungguhnya untuk kepentingan kapitalisme diciptakan oleh AS melalui penyebaran nilai-nilai yang mereka perjuangkan, salah satu diantaranya adalah demokrasi.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini, pidato Obama di Sidang Umum PBB pada 23 September 2013 menjadi salah satu sarana untuk melihat tindakan Amerika Serikat, khususnya pada masa pemerintahan Obama, yang hegemonik terhadap Timur Tengah. Pidato tersebut akan dianalisis dan dikritisi lebih lanjut dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis yang mengacu pada perangkat dari Norman Fairclough.

---

<sup>46</sup> Jill Steans & Lloyd Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional, Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 239.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai konsep hegemoni AS yang terkandung dalam wacana intervensi AS dalam Pidato Obama di Sidang Umum PBB tahun 2013 yang berisi tentang wacana intervensi kemanusiaan ke Timur Tengah. Seringkali penelitian tentang intervensi kemanusiaan ke Timur Tengah tersebut dilakukan dengan metode analisis data dan masih sangat jarang menggunakan metode analisis wacana terutama analisis wacana kritis. Oleh karena itu peneliti dalam sripsi ini menggunakan analisis wacana dengan pendekatan kritis, selain untuk dapat membahas secara mendalam wacana intervensi kemanusiaan AS di Timur Tengah tersebut juga ditujukan untuk menambah khasanah akademik di Hubungan Internasional Universitas Jember.

Lebih lanjut, dalam penelitian ini, peneliti menemukan dua temuan. Dua temuan tersebut berisitemuan tekstual dan non-tekstual. Temuan tekstual dalam penelitian ini berisi limapoin kesimpulan. Sementara itu temuan non-tekstual berisi satu poin.

Kesimpulan tekstual yang *pertama* adalah audiens sasaran pidato Presiden Obama di Sidang Umum PBB 24 September 2013 ini adalah komunitas internasional yaitu negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Kedua*, formasi struktur teks pidato ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu pembuka, isi dan penutup. Bagian pembuka memuat wacana identitas pihak Obama sebagai representasi Amerika Serikat, latar belakang historis upaya resolusi konflik oleh PBB dan peran serta AS dalam intervensi kemanusiaan internasional. Bagian isi memuat tiga agenda pernyataan sikap pemerintah AS, yaitu intervensi kemanusiaan AS ke Timur Tengah dan agenda demokratisasi. Bagian ketiga yakni penutup berfungsi sebagai motivasi terhadap audiens sasaran dan mengafirmasi tujuan-tujuan pidato. Bagian pertama dan ketiga juga berfungsi sebagai pembangun afeksi audiens. Kesimpulan tekstual yang *ketiga* adalah adanya upaya Presiden Obama dalam mengedepankan komunitas internasional

dan fakta-fakta intervensi kemanusiaan sebagai strategi menginternalisasi konsep hegemoni AS di Timur Tengah. Kesimpulan tekstual yang *keempat* adalah teks pidato ini cenderung didominasi oleh pilihan kata yang lugas, dan denotatif. Terdapat pula pengulangan kata dan dramatisasi untuk membangun relasi dialogis dalam hubungan antara penutur dan audiens. Hal ini membentuk impresi audiens terhadap citra Amerika Serikat dan memotivasi terlaksananya agenda-agenda AS dalam pidato. Strategi dan stimulus yang diberikan ini memiliki kecenderungan manipulasi dengan tingkat yang tinggi. Kecenderungan manipulasi ini juga dibuktikan dari hasil analisis sosiokultural. Manipulasi kebenaran oleh penutur semakin terlihat ketika hasil analisis teks dikroscek dan diperiksa dengan hasil analisis sosiokultural. Kesimpulan tekstual yang *kelima* adalah Presiden Obama begitu agresif memperlihatkan kesiapan AS dalam upaya intervensi kemanusiaan ke Timur Tengah, khususnya intervensi kemanusiaan ke Suriah, keterlibatan dalam konflik Israel-Palestina, dan konflik nuklir Iran. Agresifitas penutur dalam agenda intervensi kemanusiaan AS di Timur Tengah menunjukkan kontrol penutur dan sekaligus menginternalisasi kesediaan komunitas internasional untuk mendukung agenda tersebut. Di saat yang sama, keyakinan akan pengambilan langkah intervensi kemanusiaan dan dukungan internasional terhadap agenda demokratisasi AS yang tampak dalam pidato ini tanpa adanya akomodasi pertukaran ide oleh penutur sekaligus menunjukkan relasi kuasa AS yang hegemonik.

Sementara itu temuan non tekstual penelitian ini adalah peneliti menemukan pola-pola yang hampir sama dalam upaya AS melibatkan dirinya di negara-negara Timur Tengah. Intervensi kemanusiaan menjadi wacana AS untuk mendapat persetujuan internasional yakni PBB. AS melibatkan diri hampir di setiap negara di Timur Tengah dengan wacana intervensi kemanusiaan tersebut. Tidak hanya di negara-negara *Arab Spring*, upaya AS melibatkan diri juga terjadi pada konflik Israel-Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa ada kontrol yang sangat besar secara politik, ekonomi, dan sosial dari AS di Timur Tengah. Dari temuan-temuan ini kemudian dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya *hidden agenda* AS menghegemoni wilayah Timur Tengah. Sementara itu, jika ditelusuri dari

data-data sekunder yang juga telah disajikan dalam pembahasan penelitian ini, motivasi hegemoni AS di Timur Tengah tidak lain adalah minyak.

## 5.2 Saran

Penelitian wacana *humanitarian intervention* AS di Timur Tengah ini hanya menggunakan dua dimensi analisis yaitu analisis teks dan sosiokultural, akan lebih baik jika dimensi *discourse practice* juga digunakan agar lebih sempurna. Selain itu objek penelitian dalam skripsi ini adalah berupa satu buah pidato Obama di *General Assembly* 2013, akan lebih baik jika peneliti dapat melengkapi objek penelitian tersebut dengan teks lain dalam bentuk dokumen kenegaraan yang lain yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Muhammad. 2001. *Nationalism and Islam Perceptives of Egyptian and Syrian Muslim Intellectuals*. Departement of Islamic and Middle Eastern Studies. Edinburg University.
- Anonim. 1999. *Humanitarian Intervention, Legal & Politic Aspect*. Copenhagen: Danish Institute of International Affairs.
- Anonim. 2008. *The United Nations Today*. United Nations Department of Public Information.
- Armite, Richard L. & Joseph s. Nye JR. 2007. *CSIS Commision On Smart Power, A Smarter, More Secure America*. CSIS (Center For Strategic & International Studies) Press, Washington.
- Bogdan & Biklen. Dalam Lexy J Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Carneiro, Robert L. 2004. *Political Unification of The World: Wheather, When, and How—Some Speculations*. Cross-Cultural Research. Sage Publications.
- Cipto, Bambang. 2003. *Politik dan Pemeritahan Amerika*. Lingkaran: Yogyakarta.
- Cleveland, William L. 1971. *The Making of an Arab Nationalist: Ottomanism and Arabism in the Life and Thought of Sati al Husri*. Princeton University Press.
- Coady, C.A.J. 2002. *The Ethics of Armed Humanitarian Intervention*. United States: Institute of Peace.
- Cox, Robert. 2009. Beyond Empire and Terror: Critical Reflections on the Political Economy of World Order. *New Political Economy*. Vol 9. No3.
- Creswell, John W. 2002. *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Terjemahan III/IV). Jakarta: KIK Press.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition*. London and New Delhi: SAGE Publications.
- Dionysius. 2012. *US Democrarcy Promotions in the Middle East: The Pursuit of Hegemony? London. London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy: International Relations Department*.
- Dosi, Eduardus. 2012. *Media Masa Dalam Jaringan Kekuasaan; Sebuah Studi Tentang Kekuasaan di Balik Wacana*. Flores: Ledalero.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta:LKIS Yogyakarta.

- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta. LKIS.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language & Power*. Longman: New York.
- Fairclough, Norman. 2013. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Routledge.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary* (Eight Edition). (St. Paul: West, a Thomson Business.
- Gill, Stephen (ed). 1993. *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection from The Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.
- Gramsci, Antonio. 1976. *Selections From The Prison Notebooks*. Quintim Hoare and Nowell Smith (ed). New York: International Publisher.
- Guraizu, Rudi. 2008. *Is Humanitarian Military Intervention In The Affairs Of Another State Ever Justified?* Middlesex University School of Health and Social Sciences.
- Hardt, Michael Antonio Megri. 2000. *Empire*. US: Harvard University Press. .
- Hatimah, Andi Husnul. 2012. *Masa Depan Libya Pasca Pemerintahan Moammar Khadafy. Skripsi* . Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Hehin, Aidar. 2010. *Humanitarian Intervention: An Introduction*. Palgrave Macmilan: China.
- Holzgrefe, J.L. & Koehane, Robert O. 2003. *Humanitarian Intervention (Ethical, Legal, and Political Dilemmas)*. New York: Cambridge University Press.
- Huntington, Samuel P. 1996. *Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster: New York.
- ICISS Report. 2001. *The Responsibility to Protect. International Development Research Center*. Ottawa: Cannada.
- Janda, Kenneth. dkk. 2011. *The Challenge of Democracy: American Government in in Global Politic*. 11<sup>th</sup> Edition. Boston: Wadsworth.
- Jorgensen, Marianne W. & Louise J. Philips. 2007. *Analisis Wacana, Teori & Metode*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- K. M. Smith, Rhona. dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Kartika, Sandira& M. Mahendra (eds). 1993. *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman: Wacana Multikultural Dalam Media*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Kuncahyono, Trias. 2005. *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish*. Jakarta: Buku Kompas.
- Kuncahyono, Trias. 2012. *Musim Semi di Suriah*. Jakarta: PT Kompas Nusantara.
- Laswell, Harold D. 1939. *Politics: Who Gets What, When, How*. Claveland New York.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-18. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubah, A. Safril. 2007. *Menguak Ulah Neokons Menyingkap Agenda Terselubung Amerika dalam Memerangi Terorisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Dedy. 2006. *Metodologi Penelitian: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W Laurence. 2000. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. 4th edition. Nedham Heights.
- Normadiah, Anne. 2011. *Pengaruh Kepentingan Minyak Pada Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Invasi Irak Tahun 2003*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Novandi, Bagus. A. 2013. *Dampak Fenomena Arab Spring Terhadap Pemerintahan Lebanon*. Universitas Riau.
- O'Donnell, Chelsea. 2014. *The Development of the Responsibility to Protect: An Examination of the Debate Over the Legality of Humanitarian Intervention*.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. LKIS:Yogyakarta.
- Prasetya, Vito. 2011. *Analisis Citra Lembaga Legislatif Pada Televisi*. Jakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar. Jakarta.
- Poerwandari, Kristi. 2011. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Cetakan Keempat. Depok: LP3SP UI.
- Ratih, Rina Dewi Ratih. 2003. *Benturan Intervensi Terhadap Bantuan Kemanusiaan di Darfur*. Universitas Indonesia: Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional
- Rizki, Mohammad. 2011. *Dampak Invasi AS ke Irak Terhadap Pasokan Minyak Amerika*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Sihbudi, M. Riza. 2007. *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-negara Muslim*. Bandung: Mizan. Hal xxi-xxii.

- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Sklair, Leslie. 2005. *Generic Globalization, Capitalist Globalizations, and Beyond A Framework for Critical Globalizations Studies*. Dalam Richard P. Applebaum & William Robinson ed. 2005. London: Routledge.
- Smith, Steve. 1994. *Positivsm and Beyond*. Dalam Stave Smith, Ken Booth & Marysia Zelewsky (eds). *International Theory: Positivsm and Beyond*. Cambridge University Pres.
- Stauffer, Thomas. 2003. *The Cost to American Taxpayers of the Israeli-Palestinian Conflict: \$ Trillion*. Washington Report on Middle East Affair. Juni 2003.
- Steans, Jill & Llyod Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional, Persepektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 239.
- Strinati, Dominic. 1995. *An Introductions to Theories of Popular Culture*. Routledge. London.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-11. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarumidi. 2004. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syahputra, Vandi., dkk. Tanpa tahun. *International Law Perceptieve Of Humanitarian Intervention Implementation By The United Nation Security Council In an Internal Conflict Of State*. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
- The United Nations. 1945. *The Charter of United Nations & Statue Of The International Court Of Justice*. San Fracisco.
- Vincent, R. J..1986. *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walzer, Michael. 1977. *Intervention: Just and Unjust War*. New York: Basic Books. Hal 86.
- Wang, Wei. 2007. *Genre Across Languages and Cultures*. Chapter 4. Newspaper Commentaries in China and Australia. Sydney: Diss University.
- Welsh, Jennifer M. 2004. *Humanitarian Intervention and International Relations*. Oxford University Press: New York.
- Wheeler, Nicholas J. 2000. *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society*. New York: Oxford University Press.
- WTRG. 2001. *National Energy Policy: Report of The National Energy Policy Development Group*. US Government Printing Office. Washington DC.



## JURNAL

- Bowman, Bradley. 2008. "After Iraq: Future U.S Military Posture in the Middle East". *The Washington Quartely Spring*. 31(2): 80.
- Cordesman, Anthony. 2011. "Arab Uprisings and US Policy: What is American National Interest?". *Middle East Policy*., 18(2): 20.
- Muna, Riefqi. 2009. Paradigma Pertahanan dari *Hard Power* ke *Smart Power*. *Jurnal Pertahanan dan Perdamaian*. V. No. 1 April. Jakarta: Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian FISIP, Universitas Al Azhar Indonesia.
- Priyono, Joko. Aksi Unilateral (Tindakan Sepihak) Negara Maju & Implikasinya Bagi Kepentingan Negara Indonesia. *Jurnal MMH*. No1 Jilid 37 Maret 2008.
- Ruslin, Ismah Tita. Memetaan Konflik Di Timur Tengah: Tinjauan Dari Geografi Politik. *Jurnal Politik Profetik*. Volume 1 No. 1 Tahun 2013. Filsafat & Politik UIN Alauddin: Makasar.
- Ryniker, Anne. 2001. *The ICRC's Position on "Humanitarian Intervention"*. IRRC journal. Vol 83.
- Unger, Irwin. 2007. *These United States*. New York University: Emeritus.
- Utami, Sri. 2007. *Representasi Emansipasi Bangsa Dalam Surat-surat &Nota Kartini*. Dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi: Thesis*. Volume VI.Nomor 2. Mei-Agustus.
- Van Dijk, Teun. A. 1993. *Discourse & Societies; Princiles of Critical Discourse Analysis, Critical Power & Dominance*. SAGE Publication: London, Newbury Park & New Delhi. Vol 4(2).

## INTERNET

- Anonim. Tanpa Tahun. *The Council on Foreign Relations (CFR)*. Dalam <http://www.cfr.org/about/>.
- Anonim. Tanpa Tahun. *Neoconservatif VS Islamic Post 9/11*. Dalam <https://www.scribd.com/doc/7873219/34/JARINGAN-DAN-POSISI-KELOMPOK-NEOCONSERVATIF>
- Anonim. 2014. *Middle East*. The Library University of Chicago. Last Updet. Dalam <http://guides.lib.uchicago.edu/mideast> .
- Al Jazeera, Recite. 2012. Dalam [http://www.youtube.com/watch?v=\\_i-C9Ko8LgA](http://www.youtube.com/watch?v=_i-C9Ko8LgA).
- Al Jazeera. 2011. *Country profile: Libya*. Al Jazeera. Dalam <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201141912643168741.html>.

- Al Jazeera. 2013. *UN Observers Confirm Syria Aerial Attacks*. Dalam <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/06/2012611151436420866.html>.
- Al Jazeera. 2011. *Country profile: Libya*. Al Jazeera. Dalam <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/201141912643168741.html>.
- Al Jazeera. 2013. *Mali Seeks France Help Against Rebel Advances*. Dalam <http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/01/20131111454291579.html>.
- Bard, Mitchell. 2012. *The Israeli and Arab Lobbies*. Jewish Virtual Library. Dalam <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/lobby.html>.
- BBC. *Iraq Violence Leaves Almost 1000 Dead in September*. Dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24362859>.
- BBC. 2013. *UN Inspector Says Syrian Rebels Used Chemical Weapons, Not Assad (May 2013)*. <https://www.youtube.com/watch?v=fXmzBFyXvVI>.
- BBC. 2011. *Suriah Janjikan Reformasi Politik*. Dalam [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/03/110324\\_syrianpledge.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/03/110324_syrianpledge.shtml). Diakses 15 September 2015
- BBC Indonesia. 2011. *Unjuk Rasa Mulai Muncul di Libya*. Dalam [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110216\\_libyaunrest.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110216_libyaunrest.shtml).
- BBC News. 2011. *Libya Protests: Pressure mounts on isolated Gaddafi*. Dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12550719>.
- Benen, Steve. 2013. *Public Not Yet On Board With Intervention In Syria*. Dalam <http://www.msnbc.com/rachel-maddow-show/public-not-yet-board-intervention>.
- CNN. 2013. *Official: US May Take Unilateral Action Against Syria*. <http://edition.cnn.com/2013/08/29/world/europe/syria-civil-war/>.
- Coburn, Noah. 2008. *Qaum: Conceptualizing Potters in the Afghan Political Arena*. Boston University. Hlm 2. <https://www.bu.edu/aias/coburn.pdf>.
- Collinson, Stephen. 2014. *Obama sends 1.500 troops to Iraq*. CNN. Dalam <http://edition.cnn.com/2014/11/07/politics/obama-sends-troops-to-iraq/>.
- Disenza, Jayne. 2013. *The Development of a New Paradigm of Humanitarian Intervention Assessing the Responsibility to Protect*. Dalam [http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=poli\\_honors](http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=poli_honors).
- DW. 2013. *Sekitar 60.000 Korban Tewas dalam Perang Suriah*. Dalam <http://www.dw.com/id/sekitar-60000-korban-tewas-dalam-perang-suriah/a-16494039>.
- Dwi. 2011. *Obama Tarik Semua Tentara AS dari Irak Akhir Tahun Ini*. JPNN. Dalam <http://www.jpnn.com/read/2011/10/23/106333/Obama-Tarik-Semua-Tentara-AS-dari-Iraq-Akhir-Tahun-Ini->.

- Encyclopedia Britannica Editors. 2013. *Arab Spring*. Dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1784922/Arab-Spring>.
- Ensiklopedia Britannica. *Neoconservatism*. Dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1075556/neoconservatism>.
- Etinger, Yoram. 2013. *President Obama's US Speech – New or Old Middle East?*. Dalam <http://www.aim.org/guest-column/president-obamas-un-speech-new-or-old-middle-east/>.
- Fidi K, Fellin. 2013. *Fenomena Arab Spring: Identitas Budaya Politik Timur Tengah, dan Demokrasi Barat*. Dalam <http://fellinkinanti-fisip10.web.unair.ac.id/>.
- Forbes. 2015. *US Oil Reserves, Resources, and Unlimited Future Supply*. Dalam <http://www.forbes.com/sites/judeclemente/2015/04/02/u-s-oil-reserves-resources-and-unlimited-future-supply/>.
- Foreign Affair. 2013. *London and The Invention of The Middle East; Money, Power and War*. <http://www.foreignaffairs.com/articles/52385/william-b-quandt/london-and-the-invention-of-the-middle-east-money-power-and-war->.
- Foreign Policy. 2010. *Rogue State: Israeli Violations of U.N. Security Council Resolutions*. Dalam <http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/01/27/rogue-state-israeli-violations-of-u-n-security-council-resolutions/>.
- Gibb, H. A. R.. "The Islamic Background of Ibn Khaldun's political Theory". *BSOS*. VII. 1933. T3-31. Dalam <http://www.muslimphilosophy.com/ei2/asbiyah.htm>.
- Gallup. 2013. *On 10th Anniversary, 53% in U.S See Iraq War as Mistake*. Dalam <http://www.gallup.com/poll/161399/10th-anniversary-iraq-war-mistake.aspx>.
- Georgie Anne Geyer. 2013. *Middle East Remains Unstable After Hopeful 'Arab Spring'*. Dalam <http://news.yahoo.com/middle-east-remains-unstable-hopeful-arab-spring-233005280.html>.
- Gulf News. 2013. *Bahrain Seek Clarifications Over Obama Speech*. Dalam <http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-seeks-clarification-over-obama-speech-1.1236105>
- Horgan, John. 2015. *Would Global Violence Decline Faster If US Was Less Militaristic?*. Dalam <http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/would-global-violence-decline-faster-if-u-s-was-less-militaristic/>
- Huffington Post. *Iraq Death Toll Reaches 500,000 Since Start Of U.S.-Led Invasion, New Study Says*. Dalam [http://www.huffingtonpost.com/2013/10/15/iraq-death-toll\\_n\\_4102855.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/10/15/iraq-death-toll_n_4102855.html).

- Huffington Post. *The American's People Really Don't Want To Bomb Syria (POLLS)*. Dalam [http://www.huffingtonpost.com/2013/09/03/syria-airstrike-polls\\_n\\_3861639.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/09/03/syria-airstrike-polls_n_3861639.html).
- Huffington Post. 2013. *British Parliament Votes Against Military Intervention to Syria*. Dalam [http://www.huffingtonpost.com/2013/08/29/british-parliament-syria-vote\\_n\\_3839067.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/08/29/british-parliament-syria-vote_n_3839067.html).
- Hurd, Ian. 2011. *Is Humanitarian Intervention Legal? The Rule of Law in Incoherent World*. Carnegia Council for Ethics in International Affairs. Dalam [http://faculty.wcas.northwestern.edu/~ihu355/Home\\_files/is%20hi%20legal.pdf](http://faculty.wcas.northwestern.edu/~ihu355/Home_files/is%20hi%20legal.pdf).
- International Federations for Human Rights (FIDH). 2011. *Libya: Strategy of Scorched Earth, Desire for widespread and Systematic Elimination*. Dalam <https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/libya/Libya-Strategy-of-scorched-earth>.
- Israel Awares Source Center. Tanpa Tahun. *Israeli Violations of UN Resolutions*. Dalam <http://www.israellawresourcecenter.org/unresolutions/studyguide/sgunres1e.html>.
- IRIB (Iran Indonesia Radio). 2014. *Rusia Kritik Pernyataan Obama di PBB*. Dalam <http://indonesian.tribune.com/indonesian/2014/08/29/rusia-kritik-pernyataan-obama-di-pbb>
- J.A., Denny. 1993. *Hak Asasi & Moralitas Intervensi*. Kompas 9 Desember. Dalam <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1993/12/11/0000.html>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/interferensi>.
- Kennan, George F. 1948. *Review of Current Trends U.S Foreign Policy*. Dalam The People Book Project. *The U.S Strategy to Control Middle Eastern Oil: "One of the Greatest Material Prizes in World History"*. Dalam <http://thepeoplesbookproject.com/tag/george-kennan/>
- Landler, Mark. 2013. *Survey Reveals Scant Backing for Syria Strike*. *New York Times*. [http://www.nytimes.com/2013/09/10/world/middleeast/poll-majority-of-americans-oppose-military-strike.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/09/10/world/middleeast/poll-majority-of-americans-oppose-military-strike.html?_r=0).
- Luke, Allan. *Theory and Practice in Critical Discourse Analysis*. <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/ed270/Luke/SAHA6.html>.
- Kuperman, Alan J. 2008. *The Moral Hazard of Humanitarian Intervention: Lessons from the Balkans*. *International Studies Quarterly*. Volume 52. Dalam [http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1468-2478.2007.00491.x?r3\\_referer=wol&tracking\\_action=preview\\_click&show\\_checkout=1](http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1468-2478.2007.00491.x?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1).
- Kuperman, Alan. 2013. *Lesson From Libya: How Not to Intervene*. Belfer Center for Science and International Affairs. Harvard Kennedy School.

- [http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/23387/lessons\\_from\\_libya.html](http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/23387/lessons_from_libya.html).
- MEMO (Middle East Monitor). 2015. *Middle East Monitor*. Dalam <https://www.middleeastmonitor.com/articles/africa/20015-from-chaos-and-ounerrevolution-after-the-arab-spring-libya-extract>.
- Merriam Webster Online Dictionary. Dalam <http://www.merriam-webster.com/dictionary/extraordinary>.
- NATO. 2011. "We answered the call" – the end of Operation Unified Protector. Dalam [http://www.nato.int/cps/en/natohq/news\\_80435.htm](http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_80435.htm).
- National Security Agency (NSA). *Mission*. Dalam <https://www.nsa.gov/about/mission/index.shtml>.
- New International Magazine. Argument: Has Arab Spring Failed? 2013. Dalam <http://newint.org/sections/argument/2013/10/01/argument-has-the-arab-spring-failed/>.
- New York Times. 2013. *Survey Reveals Scant Backing for Syria Strike*. Dalam [http://www.nytimes.com/2013/09/10/world/middleeast/poll-majority-of-americans-oppose-military-strike.html?\\_r=1](http://www.nytimes.com/2013/09/10/world/middleeast/poll-majority-of-americans-oppose-military-strike.html?_r=1).
- NPR News. 2012. *U.S and Iran, A Decade After Axis Declaration*. Dalam <http://www.npr.org/2012/01/29/146051957/u-s-and-iran-a-decade-after-axis-declaration>.
- Obama, Barack. 2011. *Pidato Kenegaraan Presiden Amerika Serikat Barack Obama Mengenai Libya*. Disampaikan di *National Defense University Washington DC*. Dalam <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/wh29032011.html>.
- ODN (On Demand News). *Assad interview: Syrian President talks about chemical weapons attack on CBS*. Dalam <https://www.youtube.com/watch?v=7g3DBbVEq58>.
- Office of The Special Adviser On The Prevention Of Genocide. 2014. *Responsibility to Protect*. Dalam <http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml>.
- OPEC. 2014. *World Crude Oil Reserves*. Dalam [http://www.opec.org/opec\\_web/en/data\\_graphs/330.htm](http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm).
- Oxford Dictionary. *Discourse*. Dalam [http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com\\_rubberdoc&view=doc&id=389&format=raw&lang=en](http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=389&format=raw&lang=en).
- Pattison, James. 2011. *The Ethics of Humanitarian Intervention in Libya*. Dalam [https://www.academia.edu/1175180/The\\_Ethics\\_of\\_Humanitarian\\_Intervention\\_in\\_Libya](https://www.academia.edu/1175180/The_Ethics_of_Humanitarian_Intervention_in_Libya).
- Polling Report. *Syria*. 2013. Dalam <http://www.pollingreport.com/syria.htm>.

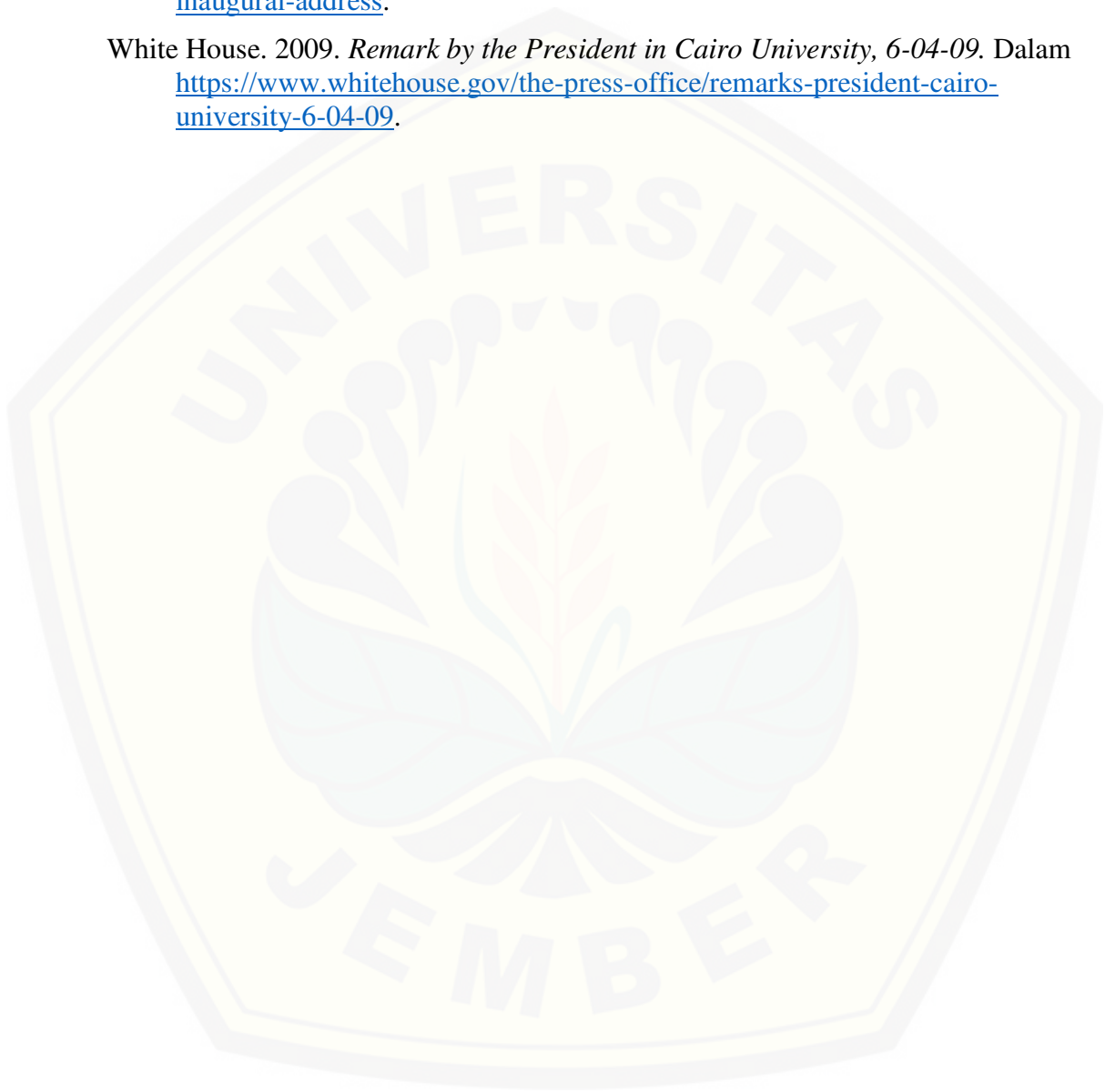
- R. Primus, Adeodatus. 2014. Intervensi Militer Amerika Serikat Dalam Konflik Politik Di Suriah Tahun 2011. *E-journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2 (3) 775-778. Dalam <http://ejournal.hi.fisip-unmul.org/>.
- Rahayu. Tanpa Tahun. *Eksistensi Prinsip 'Responsibility to Protect' Dalam Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4212/3838>.
- Republika Online. 2015. *Pakar: Konflik Yaman Porakporandakan Dunia Islam*. Dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/04/05/nmb8s1-pakar-konflik-yaman-agenda-porakporandakan-dunia-islam>.
- Responsibility to Protect*. Dalam [www.r2pasiapacific.org/docs/.../R2P\\_basic\\_info\\_Bahasa](http://www.r2pasiapacific.org/docs/.../R2P_basic_info_Bahasa).
- Suara Pembaruan. 2013. *Juli 2013 Bulan Paling Maut di Irak*. Dalam <http://sp.beritasatu.com/home/juli-2013-bulan-paling-maut-di-irak/39517>.
- Shah, Anup. 2006. *The Middle East conflict – a brief background*. Dalam <http://www.globalissues.org/article/119/the-middle-east-conflict-a-brief-background>.
- The International Institute For Strategic Studies (IISS). 2012. *Libya Assets and the Question of Sovereignty*. Dalam <https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2012-23ab/survival--global-politics-and-strategy-april-may-2012-1b13/54-2-05-bellodi-c678>.
- The Economist. 2011. *Protests in Libya: Blood In The Street*. Dalam [http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/02/protests\\_libya](http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/02/protests_libya).
- The Electronic Intifada. 2008. *Poll: Israel, US greates threats to Middle East*. 2008. Dalam <https://electronicintifada.net/content/poll-israel-us-greatest-threats-middle-east/7461>.
- The Guardian. *The Full Impact of the UK's vote against Intervention in Syria has yet to be Felt*. Dalam <http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/01/uk-syria-vote-impact-parliament>
- The Guardian Post. 2006. *Why Pyongyang's nuclear test is US political dynamite*. Dalam <http://www.theguardian.com/news/blog/2006/oct/09/norhkorea>.
- The Guardian Post. 2006. *North Korea Test Nuclear Weapon as Powerful as Hiroshima Bomb*. <http://www.theguardian.com/world/2009/may/25/north-korea-hiroshima-nuclear-test>.
- The International Institute For Strategic Studies (IISS). 2012. *Libya Assets and the Question of Sovereignty*. Dalam <https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2012-23ab/survival--global-politics-and-strategy-april-may-2012-1b13/54-2-05-bellodi-c678>

- The White House. 2002. *President Delivers State of the Union Address*. Dalam <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>.
- Uexpress. 2013. Middle East Remain <http://www.uexpress.com/georgie-anne-geyer/2013/11/7/middle-east-remains-unstable-after-hopeful>.
- United Nations. Tanpa tahun. *General Assembly of the United Nations*. Dalam <http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml>. Diakses 1 Maret 2015.
- US Department of State: Diplomacy In Action. 1969. *Address by President Richard Nixon to The UN General Assembly*. Dalam <http://www.state.gov/p/io/potusunga/207305.htm>.
- US Department of State: Diplomacy In Action. 1970. *Address by President Richard Nixon to The UN General Assembly*. Dalam <http://www.state.gov/p/io/potusunga/207302.htm>.
- US Department of State: Diplomacy In Action. 1974. *Address by President Gerald Ford to The UN General Assembly*. Dalam <http://www.state.gov/p/io/potusunga/207301.htm>.
- US Department of State: Diplomacy In Action. 1984. *Address by President Ronald Reagan to The UN General Assembly*. Dalam <http://www.state.gov/p/io/potusunga/207336.htm>.
- US Department of State: Diplomacy In Action. 1974. *Address by President Bill Clinton to The UN General Assembly*. Dalam <http://www.state.gov/p/io/potusunga/207552.htm>.
- US Energy Information Administration. 2012. *What Countries Are The Top Net Importers of oil?* Dalam <http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=709&t=6>.
- U.S. Energy Information Administration (EIA). *World Oil Transit Chokepoints*. Dalam <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3>.
- Wahyuningsih, Sri. 2009. *Program Pengembangan Nuklir Iran*. Skripsi. FISIP UI Dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128593-T%2026778-Kebijakan%20luar%20negeri-Tinjauan%20literatur.pdf>.
- Washington Post. 2006. *Bush's 'Axis of Evil' Comes Back to Haunt United States*. <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/09/AR2006100901130.html>.
- Washington Times. 2013. *Syrian Rebels Used Sarin Nerve Gas, not Assad's Regime: U.N. Official*. 2013. Dalam <http://www.washingtontimes.com/news/2013/may/6/syrian-rebels-used-sarin-nerve-gas-not-assads-regi/>
- Wikipedia. *State of the Union* dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/State\\_of\\_the\\_Union](https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union)
- Wikipedia. *Gulf War*. Dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf\\_War](http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War).

Wikipedia. Tnpa Tahun. *Israeli-Palestinian Peace Talks*. Dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/2010%E2%80%9311\\_Israeli%E2%80%9311\\_Palestinian\\_peace\\_talks](https://en.wikipedia.org/wiki/2010%E2%80%9311_Israeli%E2%80%9311_Palestinian_peace_talks).

White House. 2009. *President Barack Obama's Inaugural Address*. Dalam <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2009/01/20/09-01-20-inaugural-address>.

White House. 2009. *Remark by the President in Cairo University, 6-04-09*. Dalam <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2009/04/06/09-04-06-remarks-president-cairo-university>.





LAMPIRAN

**Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly<sup>1</sup>**

United Nations  
New York, New York  
10:10 A.M. EDT

- 1 PRESIDENT OBAMA: Mr. President, Mr. Secretary General, fellow delegates, ladies and gentlemen: Each year we come together to reaffirm the founding vision of this institution. For most of recorded history, individual aspirations were subject to the whims of tyrants and empires. Divisions of race and religion and tribe were settled through the sword and the clash of armies. The idea that nations and peoples could come together in peace to solve their disputes and advance a common prosperity seemed unimaginable.
- 2 It took the awful carnage of two world wars to shift our thinking. The leaders who built the United Nations were not naïve; they did not think this body could eradicate all wars. But in the wake of millions dead and continents in rubble, and with the development of nuclear weapons that could annihilate a planet, they understood that humanity could not survive the course it was on. And so they gave us this institution, believing that it could allow us to resolve conflicts, enforce rules of behavior, and build habits of cooperation that would grow stronger over time.
- 3 For decades, the United Nations has in fact made a difference -- from helping to eradicate disease, to educating children, to brokering peace. But like every generation of leaders, we face new and profound challenges, and this body continues to be tested. The question is whether we possess the wisdom and the courage, as nation-states and members of an international community, to squarely meet those challenges; whether the United Nations can meet the tests of our time.
- 4 For much of my tenure as President, some of our most urgent challenges have revolved around an increasingly integrated global economy, and our efforts to recover from the worst economic crisis of our lifetime. Now, five years after the global economy collapsed, and thanks to coordinated efforts by the countries here today, jobs are being created, global financial systems have stabilized, and people are once again being lifted out of

---

<sup>1</sup>Office of Press Secretary. 2013. *Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly*. White House: New York. Dalam <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/24/remarks-president-obama-address-united-nations-general-assembly>. Diakses September 2014

poverty. But this progress is fragile and unequal, and we still have work to do together to assure that our citizens can access the opportunities that they need to thrive in the 21st century.

5 Together, we've also worked to end a decade of war. Five years ago, nearly 180,000 Americans were serving in harm's way, and the war in Iraq was the dominant issue in our relationship with the rest of the world. Today, all of our troops have left Iraq. Next year, an international coalition will end its war in Afghanistan, having achieved its mission of dismantling the core of al Qaeda that attacked us on 9/11.

6 For the United States, these new circumstances have also meant shifting away from a perpetual war footing. Beyond bringing our troops home, we have limited the use of drones so they target only those who pose a continuing, imminent threat to the United States where capture is not feasible, and there is a near certainty of no civilian casualties. We're transferring detainees to other countries and trying terrorists in courts of law, while working diligently to close the prison at Guantanamo Bay. And just as we reviewed how we deploy our extraordinary military capabilities in a way that lives up to our ideals, we've begun to review the way that we gather intelligence, so that we properly balance the legitimate security concerns of our citizens and allies with the privacy concerns that all people share.

7 As a result of this work, and cooperation with allies and partners, the world is more stable than it was five years ago. But even a glance at today's headlines indicates that dangers remain. In Kenya, we've seen terrorists target innocent civilians in a crowded shopping mall, and our hearts go out to the families of those who have been affected. In Pakistan, nearly 100 people were recently killed by suicide bombers outside a church. In Iraq, killings and car bombs continue to be a terrible part of life. And meanwhile, al Qaeda has splintered into regional networks and militias, which doesn't give them the capacity at this point to carry out attacks like 9/11, but does pose serious threats to governments and diplomats, businesses and civilians all across the globe.

8 Just as significantly, the convulsions in the Middle East and North Africa have laid bare deep divisions within societies, as an old order is upended and people grapple with what comes next. Peaceful movements have too often been answered by violence -- from those resisting change and from extremists trying to hijack change. Sectarian conflict has reemerged. And the potential spread of weapons of mass destruction continues to cast a shadow over the pursuit of peace.

9 Nowhere have we seen these trends converge more powerfully than in

Syria. There, peaceful protests against an authoritarian regime were met with repression and slaughter. In the face of such carnage, many retreated to their sectarian identity -- Alawite and Sunni; Christian and Kurd -- and the situation spiraled into civil war.

10

The international community recognized the stakes early on, but our response has not matched the scale of the challenge. Aid cannot keep pace with the suffering of the wounded and displaced. A peace process is stillborn. America and others have worked to bolster the moderate opposition, but extremist groups have still taken root to exploit the crisis. Assad's traditional allies have propped him up, citing principles of sovereignty to shield his regime. And on August 21st, the regime used chemical weapons in an attack that killed more than 1,000 people, including hundreds of children.

11

Now, the crisis in Syria, and the destabilization of the region, goes to the heart of broader challenges that the international community must now confront. How should we respond to conflicts in the Middle East and North Africa -- conflicts between countries, but also conflicts within them? How do we address the choice of standing callously by while children are subjected to nerve gas, or embroiling ourselves in someone else's civil war? What is the role of force in resolving disputes that threaten the stability of the region and undermine all basic standards of civilized conduct? What is the role of the United Nations and international law in meeting cries for justice?

12

Today, I want to outline where the United States of America stands on these issues. With respect to Syria, we believe that as a starting point, the international community must enforce the ban on chemical weapons. When I stated my willingness to order a limited strike against the Assad regime in response to the brazen use of chemical weapons, I did not do so lightly. I did so because I believe it is in the security interest of the United States and in the interest of the world to meaningfully enforce a prohibition whose origins are older than the United Nations itself. The ban against the use of chemical weapons, even in war, has been agreed to by 98 percent of humanity. It is strengthened by the searing memories of soldiers suffocating in the trenches; Jews slaughtered in gas chambers; Iranians poisoned in the many tens of thousands.

13

The evidence is overwhelming that the Assad regime used such weapons on August 21st. U.N. inspectors gave a clear accounting that advanced rockets fired large quantities of sarin gas at civilians. These rockets were fired from a regime-controlled neighborhood, and landed in opposition neighborhoods. It's an insult to human reason -- and to the legitimacy of this institution -- to suggest that anyone other than the regime carried out

this attack.

14 Now, I know that in the immediate aftermath of the attack there were those who questioned the legitimacy of even a limited strike in the absence of a clear mandate from the Security Council. But without a credible military threat, the Security Council had demonstrated no inclination to act at all. However, as I've discussed with President Putin for over a year, most recently in St. Petersburg, my preference has always been a diplomatic resolution to this issue. And in the past several weeks, the United States, Russia and our allies have reached an agreement to place Syria's chemical weapons under international control, and then to destroy them.

15 The Syrian government took a first step by giving an accounting of its stockpiles. Now there must be a strong Security Council resolution to verify that the Assad regime is keeping its commitments, and there must be consequences if they fail to do so. If we cannot agree even on this, then it will show that the United Nations is incapable of enforcing the most basic of international laws. On the other hand, if we succeed, it will send a powerful message that the use of chemical weapons has no place in the 21st century, and that this body means what it says.

16 Agreement on chemical weapons should energize a larger diplomatic effort to reach a political settlement within Syria. I do not believe that military action -- by those within Syria, or by external powers -- can achieve a lasting peace. Nor do I believe that America or any nation should determine who will lead Syria; that is for the Syrian people to decide. Nevertheless, a leader who slaughtered his citizens and gassed children to death cannot regain the legitimacy to lead a badly fractured country. The notion that Syria can somehow return to a pre-war status quo is a fantasy.

17 It's time for Russia and Iran to realize that insisting on Assad's rule will lead directly to the outcome that they fear: an increasingly violent space for extremists to operate. In turn, those of us who continue to support the moderate opposition must persuade them that the Syrian people cannot afford a collapse of state institutions, and that a political settlement cannot be reached without addressing the legitimate fears and concerns of Alawites and other minorities.

18 We are committed to working this political track. And as we pursue a settlement, let's remember this is not a zero-sum endeavor. We're no longer in a Cold War. There's no Great Game to be won, nor does America have any interest in Syria beyond the wellbeing of its people, the stability of its neighbors, the elimination of chemical weapons, and ensuring that it does not become a safe haven for terrorists.

19 I welcome the influence of all nations that can help bring about a peaceful resolution of Syria's civil war. And as we move the Geneva process forward, I urge all nations here to step up to meet humanitarian needs in Syria and surrounding countries. America has committed over a billion dollars to this effort, and today I can announce that we will be providing an additional \$340 million. No aid can take the place of a political resolution that gives the Syrian people the chance to rebuild their country, but it can help desperate people to survive.

20 What broader conclusions can be drawn from America's policy toward Syria? I know there are those who have been frustrated by our unwillingness to use our military might to depose Assad, and believe that a failure to do so indicates a weakening of American resolve in the region. Others have suggested that my willingness to direct even limited military strikes to deter the further use of chemical weapons shows we've learned nothing from Iraq, and that America continues to seek control over the Middle East for our own purposes. In this way, the situation in Syria mirrors a contradiction that has persisted in the region for decades: the United States is chastised for meddling in the region, accused of having a hand in all manner of conspiracy; at the same time, the United States is blamed for failing to do enough to solve the region's problems and for showing indifference toward suffering Muslim populations.

21 I realize some of this is inevitable, given America's role in the world. But these contradictory attitudes have a practical impact on the American people's support for our involvement in the region, and allow leaders in the region -- as well as the international community sometimes -- to avoid addressing difficult problems themselves.

22 So let me take this opportunity to outline what has been U.S. policy towards the Middle East and North Africa, and what will be my policy during the remainder of my presidency. The United States of America is prepared to use all elements of our power, including military force, to secure our core interests in the region.

23 We will confront external aggression against our allies and partners, as we did in the Gulf War.

24 We will ensure the free flow of energy from the region to the world. Although America is steadily reducing our own dependence on imported oil, the world still depends on the region's energy supply, and a severe disruption could destabilize the entire global economy.

25 We will dismantle terrorist networks that threaten our people.

Wherever possible, we will build the capacity of our partners, respect the sovereignty of nations, and work to address the root causes of terror. But when it's necessary to defend the United States against terrorist attack, we will take direct action.

26

And finally, we will not tolerate the development or use of weapons of mass destruction. Just as we consider the use of chemical weapons in Syria to be a threat to our own national security, we reject the development of nuclear weapons that could trigger a nuclear arms race in the region, and undermine the global nonproliferation regime.

27

Now, to say that these are America's core interests is not to say that they are our only interests. We deeply believe it is in our interests to see a Middle East and North Africa that is peaceful and prosperous, and will continue to promote democracy and human rights and open markets, because we believe these practices achieve peace and prosperity. But I also believe that we can rarely achieve these objectives through unilateral American action, particularly through military action. Iraq shows us that democracy cannot simply be imposed by force. Rather, these objectives are best achieved when we partner with the international community and with the countries and peoples of the region.

28

So what does this mean going forward? In the near term, America's diplomatic efforts will focus on two particular issues: Iran's pursuit of nuclear weapons, and the Arab-Israeli conflict. While these issues are not the cause of all the region's problems, they have been a major source of instability for far too long, and resolving them can help serve as a foundation for a broader peace.

29

The United States and Iran have been isolated from one another since the Islamic Revolution of 1979. This mistrust has deep roots. Iranians have long complained of a history of U.S. interference in their affairs and of America's role in overthrowing an Iranian government during the Cold War. On the other hand, Americans see an Iranian government that has declared the United States an enemy and directly -- or through proxies -- taken American hostages, killed U.S. troops and civilians, and threatened our ally Israel with destruction.

30

I don't believe this difficult history can be overcome overnight -- the suspicions run too deep. But I do believe that if we can resolve the issue of Iran's nuclear program, that can serve as a major step down a long road towards a different relationship, one based on mutual interests and mutual respect.

31

Since I took office, I've made it clear in letters to the Supreme Leader in

Iran and more recently to President Rouhani that America prefers to resolve our concerns over Iran's nuclear program peacefully, although we are determined to prevent Iran from developing a nuclear weapon. We are not seeking regime change and we respect the right of the Iranian people to access peaceful nuclear energy. Instead, we insist that the Iranian government meet its responsibilities under the Nuclear Non-Proliferation Treaty and U.N. Security Council resolutions.

32 Meanwhile, the Supreme Leader has issued a fatwa against the development of nuclear weapons, and President Rouhani has just recently reiterated that the Islamic Republic will never develop a nuclear weapon.

33 So these statements made by our respective governments should offer the basis for a meaningful agreement. We should be able to achieve a resolution that respects the rights of the Iranian people, while giving the world confidence that the Iranian program is peaceful. But to succeed, conciliatory words will have to be matched by actions that are transparent and verifiable. After all, it's the Iranian government's choices that have led to the comprehensive sanctions that are currently in place. And this is not simply an issue between the United States and Iran. The world has seen Iran evade its responsibilities in the past and has an abiding interest in making sure that Iran meets its obligations in the future.

34 But I want to be clear we are encouraged that President Rouhani received from the Iranian people a mandate to pursue a more moderate course. And given President Rouhani's stated commitment to reach an agreement, I am directing John Kerry to pursue this effort with the Iranian government in close cooperation with the European Union -- the United Kingdom, France, Germany, Russia and China.

35 The roadblocks may prove to be too great, but I firmly believe the diplomatic path must be tested. For while the status quo will only deepen Iran's isolation, Iran's genuine commitment to go down a different path will be good for the region and the world, and will help the Iranian people meet their extraordinary potential -- in commerce and culture; in science and education.

36 We are also determined to resolve a conflict that goes back even further than our differences with Iran, and that is the conflict between Palestinians and Israelis. I've made it clear that the United States will never compromise our commitment to Israel's security, nor our support for its existence as a Jewish state. Earlier this year, in Jerusalem, I was inspired by young Israelis who stood up for the belief that peace was necessary, just, and possible. And I believe there's a growing recognition within Israel that the occupation of the West Bank is tearing at the democratic fabric of the Jewish state. But the children of Israel have the right to live in

a world where the nations assembled in this body fully recognize their country, and where we unequivocally reject those who fire rockets at their homes or incite others to hate them.

37 Likewise, the United States remains committed to the belief that the Palestinian people have a right to live with security and dignity in their own sovereign state. On the same trip, I had the opportunity to meet with young Palestinians in Ramallah whose ambition and incredible potential are matched by the pain they feel in having no firm place in the community of nations. They are understandably cynical that real progress will ever be made, and they're frustrated by their families enduring the daily indignity of occupation. But they too recognize that two states is the only real path to peace -- because just as the Palestinian people must not be displaced, the state of Israel is here to stay.

38 So the time is now ripe for the entire international community to get behind the pursuit of peace. Already, Israeli and Palestinian leaders have demonstrated a willingness to take significant political risks. President Abbas has put aside efforts to short-cut the pursuit of peace and come to the negotiating table. Prime Minister Netanyahu has released Palestinian prisoners and reaffirmed his commitment to a Palestinian state. Current talks are focused on final status issues of borders and security, refugees and Jerusalem.

39 So now the rest of us must be willing to take risks as well. Friends of Israel, including the United States, must recognize that Israel's security as a Jewish and democratic state depends upon the realization of a Palestinian state, and we should say so clearly. Arab states, and those who supported the Palestinians, must recognize that stability will only be served through a two-state solution and a secure Israel.

40 All of us must recognize that peace will be a powerful tool to defeat extremists throughout the region, and embolden those who are prepared to build a better future. And moreover, ties of trade and commerce between Israelis and Arabs could be an engine of growth and opportunity at a time when too many young people in the region are languishing without work. So let's emerge from the familiar corners of blame and prejudice. Let's support Israeli and Palestinian leaders who are prepared to walk the difficult road to peace.

41 Real breakthroughs on these two issues -- Iran's nuclear program, and Israeli-Palestinian peace -- would have a profound and positive impact on the entire Middle East and North Africa. But the current convulsions arising out of the Arab Spring remind us that a just and lasting peace cannot be measured only by agreements between nations. It must also be



measured by our ability to resolve conflict and promote justice within nations. And by that measure, it's clear that all of us have a lot more work to do.

42

When peaceful transitions began in Tunisia and Egypt, the entire world was filled with hope. And although the United States -- like others -- was struck by the speed of transition, and although we did not -- and in fact could not -- dictate events, we chose to support those who called for change. And we did so based on the belief that while these transitions will be hard and take time, societies based upon democracy and openness and the dignity of the individual will ultimately be more stable, more prosperous, and more peaceful.

43

Over the last few years, particularly in Egypt, we've seen just how hard this transition will be. Mohamed Morsi was democratically elected, but proved unwilling or unable to govern in a way that was fully inclusive. The interim government that replaced him responded to the desires of millions of Egyptians who believed the revolution had taken a wrong turn, but it, too, has made decisions inconsistent with inclusive democracy -- through an emergency law, and restrictions on the press and civil society and opposition parties.

44

Of course, America has been attacked by all sides of this internal conflict, simultaneously accused of supporting the Muslim Brotherhood, and engineering their removal of power. In fact, the United States has purposely avoided choosing sides. Our overriding interest throughout these past few years has been to encourage a government that legitimately reflects the will of the Egyptian people, and recognizes true democracy as requiring a respect for minority rights and the rule of law, freedom of speech and assembly, and a strong civil society.

45

That remains our interest today. And so, going forward, the United States will maintain a constructive relationship with the interim government that promotes core interests like the Camp David Accords and counterterrorism. We'll continue support in areas like education that directly benefit the Egyptian people. But we have not proceeded with the delivery of certain military systems, and our support will depend upon Egypt's progress in pursuing a more democratic path.

46

And our approach to Egypt reflects a larger point: The United States will at times work with governments that do not meet, at least in our view, the highest international expectations, but who work with us on our core interests. Nevertheless, we will not stop asserting principles that are consistent with our ideals, whether that means opposing the use of violence as a means of suppressing dissent, or supporting the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights.

47

We will reject the notion that these principles are simply Western exports, incompatible with Islam or the Arab World. We believe they are the birthright of every person. And while we recognize that our influence will at times be limited, although we will be wary of efforts to impose democracy through military force, and although we will at times be accused of hypocrisy and inconsistency, we will be engaged in the region for the long haul. For the hard work of forging freedom and democracy is the task of a generation.

48

And this includes efforts to resolve sectarian tensions that continue to surface in places like Iraq, Bahrain and Syria. We understand such longstanding issues cannot be solved by outsiders; they must be addressed by Muslim communities themselves. But we've seen grinding conflicts come to an end before -- most recently in Northern Ireland, where Catholics and Protestants finally recognized that an endless cycle of conflict was causing both communities to fall behind a fast-moving world. And so we believe those same sectarian conflicts can be overcome in the Middle East and North Africa.

49

To summarize, the United States has a hard-earned humility when it comes to our ability to determine events inside other countries. The notion of American empire may be useful propaganda, but it isn't borne out by America's current policy or by public opinion. Indeed, as recent debates within the United States over Syria clearly show, the danger for the world is not an America that is too eager to immerse itself in the affairs of other countries or to take on every problem in the region as its own. The danger for the world is that the United States, after a decade of war -- rightly concerned about issues back home, aware of the hostility that our engagement in the region has engendered throughout the Muslim world -- may disengage, creating a vacuum of leadership that no other nation is ready to fill.

50

I believe such disengagement would be a mistake. I believe America must remain engaged for our own security. But I also believe the world is better for it. Some may disagree, but I believe America is exceptional -- in part because we have shown a willingness through the sacrifice of blood and treasure to stand up not only for our own narrow self-interests, but for the interests of all.

51

I must be honest, though. We're far more likely to invest our energy in those countries that want to work with us, that invest in their people instead of a corrupt few; that embrace a vision of society where everyone can contribute -- men and women, Shia or Sunni, Muslim, Christian or Jew. Because from Europe to Asia, from Africa to the Americas, nations that have persevered on a democratic path have emerged more prosperous,

more peaceful, and more invested in upholding our common security and our common humanity. And I believe that the same will hold true for the Arab world.

52

This leads me to a final point. There will be times when the breakdown of societies is so great, the violence against civilians so substantial that the international community will be called upon to act. This will require new thinking and some very tough choices. While the United Nations was designed to prevent wars between states, increasingly we face the challenge of preventing slaughter within states. And these challenges will grow more pronounced as we are confronted with states that are fragile or failing -- places where horrendous violence can put innocent men, women and children at risk, with no hope of protection from their national institutions.

53

I have made it clear that even when America's core interests are not directly threatened, we stand ready to do our part to prevent mass atrocities and protect basic human rights. But we cannot and should not bear that burden alone. In Mali, we supported both the French intervention that successfully pushed back al Qaeda, and the African forces who are keeping the peace. In Eastern Africa, we are working with partners to bring the Lord's Resistance Army to an end. And in Libya, when the Security Council provided a mandate to protect civilians, America joined a coalition that took action. Because of what we did there, countless lives were saved, and a tyrant could not kill his way back to power.

54

I know that some now criticize the action in Libya as an object lesson. They point to the problems that the country now confronts -- a democratically elected government struggling to provide security; armed groups, in some places extremists, ruling parts of a fractured land. And so these critics argue that any intervention to protect civilians is doomed to fail -- look at Libya. No one is more mindful of these problems than I am, for they resulted in the death of four outstanding U.S. citizens who were committed to the Libyan people, including Ambassador Chris Stevens -- a man whose courageous efforts helped save the city of Benghazi. But does anyone truly believe that the situation in Libya would be better if Qaddafi had been allowed to kill, imprison, or brutalize his people into submission? It's far more likely that without international action, Libya would now be engulfed in civil war and bloodshed.

55

We live in a world of imperfect choices. Different nations will not agree on the need for action in every instance, and the principle of sovereignty is at the center of our international order. But sovereignty cannot be a shield for tyrants to commit wanton murder, or an excuse for the international community to turn a blind eye. While we need to be modest in our belief

that we can remedy every evil, while we need to be mindful that the world is full of unintended consequences, should we really accept the notion that the world is powerless in the face of a Rwanda or Srebrenica? If that's the world that people want to live in, they should say so and reckon with the cold logic of mass graves.

56

But I believe we can embrace a different future. And if we don't want to choose between inaction and war, we must get better -- all of us -- at the policies that prevent the breakdown of basic order. Through respect for the responsibilities of nations and the rights of individuals. Through meaningful sanctions for those who break the rules. Through dogged diplomacy that resolves the root causes of conflict, not merely its aftermath. Through development assistance that brings hope to the marginalized. And yes, sometimes -- although this will not be enough -- there are going to be moments where the international community will need to acknowledge that the multilateral use of military force may be required to prevent the very worst from occurring.

57

Ultimately, this is the international community that America seeks -- one where nations do not covet the land or resources of other nations, but one in which we carry out the founding purpose of this institution and where we all take responsibility. A world in which the rules established out of the horrors of war can help us resolve conflicts peacefully, and prevent the kinds of wars that our forefathers fought. A world where human beings can live with dignity and meet their basic needs, whether they live in New York or Nairobi; in Peshawar or Damascus.

58

These are extraordinary times, with extraordinary opportunities. Thanks to human progress, a child born anywhere on Earth today can do things today that 60 years ago would have been out of reach for the mass of humanity. I saw this in Africa, where nations moving beyond conflict are now poised to take off. And America is with them, partnering to feed the hungry and care for the sick, and to bring power to places off the grid.

59

I see it across the Pacific region, where hundreds of millions have been lifted out of poverty in a single generation. I see it in the faces of young people everywhere who can access the entire world with the click of a button, and who are eager to join the cause of eradicating extreme poverty, and combating climate change, starting businesses, expanding freedom, and leaving behind the old ideological battles of the past. That's what's happening in Asia and Africa. It's happening in Europe and across the Americas. That's the future that the people of the Middle East and North Africa deserve as well -- one where they can focus on opportunity, instead of whether they'll be killed or repressed because of who they are or what

they believe.

60 Time and again, nations and people have shown our capacity to change -- to live up to humanity's highest ideals, to choose our better history. Last month, I stood where 50 years ago Martin Luther King Jr. told America about his dream, at a time when many people of my race could not even vote for President. Earlier this year, I stood in the small cell where Nelson Mandela endured decades cut off from his own people and the world. Who are we to believe that today's challenges cannot be overcome, when we have seen what changes the human spirit can bring? Who in this hall can argue that the future belongs to those who seek to repress that spirit, rather than those who seek to liberate it?

61 I know what side of history I want the United States of America to be on. We're ready to meet tomorrow's challenges with you -- firm in the belief that all men and women are in fact created equal, each individual possessed with a dignity and inalienable rights that cannot be denied. That is why we look to the future not with fear, but with hope. And that's why we remain convinced that this community of nations can deliver a more peaceful, prosperous and just world to the next generation.

62 Thank you very much.

END  
10:52 A.M. EDT